

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 2 No. 2 Juli 2014

PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK KOLABORATIF DALAM KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN PPKn BAGI GURU SMA DI SURAKARTA (Anita Trisiana, Yusuf)

PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM HUBUNGAN ANTAR ETNIK PADA SISWA PASKA KONFLIK DAERAH (Usman Rufai)

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENTAS PEDALANGAN WAYANG KULIT DI KOTA SURAKARTA (Rizka Amalia, Muhtarom)

PERBEDAAN HASIL BELAJAR KOGNITIF ANTARA MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (CTL) DENGAN MODEL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI (Agus Prasetyo, Winarno)

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE *MAKE A MATCH* (Muzamil)

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN (Siti Zulaekhah, Triyanto)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA (Armaidly Armawy)

STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS BUDAYA LOKAL (Mukhamad Murdiono)

DINAMIKA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM DIMENSI HISTORIS, SOSIO-KULTURAL DAN PEMERINTAHAN (Rusnaini)

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH

Jurnal PPKn

ISSN 2303-9412

Penerbit

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
(AP3KnI) - Jawa Tengah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Harmanto, MPd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Nurul Zuriah, MSi. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Dr. Triyanto, SH., MHum.

Ketua Penyunting

Dr. Winarno, SPd., MSi.

Anggota Dewan Penyunting

Arif Kriswahyudi, SPd.
Siti Aminah, SPd.

Alamat Redaksi

Gedung C FKIP UNS
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-646939
Email: *jurnal_ppkn@yahoo.com*
Website: <http://ppkn.org>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya **Jurnal PPKn Vol. 2 No. 2 Juli 2014**. Jurnal ini diterbitkan oleh Asosiasi PPKn Indonesia (AP3KnI) wilayah Jawa Tengah.

Jurnal PPKn berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Pada edisi kali ini dimuat 7 artikel hasil penelitian dan 2 buah artikel hasil pemikiran bidang pendidikan kewarganegaraan. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kegiatan penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan kewarganegaraan . Tujuan jangka panjang adalah memperkaya dimensi PKn akademik. Sasaran pembaca dari Jurnal PPKn adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati bidang PKn.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para mitra bestari dan tim penyunting jurnal yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Juli 2014

Redaksi

DAFTAR ISI

Hal

PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK KOLABORATIF DALAM KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN PPKn BAGI GURU SMA DI SURAKARTA

(Anita Trisiana, Yusuf)

PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM HUBUNGAN ANTAR ETNIK PADA SISWA PASKA KONFLIK DAERAH

(Usman Rufai)

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENTAS PEDALANGAN WAYANG KULIT DI KOTA SURAKARTA

(Rizka Amalia, Muhtarom)

PERBEDAAN HASIL BELAJAR KOGNITIF ANTARA MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (*CTL*) DENGAN MODEL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI (Agus Prasetyo, Winarno)

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE *MAKE A MATCH* (Muzamil)

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN

(Siti Zulaekhah, Triyanto)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA

(Armaidy Armawy)

STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS BUDAYA LOKAL

(Mukhamad Murdiono)

DINAMIKA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM DIMENSI HISTORIS, SOSIO-KULTURAL DAN PEMERINTAHAN

(Rusnaini)

PENGEMBANGAN PENDEKATAN SAINTIFIK KOLABORATIF DALAM KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN PPKn BAGI GURU SMA DI SURAKARTA

Anita Trisiana, Yusuf

PPKn FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Alamat e_mail : anita_trisiana@yahoo.co.id

Abstract. *Long-term goals to be achieved in this study are as follows: found an alternative approach to the development of Scientific Collaborative in 2013 to implement the curriculum in high schools and scientific articles Surakarta local and national scale. The method used in this research is the development of research. The results showed that teachers in the learning process through a phase of 100% has been learning activities of preliminary activities to cover activities, and teachers understand enough Civics learning problems in implementing the curriculum in 2013. Associated with the development of a scientific approach teachers are still having trouble making models and methods of teaching Civics teacher who tend not varied (monotone), facilities and infrastructure and limited instructional media, learning devices Civics teacher held limited, and limited emphasis on learning in the realm of knowledge (alone) is a series of problems faced by both students and teachers in learning Civics. Further scientific development can collaborate learning model developed by Project Citizen, which the citizen project will be consistent with alternative development stages 5 M in saintifik approach.*

Key words: *Collaborative Scientific Approach, Curriculum 2013, Citizenship Education*

PENDAHULUAN

Rasional pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada acuan pencapaian 8 standar, yaitu: standar isi, standar proses (pembelajaran), standar proses (penilaian), standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Semuanya bermuara pada tujuan akhir yaitu mencapai lulusan yang kompeten. Tantangan pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam pembangunan pendidikan dan

kebudayaan juga dapat terlihat pada data hasil UKG pada tahun 2012, yang memfokuskan pada penggabungan kompetensi pedagogi dan professional di tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) mencapai 48,34% dari rata – rata secara nasional dengan angka 43,82% menjadi 91% pada tahun 2014, sedangkan untuk wilayah jawa tengah mencapai angka 46,55%, sehingga masih perlu peningkatan dan perbaikan hingga tahun 2014.

Berdasarkan pra survey di sekolah melalui MGMP PPKN SMA Surakarta (November, 2013) ditemukan data sebagai berikut: guru dalam menerapkan sosialisasi kurikulum 2013 di sekolah menengah atas masih banyak mengalami kesulitan pada aspek pemahaman dan implementasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik kurang dari 70%. Selebihnya (30%), guru hanya memahami secara teoritis belum pada taraf implementasi. Jika dilihat dari aspek kuantitas, dinas pendidikan di Surakarta berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Konsistensi Kurikulum 2013 akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta mewujudkan karakter nasional. Tentunya konsistensi tersebut tetap akan berkorelasi dengan kompetensi guru khususnya dalam melakukan berbagai pendekatan yang bermuara pada *student center learning*.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat aspek-aspek, yaitu (1) identitas mata pelajaran dan identitas sekolah; (2) Kompetensi Inti (KI) di mana (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual, (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial, (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan, (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan; (3) Kompetensi dasar (KD); (4) tema; (5) materi pokok; (6) pembelajaran; (7) penilaian; (8) alokasi waktu; (9) sumber belajar.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP paling sedikit memuat aspek-aspek, yaitu (1) identitas mata pelajaran dan identitas sekolah; (2) kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik (*scientific approach*); (3) materi pembelajaran; (4) alokasi waktu;

(5) tujuan pembelajaran dengan format ABCD

Menurut Samsuri (2013), aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 ialah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah – langkah saintifik dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui konsepsi 5 M, memungkinkan perubahan paradigma pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari pembelajaran pasif kepada pembelajaran aktif, kooperatif, dan kritis. Sedangkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), mengikuti Gerhard Himmelmann (2013), mengubah paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal-individual, moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan bersama yang menghargai hak-hak asasi manusia

dan demokrasi di dunia yang penuh konflik.

Upaya penyempurnaan kurikulum pada Kurikulum 2013 dapat mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya , yakni aspek – aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan , keterampilan, kesehatan , seni dan budaya. Pengembangan aspek – aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup serta menyesuaikan diri dan berhasil dalam kehidupan. Kurikulum ini dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah dan sekolah.

Penelitian ini bermaksud, menelaah lebih lanjut bagaimana pengembangan pendekatan saintifik kolaboratif dalam kurikulum 2013 pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi guru Sekolah Menengah Atas di Surakarta. Dengan harapan semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013 dalam pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik, dan sekaligus sebagai bagian dari peningkatan kompetensi guru PPKn .

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “ Bagaimanakah pengembangan Pendekatan Saintifik Kolaboratif Dalam Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bagi Guru Sekolah Menengah Atas di Surakarta?”

Secara khusus penelitian ini bertujuan mengembangkan Pendekatan Saintifik kolaboratif dalam Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi Guru Sekolah Menengah Atas di Surakarta. Melalui penelitian ini akan membantu pemerintah Dalam upaya pengembangan dan penerapan kurikulum 2013. Untuk yang berjangka pendek dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemetaan kebijakan pendidikan sebagai peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk jangka panjang antara lain adalah dengan meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan profesionalismenya.

Pembelajaran merupakan proses ilmiah, karena itu proses pembelajaran harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran,

pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.

Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini.

1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.
2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.
3. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.
4. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran.
6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu mengapa." Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu bagaimana". Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu apa." Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia

yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu mengapa." Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu bagaimana". Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik "tahu apa." Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penjelasan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar.1. Hubungan antara ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam belajar (Kemendikbud, 2013)

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba,

mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014/2015. Latar penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas di Surakarta Subyek penelitian adalah para Guru pendidikan menengah khususnya SMA. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling yang dilakukan secara berurutan. Para key informan adalah Kepala Sekolah, Ketua MGMP PPKn SMA, Siswa.

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian dan pengembangan (*research & development*) adalah penelitian yang bertujuan mengembangkan suatu model, baik yang berupa perangkat keras (*hardware*) maupun yang berupa perangkat lunak (*software*). Gall, Gall, dan Borg (2003: 569) mendefinisikan Educational R & D sebagai berikut:

Educational Reserarch and Development (Educational R & D) is an industry-based development model in which the findings of the research are used to design new products and procedures, which then are systematically field-tested, evaluated, and refined until they meet specified criteria of effectiveness, quality, or similar standard.

Dijelaskan oleh Borg dan Gall (1983: 772) bahwa istilah product merujuk tidak hanya pada objek material, seperti buku teks, film pembelajaran, dan lain-lain, tetapi juga prosedur dan proses, seperti metode pembelajaran atau metode untuk mengorganisir pembelajaran.

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data

sekunder. Data primer berupa informasi mengenai pelaku/*informant*, tempat dan peristiwa (melalui *site inspection*).

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yakni:

- 1) Observasi lapangan dengan pengamatan terlibat (*participant observation*);
- 2) FGD (*Focus Group Discussion*);
- 3) Wawancara mendalam (*in-depth interview*);
- 4) Metode dokumenter (*documentary study*).

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini akan didasarkan pada Model Analisis Interaktif (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenalkan dalam Kurikulum 2006 (Permendikbud No. 22 Tahun 2006) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Kurikulum 2013 Materi kurikulum mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan disajikan dalam Standar Isi (SI) yang meliputi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Ada persoalan penting lainnya antara SI dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran yang perlu disampaikan

di sini. Rumusan-rumusan SI Pendidikan Kewarganegaraan ada yang tidak tercakup dalam SKL Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dibutuhkan orientasi model yang lebih kompleks dan menyeluruh mengenai berbagai teori dan hasil penelitian yang membawa perubahan paradigma baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. pengembangan SI Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan Pancasila sebagai pancaran nilai yang aktual dan fungsional, tidak semata-mata menjadi rumusan normatif, dalam berbagai topik, meskipun ada satu topik khusus tentang Pancasila itu sendiri.

Komponen model yang akan dikembangkan harus selaras dengan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 yang menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan secara vertikal dan horisontal menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran.

Aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum

2013 ialah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran. Ini meyakinkan peneliti bahwa semangat keilmuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dilestarikan dalam Kurikulum 2013, di mana basis keilmuan yang menjadi kajian pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan haruslah jelas dan tegas batas-batas disiplinnya.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengikuti Gerhard Himmelmann (2013: 3 - 8), bahwa:

“Mengubah paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal-individual, moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan bersama yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik”.

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui konsepsi 5 M, memungkinkan perubahan paradigma pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari pembelajaran pasif dan konfirmatif kepada pembelajaran aktif, kooperatif, dan kritis. Pembentukan karakter warga negara tidak cukup menjadi baik yang ditandai oleh sikap loyal dan kepatuhan terhadap kekuasaan negara. Komponen model akan menjadi jelas dari mulai persiapan perangkatan pembelajaran, yaitu pada langkah proses belajar mengajar, model pembelajaran, prinsip pembelajaran, sistem penunjang, dampak instruksional, dan dampak pengiring. Kemudian komponen model tersebut diberikan analisis berdasarkan tahapan : orientasi, hipotesis, definisi, eksplorasi, pembuktian dan generalisasi.

Selanjutnya komponen model tersebut

dianalisis kembali mulai dari desain perencanaan, desain pelaksanaan, dan desain evaluasi, yang diarahkan pada tujuan dan kompetensi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu pada aspek civic knowledge, civic disposition, dan civic skill.

Pembentukan karakter tidak hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan secara vertikal dan horisontal selaras dengan tujuan serta kajian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ponimin, SPd yaitu seorang Guru PPKn dari SMA Batik 2 Surakarta mengatakan bahwa:

Untuk masalah penerapan pendekatan scientific dalam kurikulum 2013, saya sudah melaksanakan hanya saja masih ada persoalan terkait dengan

pengembangan dan penerapan model yang masih terlalu sulit dan belum dapat menyampaikan materi secara sistematis, serta persoalan pengembangan penilaian proses dan hasil unjuk kerja siswa yang masih belum optimal untuk mengarahkan siswa unjuk kebolehan dalam praktek kewarganegaraan yang berbasis pada masalah.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Sutarno, yang mengatakan bahwa : “ Untuk masalah penerapan pendekatan scientific, saya masih belum dapat menerapkan model pembelajaran yang dapat memunculkan tanggungjawab anak didik saat ini. Sehingga

pengembangan Portofolio di kelas sebagai bagian dari proses kegiatan inti terutama pada tahap pembuatan jejaring sesuai dengan permasalahan kompetensi dasar belum secara efektif dilakukan, sehingga saya merasa masih cukup lemah dalam menerapkan kurikulum 2013.

Berikut ini di jelaskan hasil dari pengisian angket mengenai pembelajaran PPKN di Sekolah Menengah Atas dalam Kurikulum 2013, dengan penentuan kriteria penilaian dalam bentuk prosentase hasil jawaban dari angket sebagai berikut:

1. Kriteria tercapai : 50 – 100 %
2. Tidak tercapai : 10 – 50 %

Tabel 1.
Kegiatan Apersepsi dan Motivasi dalam Pembelajaran

PERMASALAHAN		F	(%)
Kegiatan Pendahuluan			
Apersepsi dan Motivasi			
1	Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya.	10	100
2	Mengajukan pertanyaan menantang terkait muatan Nilai Moral	10	100
3	Menyampaikan manfaat materi pembelajaran.	10	100
4	Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran.	10	100

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa guru dalam melakukan kegiatan pendahuluan di awal pelajaran 100 % sudah

melakukan keseluruhan komponen kegiatan pendahuluan salah satunya yaitu kegiatan apersepsi , Motivasi, sehingga

nantinya akan berpengaruh terhadap ketercapaian penyampaian kompetensi serta rencana kegiatan yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran. Dengan demikian angka ketercapaian 100% tercapai.

Tabel 2.
Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan

PERMASALAHAN		F	(%)
Kegiatan Pendahuluan			
Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan			
1	Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik.	10	100
2	Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi.	10	100
3	Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan.	10	100

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa guru dalam melakukan kegiatan pendahuluan di awal pelajaran 100 % sudah melakukan keseluruhan komponen kegiatan pendahuluan yaitu setelah melakukan kegiatan aperepsi , Motivasi, berpengaruh

terhadap ketercapaian penyampaian kompetensi serta rencana kegiatan yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran. Dengan demikian angka ketercapaian 100% tercapai.

Tabel 3
Penguasaan Materi Pelajaran

Kegiatan Inti		F	(%)
Penguasaan Materi Pelajaran			
1	Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran.	10	100
2	Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan Iptek , dan kehidupan nyata.	10	100
3	Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat.	10	100

4	Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak)	10	100
---	---	----	-----

Dari Tabel 3 di atas, Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik 100 % untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru

menguasai materi pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik, dari materi tersulit disampaikan dengan termudah yang disampaikan secara sistematis.

Tabel 4.
Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik

Kegiatan Inti		F	(%)
Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik			
1	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.	10	100
2	Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.	10	100
3	Melaksanakan pembelajaran secara runtut.	10	100
4	Menguasai kelas.	10	100
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual.	10	100
6	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (<i>nurturant effect</i>).	10	100
7	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan.	10	100

Dari Tabel 4, di atas maka 100 % menyepakati bahwa strategi pembelajaran akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menyampaikan suatu materi

terhadap siswa dari sumber informasi yaitu guru. Strategi pembelajaran ini menjadi langkah awal yang harus diketahui sebelum guru melakukan proses belajar mengajar pada siswa di dalam kelas.

Tabel 5.
Penerapan Model Pembelajaran

Kegiatan Inti		F	(%)
Penerapan Model Pembelajaran			
1	Penjelasan informasi sesuai dengan KD	10	100
2	Mengidentifikasi masalah	10	100
3	Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas	10	100
4	Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah	10	100
5	Mengembangkan portofolio kelas	8	80
6	Menyajikan portofolio	8	80
7	Melakukan refleksi pengalaman belajar	8	80

Dari Tabel 5, di atas maka terlihat 80% dalam menyajikan portofolio masih mengalami permasalahan, walaupun guru sudah dapat melakukan

penerapan model pembelajaran yang inovatif, namun refleksi pengalaman belajar akhirnya tidak sepenuhnya tercapai

Tabel 6.
Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran

Kegiatan Inti		F	(%)
Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran			
1	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar pembelajaran.	10	100
2	Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran.	10	100
3	Menghasilkan pesan yang menarik.	10	100
4	Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar pembelajaran.	10	100
5	Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran.	10	100

Dari Tabel 6 di atas, pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 100%

sudah bervariasi dalam proses pembelajaran, hanya saja masih memungkinkan bagi para guru

untuk mengembangkan lebih lanjut sehingga peserta didik dapat terlibat langsung dalam pemanfaatan media.

Tabel 7
Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran

Kegiatan Inti		F	(%)
Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran			
1	Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar.	10	100
2	Merespon positif partisipasi peserta didik.	10	100
3	Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik.	10	100
4	Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif.	10	100
5	Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar.	10	100

Dari Tabel 7, di atas disimpulkan bahwa 100% pelibatan peserta didik dalam pembelajaran menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. Dan akan menimbulkan keceriaan tersendiri oleh peserta didik.

Tabel 8
Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran

Kegiatan Inti		F	(%)
Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran			
1	Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar.	10	100
2	Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.	10	100

Dari Tabel 8, di atas dapat disimpulkan bahwa 100% Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran perlu dilakukan agar keseluruhan proses pembelajaran dapat mencapai tujuannya, Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar.

Tabel 9.
Penutup pembelajaran

Kegiatan Inti		F	(%)
Penutup pembelajaran			
1	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik.	10	100
2	Memberikan tes lisan atau tulisan .	10	100
3	Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.	10	100
4	Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan.	10	100

Dari Tabel 9, di atas dapat disimpulkan bahwa 100% dalam melakukan kegiatan pebutup pembelajaran telah melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. Hanya saja yang perlu menjadi catatan adalah penilaian proses yang sering tidak dilakukan oleh guru dalam pembelajaran.

Dari paparan mengenai hasil penelitian tersebut, maka selanjutnya peneliti membuat desain pengembangan sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pengembangan model dapat diartikan sebagai upaya memperluas untuk membawa suatu keadaan atau situasi secara berjenjang kepada situasi yang lebih sempurna atau lebih lengkap maupun keadaan yang lebih baik. Desain pengembangan diselaraskan dengan model

ADDIE, model desain pembelajaran ini dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem pembelajaran.

Kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan secara vertikal dan horisontal menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran.

Penyusunan perangkat pembelajaran menerapkan pendekatan *scientific* yang dikolaboratikan dengan model pembelajaran yang akan dikembangkan oleh peneliti berdasarkan model pembelajaran project citizen menjadi Scientific

Kolaboratif, dimana proses pembelajaran yang relevan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional maupun intelektual mencakup indikator pada ranah pengetahuan sebagai berikut:

- Membuat desain perencanaan dengan mengidentifikasi rambu-rambu penyusunan Silabus dan RPP;
- Mengidentifikasi SKL, KI dan KD yang dibuat dalam Silabus dan RPP
- Membuat desain pelaksanaan yang diarahkan pada pengembangan CP.
- Perancangan desain penilaian yaitu Penilaian Autentik pada

proses dan hasil belajar dengan kompetensi merancang penilaian autentik pada proses dan hasil belajar mencakup indikator pada ranah pengetahuan sebagai berikut:

- mengidentifikasi kaidah perancangan penilaian autentik pada proses dan hasil belajar; dan
- mengidentifikasi jenis dan bentuk penilaian pada proses dan hasil belajar sesuai karakteristik mata pelajaran.

Berikut ini adalah pemaparan mengenai langkah pembelajaran yang merupakan pengembangan dari pendekatan Saintifik Kolaboratif, sebagai berikut:

MODEL SAINTIFIK KOLABORATIF : ...1

Langkah Pembelajaran	Kegiatan Belajar	Kompetensi Yang Dikembangkan
Penjelasan Informasi sesuai KD	Membaca, mendengar, menyimak, dan melihat (tanpa atau dengan alat)	Melatih kesungguhan, kesabaran, ketelitian dan kemampuan membedakan informasi yang umum dan khusus, kemampuan berpikir analitis, kritis, deduktif, dan komprehensif (Civic Knowledge)
Mengidentifikasi Masalah	Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)	Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk critical minds yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat (Civic skill dan civic Disposition)

MODEL SAINTIFIK KOLABORATIF: ...2

Langkah Pembelajaran	Kegiatan Belajar	Kompetensi Yang Dikembangkan
Memilih Masalah untuk dikaji oleh kelas	-Melakukan eksperimen -membaca sumber lain selain buku teks -mengamati objek/kejadian/ aktivitas -wawancara dengan nara sumber	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi , menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. (Civic skill dan civic Disposition)
Mengumpulkan Masalah terkait dengan masalah yang dipilih	<ul style="list-style-type: none"> Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 	Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras , kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. (Civic skill dan civic Disposition)

Model SAINTIFIK KOLABORATIF : ...3

Langkah Pembelajaran	Kegiatan Belajar	Kompetensi Yang Dikembangkan
Mengembangkan Portofolio Kelas	-Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. (Civic skill dan civic Disposition
Menyajikan Portofolio Melakukan Refleksi Pengalaman Belajar	Memodifikasi, menyusun kembali untuk menemukan yang baru, dan menemukan yang baru secara original	Kreativitas dan kejujuran serta apresiasi terhadap karya orang lain dan bangsa lain (Civic skill dan civic Disposition

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Guru dalam melakukan proses pembelajaran 100% sudah melalui tahap kegiatan pembelajaran dari kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan penutup, dan guru cukup memahami persoalan pembelajaran PPKN dalam melaksanakan kurikulum 2013. Berkaitan dengan pengembangan pendekatan scientific guru masih mengalami kesulitan sehingga Model dan metode mengajar guru PKn yang cenderung tidak variatif (monoton), sarana dan prasarana dan media pembelajaran yang terbatas, perangkat pembelajaran PKn yang dipegang guru yang

terbatas, dan penekanan pembelajaran yang terbatas di ranah *knowledge* (saja) adalah serangkaian persoalan yang dihadapi baik siswa ataupun guru dalam pembelajaran PKn. Selanjutnya pengembangan scientific dapat dikembangkan dengan mengkolaborasikan model pembelajaran Project Citizen, dimana project citizen akan menjadi alternative pengembangan yang selaras dengan tahapan 5 M dalam pendekatan scientific.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengembangkan pendekatan

scientific dalam kurikulum 2013, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif, dan sosialisasi pengembangan model melalui kegiatan ilmiah , serta sosialisasi melalui bahan ajar dari model pembelajaran yang dihasilkan, sehingga guru benar – benar mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Andrias Harefa. (2000). *Menjadi Manusia Pembelajar*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Joyce, B & Weil M, (2009). Model Of Teaching. *New Jersey, Prentice- Hall, Inc*
- Joyce, Bruce, Marsha Weill, Emily Calhoun, (2011). Model Of Teaching (*Alih Bahasa: Ahmad Fawaid dan Ateilla Mirza*) Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*
- Kemendiknas, (2010). Kebijakan Pendidikan Karakter Bangsa. *Jakarta: Kemendiknas*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Materi Sosialisasi Kurikulum 2013 untuk Asesor Sertifikasi Guru, *di Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta, Juli 2013*.
- Kohlberg, Lawrence, (1977). Tahap – Tahap Perkembangan Moral, *Yogyakarta: Kanisius*
- Larry P.N, Darcia Narvaez, (2014). Handbook Pendidikan Moral dan Karakter (Handbook of Moral and Character Education). *Bandung: Nusa Media*
- Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility, *New York: Simon & Schuster, Inc*
- _____. (2004). Character Matters: How to Help Our Children Develop
- Mayer, RE, (2008). *Leraning and Instruction* . New Jersey: Pearson
- Megawangi, Ratna, (2004). *Pengembangan Program Pendidikan Karakter Di Sekolah: Pengalaman Sekolah*, Terdapat di [http. pendidikan.com/Pilar pendidikan Karakter/](http://pendidikan.com/Pilar_pendidikan_Karakter/) diakses pada tanggal 15 Januari 2014.
- Mohamad Mustari, (2011). *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Moleong, Lexy, (1998). *Metodologi Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Kemendikbud, 2013. *Materi Sosialisasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kemendikbud
- Komala dan Syaifullah. 2008. *Mamahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek
- Slameto, 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Oemar Hamalik.2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara

**PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM HUBUNGAN ANTAR
ETNIK PADA SISWA PASKA KONFLIK DAERAH
(Studi Kasus di SMA 1 Kota Ternate)**

Usman Rufai

Guru PKn SMA Negeri 9 Kota Ternate Maluku Utara

Alamat e-mail: ternate_usman@yahoo.co.id

ABSTRACT. *Democracy development through civic education learning in school is a process in growing democracy culture through student's civic competency (young citizen) in conducting his/her right and duty. School has strategic role in providing the inculcation of democracy values, both through civic education in school as well as civic education in community. Lack of awareness toward this problem often cause student's interethnic conflict that can bring interethnic conflict impact. Student's gang fight can become interethnic conflict if it is triggered by lack of inter culture understanding. For that, student as young citizen should able to take role in facing the biggest challenge of Indonesia nation that is growing the democracy culture.*

Key words: *Culture, Democracy, Relation, Conflict*

PENDAHULUAN

Menguatnya budaya kekerasan dekade belakangan ini, hampir di seluruh dunia menggambarkan bahwa peradaban modern dan globalisasi masih menyisakan problem panjang. Menurut Giddens (2009:xviii), globalisasi bukanlah sebuah proses tunggal, namun perpaduan proses yang kompleks, yang sering kali berjalan secara bertentangan, sehingga menimbulkan konflik, perpisahan dan bentuk-bentuk stratifikasi baru.

Dalam tulisannya yang bertajuk "*Democracy as a Universal Value*" Amartya Sen (1999), menyebut bahwa di antara berbagai perkembangan hebat yang terjadi di abad ke-20 dan merupakan

perkembangan yang paling nyata adalah kebangkitan demokrasi. Bahmueler (Winataputra, 2005:16), mengemukakan empat faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan demokrasi di suatu negara yaitu, "...*the degree of economic development, historical experience, elemens of civic culture, and a sence of national identity*". Sementara dalam pandangan yang lain Fukuyama (2004: xii), mengungkapkan bahwa ketika masa depan dunia diwarnai oleh peperangan dan perlombaan senjata, maka dunia akan kembali mejadi zaman "barbar" yang tidak mengenal peradaban intelektual dan politik yang demokratis.

De Tocqueville (1805-1859), mengatakan bahwa demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat baru di Amerika karena peran yang sangat besar dari civil society yang berwujud organisasi-organisasi sukarela yang di buat warga komunitas seperti gereja, dewan kota, gilda-gilda ekonomi, kelompok budaya, dan klub debat (<http://www.tempo.co.id>).

Sementara menurut Hefner, (Gatara dan Said, 2007:204), keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada sumber daya kultural setempat. Selain faktor sumber daya, juga tergantung pada tradisi dan organisasi yang mampu mentransformasikan hakikat demokrasi pada masyarakat. Karena itu, kemajuan demokrasi dapat dipahami dengan mempelajari tiga unsur utamanya yaitu; *pertama*, reformasi negara dan insitusi-insitusinya, *kedua*, peraturan dan undang-undang (*rule of law*). *Ketiga*, kultur demokrasi.

Pembangunan warga negara yang demokratis di tingkat persekolahan itu sendiri menjadi tantangan dalam menumbuhkan budaya demokrasi (*Cultur of Democracy*). Nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai kejujuran, dekadensi moral, toleransi antar umat beragama, sikap saling menghargai antara guru dan siswa, perdamaian telah tercerabut dari akarnya, hal ini

diindikasikan bahwa pendidikan disekolah belum memberikan kontribusi yang positif dalam upaya memberikan pencedasaan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya *cultur of democracy* adalah pengalaman masa lampau yang hidup di lingkungan masyarakat yang tidak demokratis atau *undemocratic*.

Dalam *citizenship transmission tradition*, nilai-nilai tertentu yang dipandang sebagai "nilai-nilai yang baik" ditanamkan dalam upaya untuk mengajarkan siswa menjadi warganegara yang baik. Dari laporan temuan Kerr (1999:11) terdapat tiga bentuk kontinum yang dikonseptualisasi dalam tiga pendekatan "*citizenship education*" yaitu;

- 1). *Education About Citizenship focus on providing student with sufficient knowledge and understanding of national history and the structure and process of government and political life.*
- 2). *Education Through Citizenship involves student learning by doing, through active, participative experiences in the school or in local community beyond. This learning reinforces the knowledge component.*

- 3). *Education For Citizenship*, encompasses the order two stands and involves *equipping student with a set of tool (knowledge and understanding, skills and attitudes, value and disposition) wich anabel them to participate avtively and sensibly in the roles and responsibilitities they encounter in their adult lives. This links citizenship education with the whole education experience of student.*

Sejalan dengan pandangan David Kerr di atas, Winataputra menjelaskan bahwa PKn sebagai "*education about democracy*" hanya dapat menghasilkan orang tahu demokrasi tetapi tidak mampu bersikap dan berperilaku demokratis. Sementara itu PKn sebagai "*education in democracy*" dapat menghasilkan orang yang tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi. Sedangkan PKn sebagai "*education for democracy*" sangat potensial menghasilkan orang yang bukan saja tahu, mau, dan mampu hidup berdemokrasi, tetapi juga mau dan mampu memperbaiki kehidupan demokrasi secara terus menerus.

Terkait dengan relasi antar etnik siswa, hubungan antar etnik maupun antar ras hanya bisa terjadi ketika setiap kelompok etnik terlibat

dalam pertukaran sosial, kerjasama persaingan dan konflik. Keterlibatan setiap kelompok etnik ini dibatasi oleh faktor status, peran, kelompok, jaringan interaksi dan insitusi sosial. Betapa banyak orang tidak menyadari kalau hubungan antaretnik sudah dan akan terus berlangsung dalam kehidupan bersama dalam masyarakat (Karliani, 2009:52). Perbedaan-perbedaan dalam konteks budaya, ideologi dan lain-lain harus diluruskan sehingga tidak menjadi bias dalam mengelolah dan memberdayakan kehidupan sosial.

Supardan (2008:19) menegaskan bahwa perbedaan manusia yang kita lihat sering hanya atas *outside-size* saja, seperti warna kulit, bentuk ketajaman mata, tekstur rambut, dan sebagainya yang tidak tertanding oleh perbedaan yang ada di dalamnya. Untuk itu hubungan antar etnis harus dipahami dan mendapat pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnis minoritas. Tidak ada budaya yang bebas dari persaingan dan perubahan. Konflik kelas, gender, generasi dan konflik lainnya, mewabah dalam semua masyarakat dan berusaha menemukan ekspresi budaya yang sesuai.

Fakta menunjukkan bahwa meluasnya konflik horisontal, antar suku, etnik, agama, yang berakar

dari adanya ketidakadilan sosial oleh para elite-elit politik, melanda Maluku Utara. Konflik yang melanda Maluku Utara adalah konflik yang memiliki dua dimensi yakni; *pertama* konflik horizontal antar etnik yang bernuansa "SARA", dan *kedua* konflik bernuansa politik yang bernama "Pilkada". Dimensi konflik yang melanda Maluku Utara adalah konflik yang bersifat destruktif, bentuk kehancuran pada semua sisi seperti tatanan sosial dan fisik (Susan, 2008:7)

Hasil penelitian Eli Karliani (2009:248), menyimpulkan bahwa konflik antaretnik sudah menjadi bukti bahwa ada hambatan dalam pembinaan masyarakat multikultural seperti sikap stereotif dan etnosentrisme dan fanatisme etnik atau agama. Fanatisme etnik yang sempit akan memberikan peluang terjadinya konflik karena sikap stereotif dari kelompok etnik yang berbeda. Sedangkan hasil penelitian Rajalao (2009:231), menguraikan bahwa pasca konflik etnik Maluku Utara masyarakat mengalami perubahan dari berbagai segi kehidupan yakni; segi sosial budaya, ekonomi, politik keamanan dan lain-lain. Nilai-nilai budaya yang telah menyatuhkan masyarakat selama bertahun-tahun mulai terkikis, sehingga ini menjadi ancaman serius terancamnya integrasi sosial masyarakat dan

bahkan mengancam integrasi nasional.

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, dapat peneliti rumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana pengembangan budaya demokrasi dalam relasi antar etnik siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ? Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, dapat peneliti jabarkan ke dalam sub-sub masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengembangan budaya demokrasi dalam pembentukan relasi antar etnis siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ?
2. Bagaimana relasi antar siswa yang berbeda etnik dalam pengembangan budaya demokrasi di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ?
3. Bagaimana upaya guru mengatasi hambatan pengembangan budaya demokrasi dalam relasi antar etnik siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ?
4. Bagaimana dampak pengembangan budaya demokrasi dalam pembentukan perilaku antar siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik ?

PEMBAHASAN

Budaya Demokrasi

Menurut pandangan Greetz (Sutrisno dan Putranto,2005:212), budaya adalah suatu dimensi yang aktif dan konsitutif dari kehidupan sosial dari pada sekedar mekanisme penjamin integrasi sosial. Almond dan Verba (Gafar,2006:99), menjelaskan bahwa budaya merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya antara budaya demokrasi dan politik ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan menurut Winataputra dan Budimansyah (2007:200), dalam *"The Advanced Learner's Dictionary of Current English"* (Hornby, dkk:261), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *"democracy"* adalah : (1) Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals"

Pengertian tersebut tampak pengertian bahwa kata demokrasi

merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahan yang mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakan *"rule of law"*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Relasi Antar Etnik

Menurut salah satu teori hubungan antar kelompok yakni 'the contact hypothesis', diasumsikan bahwa anggota kelompok yang berbeda bila melakukan interaksi satu sama lain akan mengurangi banyak prasangka antara mereka, dan menghasilkan sikap antar kelompok dan stereotip yang lebih positif (Manstead & Hewstone, 1995). Semakin banyak dan erat interaksi yang terjadi maka prasangka dan stereotip negatif akan semakin berkurang.

Menurut Kimlica (Karliani:209:53), bahwa hubungan antar etnik yang sering digandengkan dengan multikultural idealnya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak

universal yang melekat pada individu-individu maupun pada komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya.

Dalam *ethenic relations; A Cross-Culture Encyclopedia*, menggambarkan bahwa relasi antar etnik meliputi beberapa tema, yaitu asimilasi, orang-orang perahu, kolonialisme, pembersihan etnis, humor etnik, genosid, gipsy atau para pelancong di Eropa, kejahatan, hak asasi manusia, penduduk asli, minoritas, ras dan rasisme, pengungsi dan perbudakan, wisatawan, migrasi antar negara, xenophobia, dan lain-lain (Karliani, 2009:52).

Konflik

Teori Dahrendorf menyatakan konflik sebagai kegalauan yang bersumber dari ketidakserasian esensi bermacam komponen kehidupan. Kebalikannya adalah teori kohesi dari Malinowski: "Keutuhan akan terjadi bila satu wilayah kehidupan dilandasi secara kuat oleh keuntungan timbal balik 'reciprocity' dibawah prinsip-prinsip legal" (Tumanggor dkk, 2008:4). Webster (Pruitt dan Rubin, 2008:10) Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-

pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.

Komunikasi Antarbudaya

Menurut Ting-Tommey (1999; Rohim, 2009:52-53), menjelaskan komunikasi antarbudaya sebagai proses pertukaran simbolik dimana individu-individu dari dua (atau lebih) komunitas kultural yang berbeda menegosiasikan makna yang dipertukarkan dalam sebuah interaksi yang interaktif.

Edward T Hall (1959; Mulyana dan Rakhmat, 2005:6), "*Culture is communication*" dan "*communication is culture*" Keduanya bagaikan dua sisi dari satu mata uang; budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi juga menentukan, memelihara, mengembangkan, serta mewariskan budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Creswell (1998:15), di dasarkan tradisi metodologi penelitian dengan cara menyelidiki masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi

alamiah. Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif adalah kepedulian terhadap "makna". Karena itu, tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri orang yang unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia sebagai instrument (*key instrumen*). Keunggulan keunggulan manusia sebagai instrumen (*key instrumen*) dalam penelitian, karena alat ini dapat melihat, mendengar, membaca, merasa, dan sebagainya yang biasa dilakukan manusia umumnya.

Berdasarkan judul permasalahan yang diteliti, maka peneliti memilih menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena permasalahan yang diteliti terjadi pada tempat dan situasi tertentu. Menurut Nasution, (2008:27) Case study dapat dilakukan terhadap seseorang individu, kelompok individu, segolongan manusia, lingkungan hidup, manusia atau lembaga sosial.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif meliputi; meliputi studi wawancara mendalam, studi dokumentasi, studi literatur dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan (Miles dan Huberman: 1992:16-18).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Budaya Demokrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Ternate

Pengembangan budaya demokrasi dalam hubungan antaretnik melalui kegiatan pembelajaran di kelas dapat terlihat melalui tiga pengembangan kompetensi siswa yaitu; penguatan *civic knowledge* pada siswa, pengembangan *civic value*, dan *civic skills*. Penerapan pembelajaran yang dilaksanakan di SMA negeri 1 kota Ternate, yakni dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Hal ini dapat digambarkan suatu kondisi interaktif yang memunculkan berbagai sikap pro dan kontra serta suasana interaktif dan hubungan komunikatif yang baik antar siswa yang coba diterapkan di kelas.

Para siswa mereka dengan antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan para narasumber dengan segala keterbatasan mencoba menanggapi atau memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang disampaikan. Konsep yang dikembangkan di kelas salah satu adalah *group work* ini

diarahkan bagaimana partisipasi dan kerja sama dalam kelompok. Ketua kelompok memiliki peran membagikan tugas menjawab baik oleh anggota kelompoknya ataupun kepada peserta diskusi yang bisa memberikan jawabannya. Selain itu dalam pengembangan intelektual skill, dapat terlihat para siswa diarahkan untuk mengali masalah, menyimak hubungan sebab akibat

dan perbedaan/pertentangan pendapat mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang disajikan Dengan demikian, pengembangan aspek kompetensi siswa melalui pembelajaran dikelas sebagai upaya membiasakan atau membudayakan nilai-nilai demokrasi, dapat terlihat dalam berikut ini :

Tabel: 4.5 :
Proses Pengembangan Budaya Demokrasi Melalui Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Ternate

INPUT	PROSES	TUJUAN	OUTPUT
Siswa	<p>Aspek - aspek yang dikembangkan melalui interaksi belajar dikelas :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghargai kebebasan berpendapat, ▪ Partisipasi dan kerjasama antar kelompok. ▪ Bekerjasama dalam kelompok ▪ Pengembangan nilai-nilai toleransi umat beragama. ▪ Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengembangan pengetahuan siswa (Civic Knowledge) ❖ Pembentukan Karakter siswa (civic value). ❖ Ketrampilan siswa (civic skills) 	<ul style="list-style-type: none"> ➦ Pengembangan warga negara yang baik dan cerdas(Good and Smart Citizen) yang mengantarkan manusia menjadi insan berbudaya dan berkeadaban. ➦ Tumbuhnya sikap kritis, serta kemampuan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di kelas maupun dalam kegiatan ekstra kulikuler lainnya.

	bahasa dan agama. ▪ Sikap tidak saling curiga (prasangka) antar sesama		
--	---	--	--

Dari tabel di atas terlihat bahwa proses pengembangan *civic knowledge, civic value, dan civic skills* dalam kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kota Ternate, dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat diindikasikan dengan ditemukan sejumlah perilaku yang dapat ditunjukkan oleh siswa baik dalam kelas melalui pembelajaran maupun diluar sekolah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa realitas siswa SMA Negeri 1 Ternate, dalam pembelajaran PKn dikelas dapat menunjukkan sikap antara lain: *pertama*, menghargai perbedaan pendapat, *kedua*, partisipasi dan kerjasama antar kelompok, *ketiga*, menghargai dan menghormati teman-teman yang berbeda suku, bahasa dan agama.

Disamping itu pengembangan dikelas, proses pengembangan demokrasi diwujudkan dalam kegiatan di luar kelas. Hal ini terlihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Osis dan pihak sekolah (*eskul*), yang melibatkan seluruh siswa

terkecuali kelas XII. Bentuk kegiatan misalnya "latihan dasar kepemimpinan dan kegiatan kepramukaan. Sasaran dan tujuan adalah memberikan pembekalan dan penanaman nilai-nilai kepemimpinan, kedisiplinan, kesetiakawanan, toleransi dan kerjasama baik antar kelompok ataupun tim tanpa melihat perbedaan latar belakang etnik maupun agama.

Selain itu sejumlah nilai yang dikembangkan dalam pengembangan budaya demokrasi dalam hubungan antaretnik di SMA 1 Kota Ternate yaitu sikap saling memahami, menghormati, menghargai budaya orang lain, tidak saling curiga (prasangka), toleransi, dan semangat berinovatif dari siswa. Nilai-nilai ini dipertahankan dan dilestarikan, di SMA negeri 1 Kota Ternate pasca konflik, dalam membangun budaya belajar dan hubungan antar siswa yang dibangun atas dasar "*Torang Samua Basudara*" sehingga menjadikan interaksi dalam

hubungan antaretnik ini menjadi bermakna.

Gambaran dimensi ini sangat penting dalam kerangka pengembangan nilai-nilai budaya melalui *civic skill* atau kecakapan warganegara muda (siswa) melalui proses belajar di kelas maupun di luar kelas, dan menjadi acuan atau pedoman dalam kehidupan baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat luas. Selain itu pengembangan *civic disposition* atau watak warganegara, yang berpikir kritis dan kreatif diharapkan mampu mewujudkan karakter pribadi yang cerdas, bertanggung jawab dan dapat berinteraksi sosial antar sesama.

Dalam pembelajaran di sekolah, budaya demokrasi secara substantif dan pedagogis di desain untuk mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) untuk tingkat persekolahan sebagai sebuah strategi yang harus menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan di persekolahan. Strategi yang dimaksudkan adalah bagaimana meletakkan dasar dalam proses pembelajaran PKn yakni; *learning democracy, in democracy, and for democracy* sebagai suatu kontinum *education about citizenship-*

education through citizenship-education for citizenship yang secara kualitatif bergerak dari titik Minimal (*education about citizenship*) ke titik Maksimal (*education for citizenship*). Proses ini harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan terencana yang diprogramkan dalam perencanaan di sekolah, ketika ini terlaksana maka wujud sekolah sebagai laboratorium demokrasi dapat diimplementasikan.

Hubungan Antaretnik Dalam Pengembangan Budaya Demokrasi di SMA Negeri 1 kota Ternate.

Berkaitan dengan relasi antar siswa dalam pengembangan budaya demokrasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain: *pertama* faktor identitas, sebagai elemen utama dalam memperjuangkan kelompok etnik. *Kedua* faktor kultur yang dipengaruhi oleh latar belakang serta karakteristik individu dan kelompok yang berbeda-beda. Kedua faktor tersebut tidak hanya dimiliki oleh individu yang berbeda etnik tetapi menunjukkan pula keberagaman yang ada pada kelompok masing-masing etnik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Supardan (2009:1)

bahwa pemilikan identitas suatu kelompok etnik penting dalam kaitan dengan karakter suatu etnik dan budaya lokal tertentu, walaupun pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan primordial seperti *stereotype*, *ethnocentrisme*, dan sebagainya memang dapat menimbulkan perpecahan yang berbahaya. Prasangka muncul dalam interaksi sosial dimana terdapat minimal dua entitas yang berbeda. Entitas itu bisa setara ataupun berbeda baik dalam hal jumlah pendukung atau anggota maupun kekuasaan, perbedaan itu melahirkan adanya entitas yang mayoritas dan minoritas.

Kelompok etnik siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate, didominasi oleh kelompok urban etnik lokal. Etnik Ternate

bukanlah satu-satunya etnik mayoritas yang ada di sekolah ini. Hal ini terlihat jelas bahwa 37% siswa SMA Negeri 1 Kota Ternate berasal dari etnik Makian-Kayoa, sedangkan etnik Ternate berada di posisi kedua disusul etnik Tidore dan etnik pendatang lainnya misalnya etnik Cina, etnik Arab, etnik Jawa, etnik makasar dan masih banyak etnik lokal lain-lainnya yang mendiami wilayah Ternate sebelum konflik horizontal.

Untuk lebih memahami hubungan antar etnik dalam pengembangan budaya demokrasi di SMA Negeri 1 Kota Ternate, maka secara spesifik diuraikan perbedaan karakter siswa di SMA Negeri 1 kota Ternate seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.11:
Perbedaan Karakter Siswa antar Etnik di SMA Negeri 1 Ternate

Etnik	Karakter Umum yang Dimiliki	Bahasa yang digunakan sehari-hari	Agama
Ternate	Agamais, suka menolong, sopan santun, penyayang, terbuka, mudah beradaptasi, dan sedikit emosional.	Ternate Melayu pasar dan Indonesia	Islam
Tidore	Agamais, ulet, sedikit tertutup, kekeluargaan sangat kuat, dan emosional.	Tidore Melayu pasar dan Indonesia	Islam
Makian	Percaya diri, kekeluargaannya	Makian Melayu	Islam

	kuat, pekerja keras, dan berani.	pasar dan Indonesia	
Sanana	Kekeluargaan sangat kuat, emosional, pekerja keras, percaya diri, sedikit pamer dan berani.	Sanana Melayu pasar dan Indonesia	Islam
Bugis /Makasar	Muda beradaptasi, emosional, ulet dan pemberani.	Bugis Melayu pasar dan Indonesia	Islam
Manado/ Gorontalo	Pekerja keras, dan pemberani,	Gorontalo Melayu pasar dan Indonesia	Islam
Sumatra/ Padang	Pekerja keras, ramah, dan ulet	Padang Melayu pasar dan Indonesia	Islam
Jawa	Ulet, kerja keras, dan tegas	Jawa dan Melayu pasar Indonesia	Islam
Cina	Prinsip, Tertutup, sedikit bicara, dan kurang percaya diri.	Cina, Melayu pasar dan Indonesia	Kristen dan Budha

Dari tabel di atas terlihat bahwa SMA Negeri 1 Kota Ternate pasca konflik merupakan sekolah yang sangat multi etnik, multi kultur dan multi bahasa dan multilevel. Hal ini dapat dipertegas pada gambaran umum tentang keadaan siswa, dimana dari segi jumlah etnik pada tahun 2009/2010, terdapat kurang lebih 10- 15 etnik, baik etnik lokal maupun etnik pendatang.

Hambatan Pengembangan budaya demokrasi dalam relasi Antaretnik di SMA Negeri 1 Kota Ternate.

Terkait dengan hambatan dalam pengembangan budaya demokrasi pasca konflik Secara

spesifik hambatan dalam pengembangan budaya demokrasi di SMA Negeri 1 Kota Ternate dalam konteks pembelajaran PKn, dapat terlihat dalam hal- hal berikut:

1. Pembelajaran PKn masih bersifat konvensional, dan monolitik.
2. Keterbatasan dalam memperoleh dan mengakses informasi, sehingga pembelajaran masih bersifat *teks books*
3. Belum berkembangnya daya berkreaitivitas dan berinovasi dalam pembelajaran walaupun media pembelajaran dan sumber pendukung tersedia,

tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam mewujudkan sekolah sebagai labolaturium demokrasi atau wahana pengembangan warga negara yang demokratis, maka siswa harus terbiasa dengan kehidupan yang demokratis baik dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas harus menggambarkan suasana demokrasi. Pendapat ini sejalan dengan pandangan (Winataputra, 2008:7.24) bahwa untuk membangun warga negara (siswa) yang demokratis, sekolah harus menjadi bagian integral dalam pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan kepada siswa. Upaya ini

dimaksudkan agar sekolah menjadi komunitas yang berintikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta keharmonisan, keadilan dan berkeadaban. Hal ini dapat terwujud apabila setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik, sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahamana para siswa.

Hambatan di atas secara keseluruhan pengembangan budaya demokrasi di sekolah, terdapat sejumlah tantangan, ancaman, dan peluang, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12:
Pengembangan Budaya Demokrasi dalam Relasi Antaretnik di SMA Negeri 1 Ternate

HAMBATAN	TANTANGAN	ANCAMAN	PELUANG
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terdapat homogenitas ▪ Belum terbangun keterbukaan antar komunitas ▪ Belum terbangun modal sosial siswa dan guru ▪ Kurangnya kesadaran perbedaan kultur di kalangan siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor latar belaknag ekonomi orang tua ▪ Faktor budaya masyarakat ▪ Adanya dikotomi pembelajaran PKn dan mata pelajaran lainnya. ▪ Mencari model pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikap apatis terhadap mata pelajaran PKn ▪ Akar konflik yang belum terselesaikan ▪ Streetipe dan prasangka ▪ Etnosentrisme 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangunnya modal sosial ▪ Kohesi sosial ▪ Tumbuhnya kebersamaan antar komunitas ▪ Kemampuan berinteraksi dan beradaptasi

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terbangun rasa percaya diri pada siswa. ▪ Alokasi waktu untuk mata pelajaran PKn terlalu singkat. ▪ PKn dianggap mata pelajaran yang muda 	<p>demokrasi perspektif budaya (integratif)</p>	<p>dengan lingkungan mulai terbangun.</p>
---	---	---

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa, terdapat sejumlah hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, yang berasal dari dalam maupun dari luar sekolah itu sendiri. Terkait dengan efektifitas waktu yang diberikan untuk mata pelajaran PKn dalam seminggu hanya dua jam pelajaran, ini sangat jelas tidak memberikan efek yang sangat positif dalam pembelajaran. Jika didasarkan pada hasil penelitian Fuller (Suryadi,2009:156), berkesimpulan bahwa lamannya pengajaran memberikan efek yang sangat positif terhadap prestasi belajar. Suasana sekolah perlu diciptakan sedemikian rupa agar menciptakan dan memotivasi bagi guru dan siswa untuk belajar (sendiri atau bersama-sama) di sekoah.

Upaya guru dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan budaya demokrasi di SMA negeri 1 kota Ternate dilaksanakan secara berkesinambungan dan

bekerjasama dengan semua guru dalam upaya *cross cultural*. Hal ini dimaksudkan agar semua pembelajaran harus terintegrasi dengan nilai-nilai budaya demokrasi sebagai wujud dan komitmen kolektif dalam pengembangan budaya dan nilai-nilai demokrasi di persekolahan.

Dampak Pengembangan Budaya Demokrasi dalam Pembentukan Prilaku Antaretnik di SMA Negeri 1 Kota Ternate.

Terkait dengan dampak pengembangan budaya demokrasi dalam pembentukan prilaku antar etnik siswa di sma negeri 1 kota ternate berberdampak langsung pada proses interaksi belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Kondisi ini jelas terlihat dalam berinteraksi dimana telah terjadi pergeseran baik dalam prilaku maupun tindakan, antar etnik yang ditujukan adanya sinergi antara sikap yang mau dan menerima perubahan dalam diri

siswa. Sikap positif yang ditunjukkan dalam keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun Osis.

Dampak pengembangan demokrasi di sekolah dalam hubungan antretnik di sekolah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12:
Dampak Pengembangan Budaya Demokrasi dalam Pembentukan Prilaku Antaretnik Siswa di SMA Negeri 1 kota Ternate

Dampak dalam pembejaran di dalam dan luar kelas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tumbuh sikap menghargai perbedaan pendapat ▪ Partipasi dan kerjasama dalam kelompok ▪ Pembinaan mental generasi muda ▪ Sikap keingin tahaun mempelajari budaya etnik lain. ▪ Toleransi antar umat beragama. ▪ Sikap dimana bumi dipijak langit dijunjung, diterapkan oleh etnik pendatang. ▪ Menghargai keberagaman terhadap sesame, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat ▪ Aktif dan selalu terlibat dalam kegiatan aksi sosial lewat kegiatan OSIS, Pramuka dll. ▪ Tumbuhnya kebersamaan antar komunitas..

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa di SMA negeri 1 kota Ternate, dampak pengembangan budaya demokrasi dalam pembentukan prilaku antar etnik pasca konflik, dapat membawah perubahan yakni, tumbuh sikap menghargai perbedaan pendapat, partipasi dan kerjasama dalam kelompok, sikap keingintahuan mempelajari budaya etnik lain, dan terbinanya toleransi antar umat beragama.

Dalam membangun interaksi yang bermakna dalam kelas yang multi etnik maka dorongan rasa dan emos semangat etnik harus dihindari. Percikan rasa solidaritas etnis biasanya muncul dan terasa berkembang sebagai sistem nilai, sikap, kepercayaan dan aksi, apabila suatu kelompok etnik berhubungan dengan etnik lain. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif terkait dengan hubungan sosial

antara perbedaan kultural dari anggota kelompok dengan membangun suatu interaksi yang tepat secara minimal. Terkait dengan hal ini, maka pengembangan budaya demokrasi dipersekolahan jangan dipandang sebagai entitas yang statis akan tetapi merupakan entitas yang sangat dinamis sehingga ketika menggunakan analisis terhadap konsep maupun kontennya harus dinamis.

Dalam menghindari adanya pergeseran dan pembusukan nilai-nilai demokrasi, Sekolah memiliki peranan strategis dalam memberikan penanaman dan pembudayaan nilai-nilai demokrasi. Sapriya (2004;Wuryana dan Syaifullah, 2008: 94), menegaskan bahwa pendidikan demokrasi harus diupayakan melalui proses pembelajaran, baik melalui pendidikan di sekolah (*school basic civic education*) maupun pendidikan dilingkungan masyarakat (*community-based-school civic education*).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum bahwa, pengembangan budaya

demokrasi dalam proses pembelajaran di kelas, dapat berjalan dengan baik. Meskipun siswa SMA Negeri 1 Kota Ternate sangat multi etnik, tetapi mereka dapat saling bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi terhadap keberagaman. Keberagaman yang dimiliki oleh siswa, dapat mewakili keberagaman diantara etnik pada kelompok masing-masing. Hal ini jelas penegasannya, bahwa keberagaman disatu sisi dapat membawa manfaat positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya bangsa, disisi lain, keberagaman tersebut dapat mendorong terjadinya pertentangan di kalangan siswa yang multi etnik.

Terkait dengan pengembangan relasi antar siswa berbeda etnik di SMA Negeri 1 kota Ternate, yang diikat dengan semangat "maku gawene (saling menyayangi)" diperlukan kesadaran akan pentingnya keberagaman multi etnik dalam bingkai nilai-nilai kearifan lokal *Maloku Kie Raha*. Konflik yang melanda Maluku Utara telah merusak sendi-sendi bangunan kerukunan dan merobohkan dan memecahkan tembok perdamaian yang telah dibangun ratusan tahun lalu oleh para leluhur di

negeri ini. Perbedaan etnik, agama, bahasa, adat istiadat seharusnya menjadi modal sosial untuk membangun bangsa dan negara. Perbedaan secara kultural dalam konteks hubungan antar etnik dapat dihindari sebagai pemicu prasangka dan konflik, sebaliknya harus mendorong perubahan pada dinamika masyarakat kota Ternate dan pihak sekolah ke arah yang lebih baik. Perbedaan-perbedaan secara kultural, yang dimiliki oleh masing-masing etnik di kota Ternate harus dapat terbangun modal dan kohesi sosial yang dimiliki diharapkan dapat menjawab tantangan pengembangan budaya demokrasi pasca konflik.

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Proses pengembangan budaya demokrasi dalam hubungan antaretnik melalui pembelajaran di kelas yang interaktif relatif baik, antara lain terbangun sikap menghargai nilai-nilai perbedaan, partisipasi dan kerjasama antar kelompok, memahami dan menghargai budaya orang lain, toleransi, dan tidak saling curiga (prasangka). Adanya perlakuan yang sama yaitu sejak masuk

sekolah, belajar, sampai lulus, dan memperoleh hak-hak yang patut diberikan, tanpa ada diskriminasi. Proses ini terbangun atas dasar "torang samua basudara" yang dibingkai oleh nilai-nilai kearifan sehingga menjadi bermakna untuk dipertahankan dan dilestarikan.

Kedua, Hubungan antaretnik dalam pengembangan budaya demokrasi di SMA Negeri 1 Kota Ternate, dapat dipengaruhi oleh: a), faktor identitas dan kultur yang dimiliki masing-masing etnik, b). faktor kesadaran nilai kearifan lokal (Marimoi Ngone Futuru) yang dapat mempersatukan kelompok etnik yang berbeda, c). faktor rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, d). faktor hubungan kekerabatan yang diikat dengan semboyan "Torang Samua Basudara".

Ketiga, Hambatan dalam pengembangan budaya demokrasi dalam hubungan antaretnik di SMA Negeri 1 Kota Ternate, secara spesifik dalam konteks pembelajaran PKn antara lain: *pertama*, pembelajaran masih bersifat konvensional, dan monolitik. *Kedua*, keterbatasan memperoleh dan mengakses informasi, sehingga pembelajaran masih bersifat *teksbooks*. *Ketiga*, belum berkembangnya daya

berkreativitas dan inovasi secara maksimal. Selain itu hambatan, tantangan, ancaman, yang berasal dari luar sekolah juga berimbas ke sekolah akibat konflik politik dan konflik horizontal.

Keempat, Dampak pengembangan budaya demokrasi dalam pembentukan perilaku antar etnik siswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate antara lain; tumbuhnya sikap menghargai perbedaan, Partisipasi dan kerjasama dalam kelompok, sikap mau mempelajari budaya etnik lain, toleransi antara perbedaan agama, sikap dimana bumi dipijak langit dijunjung dan selalu aktif terlibat kegiatan sosial serta terciptanya rekonsiliasi abadi di Kota Ternate pada umumnya.

Rekomendasi

Merujuk kepada kesimpulan penelitian, direkomendasikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, agar dapat meningkatkan SDM, terutama guru-guru PKn dan memfasilitasi sekolah melalui kegiatan workshop, guna

mencari formula yang tepat dalam mengembangkan model-model serta metode pembelajaran budaya berbasis demokrasi.

2. Ditujukan kepada kepala SMA Negeri 1 Kota Ternate, agar merumuskan kembali bersama guru dan stekholder lainnya, yakni memasukan pembelajaran budaya berbasis demokratis antar etnik siswa pasca konflik kedalam kurikulum lokal, dengan tujuan untuk mengembangkan *civic intelegensi*, pengetahuan *civic responsiblity*, *civic participation*, dan pembentukar *character and bulding* siswa.
3. Kepada Guru PKn, sebagai penanggung jawab dalam mengembangkan pembelajaran budaya berbasis demokrasi antar etnik siswa pasca konflik, diharapkan dapat mencari format dalam mengembangkan model, dan melakukan uji coba atau praktik sebagai upaya-upaya konkrit untuk menjadikan sekolah sebagai labolaturium demokrasi.
4. Untuk peneliti berikutnya, agar dapat memperdalam kajian lebih lanjut terkait

dengan pengembangan model-model atau pengembangan desain dalam pembelajaran budaya berbasis demokrasi dalam relasi siswa multietnik pasca konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Fukuyama, F. (2007). *The End of History and The Last Man*. Yogyakarta: Qalam
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatra, S.AA dan Said DZ. M (2009). *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung Pustaka Setia.
- Giddens, A. Ed. (2009). *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan Masa Depan Politik Rasikal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kerr, D. (2009). *Citizenship Education: an International Comparison*, London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Miles, M.B. & Huberman, A. (1992). *Qualitative Data Analysis*. Alih Bahasa Tjejep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution. (2008). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pruit, G. Dean & Rubin, Z. Jeffrey. (2004). *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohim, Syaiful. H. (2009). *Teori Komunikasi; Perspektif Ragam dan Aplikasi*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Suryadi, Ace dan Budimansyah, D. (2009).
- Susan, Novri. (2008). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*: Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno & Putranto. (2008). *Teori–Teori Kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Winataputra, U.S (2008). *Pembelajaran PKn di SD*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wuryana, S. & Syaifullah. (2006). *Ilmu Kewarganegaraan (Civic)*: Bandung: UPI Labolaturium PKN.

- Winataputra dan Budimansyah. (2007). *Civic Education, Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung, Program studi Pendidikan Kewarganegaraan, SPs UPI Bandung.
- Supardan, Dadang. (2008). *Peluang Pendidikan dan Hubungan Antar Etnik: Perspektif pendidikan kritis-Poskolonialis*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan volume 2. N0.1 (2008).
- Karliani, Eli. (2009). *Pembinaan Masyarakat Multikultur dalam Meningkatkan Integrasi Bangsa, (Studi Kasus Hubungan Antar Etnik Di Kota Palangka Raya)*, Tesis Magister pada program pendidikan kewarganegaraan, UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Rajaloo, I.Nani. (2009) *Pergeseran Nilai Masyarakat Pasca Konflik Etnik Di Maluku Utara Implikasi Pada Integrasi Nasional (Studi Kasus di Kota Ternate)* Tesis Magister pada program pendidikan kewarganegaraan UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Supardan, D. (2004). *Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendidikan Multikultur dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional dan Global untuk Integrasi Bangsa*. Disertasi Doktor pada Program Pendidikan Sejarah UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Tumanggor *et al.* (2006). Hasil penelitian : *Dinamika Konflik Etnik Dan Agama Di Lima Wilayah Konflik Indonesia:*
- Winataputra, (2005), Makalah "Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun masyarakat demokratis dan berkeadaban (Tinjauan filosofis-pedagogis)", Seminar dan Lokakarya Dosen Pendidikan Kewarganegaraan PTN dan PTS, Ditjen Dikti, untuk Wilayah Indonesian Barat Tanggal 22 September 2005. di Hotel Dharma Deli, Medan).

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENTAS PEDALANGAN WAYANG KULIT DI KOTA SURAKARTA

Rizka Amalia, Muhtarom

PPKn, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

Alamat email: m_muhtarom@yahoo.co.id

Abstract. *The objectives of this research are to investigate: how the revitalization of Pancasila values is implemented through the leather puppet performances in Surakarta City; and what factors inhibit the revitalization of Pancasila values through the leather puppet performances in Surakarta City. The implementation of the revitalization of Pancasila values through leather puppet performances in Surakarta City is done by creating new plays with Pancasila themes and integrating the Pancasila values to wejangan, gara-gara, janturan, ginem, and pitutur scenes. The factors inhibiting are on language, the diminishing number of the young, the expensive costs, the exclusion of the Pancasila values in the puppet storylines.*

KATA KUNCI : Revitalisasi Pancasila, Wayang kulit

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan lima dasar atau lima asas berdirinya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai Idiologi bangsa, budaya bangsa, kepribadian bangsa, dan tentunya yang juga sangat mendasar yakni Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yang memuat kalimat:

".....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lebih lanjut Effendy (1993: 37) menjelaskan bahwa “Sebagai dasar negara Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*Staats Fundamental Norm*) yang mempunyai kedudukan istimewa, tetap dan kuat karena tidak dapat diubah dengan jalan hukum oleh siapapun”.

Pancasila sebagai dasar negara, Ideologi, budaya, serta kepribadian bangsa tentunya mempunyai nilai dan norma. Nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila merupakan keinginan dari bangsa Indonesia yang harus di amalkan. Pengamalan Pancasila secara subjektif akan memperkuat pengamalan Pancasila secara objektif. Pengamalan Pancasila ini harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia agar Pancasila benar-benar berperan sebagaimana fungsi dan kedudukannya dan supaya tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia mudah terwujud.

Setiyo (2010: 84) mengatakan bahwa “Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan hal-hal

pokok kenegaraan disamping penyelenggaraan negara, semuanya harus sesuai dan dapat diatur berdasarkan Pancasila...”

Namun pada saat ini, nilai-nilai luhur Pancasila tersebut mulai memudar. Memudar dalam artian tidak lagi dijadikan sebagai pedoman utama oleh warga negara Indonesia. Memudarnya Pancasila di mata dan hati rakyat sendiri telah berakibat jelas: Indonesia kehilangan orientasi yang berujung pada keterpurukan bangsa secara kolektif. Indonesia kehilangan penuntun, kehilangan motif, dan bahkan kehilangan harapan. Dan tanpa harapan, tidak akan pernah ada masyarakat yang bisa menjadi besar, tidak akan pernah ada bangsa yang menjadi besar.

Pancasila harus kembali dibudayakan dan diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia, sehingga dapat kembali memahami dan mengamalkannya dalam pelaksanaan pembangunan dan proses politik, sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi. Dalam pandangan Yudi Latif (2011: 41), “proses radikalasi ini dimaksudkan untuk membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam kehidupan dan ketatanegaraan, sanggup memenuhi kebutuhan praktis

atau pragmatis dan bersifat fungsional". Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten oleh setiap komponen bangsa dalam kehidupan empirik merupakan hal mendesak untuk segera dilakukan. Mulai dari rakyat jelata hingga penyelenggara negara hendaknya memiliki prinsip; dalam segala tindakan, perbuatan dan kebijakan harus sesuai dengan roh Pancasila.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2011 dijelaskan secara lengkap mulai dari pengertian, tujuan, sasaran, siapa yang berhak mengawasi, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila tidak terlepas dari adanya sosialisasi Pancasila. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia juga sempat mengeluarkan kebijakan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana Pancasila juga termasuk didalamnya. Namun beberapa waktu lalu kebijakan empat pilar tersebut telah dicabut sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum tetap.

Dasim Budimasnyah (2009: 19-21) menjelaskan bahwa "terdapat tiga jalur pendekatan pengembangan dalam pelaksanaan sosialisasi Pancasila, yaitu melalui pengembangan pendidikan pembelajaran (*psycho-paedagogic development*), pengembangan sosial budaya (*socio-cultural development*), dan pengembangan melalui kekuasaan (*socio-political intervention*)".

Dari beberapa pendekatan pengembangan diatas, jalur pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini yakni melalui jalur pengembangan sosial budaya (*socio-cultural development*), karena wayang kulit merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang masih digemari di Indonesia. Pandam Guritno

(1988: 29) menjelaskan bahwa, dari semua jenis wayang yang terdapat di Indonesia, sejak dahulu kala wayang purwa adalah yang paling tenar, atau yang lebih dikenal dengan istilah wayang kulit. Wayang kulit merupakan kebudayaan yang sangat di gemari di daerah Surakarta dan Yogyakarta.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pentas pedalangan wayang kulit serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada bidang studi yang sesuai dengan penelitian ini, khususnya mengenai revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, hal ini dimaksudkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak menggambarkan angka atau jumlah pengukuran atau jumlah yang memiliki perbandingan. Akan tetapi, merupakan

keterangan, konsep dan tanggapan yang berhubungan dengan objek yaitu deskripsi mengenai revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pentas pedalangan wayang kulit di kota Surakarta serta faktor penghambat pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga atau yang lainnya) yang berdasarkan fakta.

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang bermanfaat untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Budaya Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih Taman Budaya Jawa Tengah karena tempat ini sering digunakan untuk pagelaran berbagai macam kesenain, termasuk wayang kulit. Selain melakukan penelitian di Taman Budaya Jawa Tengah, peneliti juga melakukan penelitian di sekitar Surakarta yang juga mengadakan pagelaran wayang kulit. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 yang dimulai dari tahap pengajuan judul, penyusunan proposal, ijin

penelitian, pengumpulan data, analisa data sampai pada penyusunan laporan.

Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel dengan memilih Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah yang membidangi pendidikan budi pekerti, pakar atau peneliti tentang Pancasila, dalang yang berpengaruh di Kota Surakarta, dosen jurusan pedalangan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, serta masyarakat umum sebagai penikmat wayang yang sekiranya dapat dipercaya dan dapat memberikan info yang akurat mengenai masalah yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit serta faktor penghambat pelaksanaannya di Kota Surakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah yang membidangi pendidikan budi pekerti, pakar atau peneliti tentang Pancasila, dalang yang

berpengaruh di Kota Surakarta, dosen jurusan pedalangan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, serta masyarakat umum sebagai penikmat wayang. Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan pagelaran wayang kulit. Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Dilakukan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Guna memperoleh validitas data digunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan

data harus menggunakan beragam data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. Sumber data yang digunakan adalah informan Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah yang membidangi pendidikan budi pekerti, pakar atau peneliti tentang Pancasila, dalang yang berpengaruh di Kota Surakarta, dosen jurusan pedalangan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, serta masyarakat umum sebagai penikmat wayang.

Teknik analisis data dalam bahasan ini menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah yaitu: tahap penyusunan proposal dan ijin penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis data awal, tahap analisis data akhir dan tahap penyusunan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pentas pedalangan wayang kulit di Kota Surakarta.

Dalam permasalahan ini, penulis akan mengkaji dua hal, yakni pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit dan faktor penghambat dalam merevitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pentas pedalangan wayang kulit di kota Surakarta.

Pancasila pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI pertama yang selanjutnya dibahas oleh Panitia Kecil atau Panitia 9 dan menghasilkan rumusan Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar. Sejak saat itu Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai sumber segala sumber hukum, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, mengandung norma-norma yang harus ditaati penyelenggara negara, dan lain-lain.

Selain termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai Dasar negara juga termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: "Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pancasila di Kota Surakarta sendiri terbilang masih diutamakan. Hal ini terlihat dari diadakannya pagelaran wayang kulit yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Namun salah satu hal yang disayangkan dari pagelaran tersebut yakni alur ceritanya tidak berhubungan dengan Pancasila. Jadi dalam diberi kebebasan untuk menentukan alur ceritanya sendiri.

Sedangkan untuk pengamalan Pancasila sendiri di Kota Surakarta bisa dikatakan mengalami kemunduran. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus-kasus sosial yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik. Pancasila bisa dibilang sebagai visi untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Tanpa ada visi, Indonesia bisa saja kehilangan arah sehingga timbul gejolak dan persoalan diantara anak bangsa.

Kondisi ini tentunya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kaelan (1998:60) dalam :

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta

kaidah baik secara normal maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun atau Undang-Undang Dasar, maupun yang tidak tertulis secara konvensional. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Pancasila yang seharusnya menjiwai dan menjadi asas kerohanian masyarakat, tidak lagi dipergunakan. Padahal Pancasila merupakan Dasar negara yang menjadi sumber hukum dan nilai dalam melangsungkan kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pengamalan Pancasila di Kota Surakarta saat ini tidak lagi intensif karena Pancasila tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengembalikan Pancasila menjadi suatu hal yang diutamakan, dibudayakan serta diamalkan kembali oleh masyarakat harus diadakan revitalisasi. Revitalisasi yakni yaitu sebuah proses untuk menghidupkan kembali segala sesuatu yang awalnya terpinggirkan atau mulai pudar menjadi suatu hal yang dianggap penting kembali. Atau dengan

pengertian lain yaitu menghidupkan kembali sesuatu yang pernah mengalami kemunduran.

Pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dirasa sangat perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Salah satu cara yang pernah digagas oleh MPR untuk menghidupkan Pancasila kembali yakni menggunakan media wayang kulit. Hal ini wajar saja karena wayang kulit merupakan salah satu seni kebudayaan tradisional yang sampai saat ini masih digemari masyarakat banyak terutama di Kota Surakarta yang menjadi pusat budaya Jawa. Sujamto (1992: 18-19) menyatakan bahwa "wayang tidak hanya sebagai tontonan semata namun juga digunakan sebagai tuntunan. Sebagai tuntunan, wayang digunakan sebagai media komunikasi, peyuluhan dan juga media pendidikan".

Sehubungan dengan hal tersebut, Dasim Budimansyah (2009: 19-21) mengatakan bahwa "terdapat tiga jalur

pendekatan pengembangan dalam pelaksanaan sosialisasi Pancasila, yaitu melalui pengembangan pendidikan pembelajaran (*psycho-paedagogic development*), pengembangan sosial budaya (*socio-cultural development*), pengembangan melalui kekuasaan (*socio-political intervention*)".

Berdasarkan pernyataan di atas wayang kulit masuk kedalam kategori sosial budaya (*socio-cultural*). Wayang kulit merupakan salah satu jenis kebudayaan yang masih berkembang, khususnya di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan melalui:

- a. Membuat lakon-lakon baru yang bertemakan Pancasila. Hal ini pernah dilakukan semasa kepemimpinan Soeharto yang mana lakon tersebut di beri nama Semar Mbabar Jati Dhiri. Ia merupakan dewa asli Jawa yang paling berkuasa. Meskipun berpenampilan sederhana, sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai abdi, Semar adalah seorang dewa yang mengatasi semua dewa. Ia adalah dewa yang menjelma menjadi manusia yang kemudian menjadi

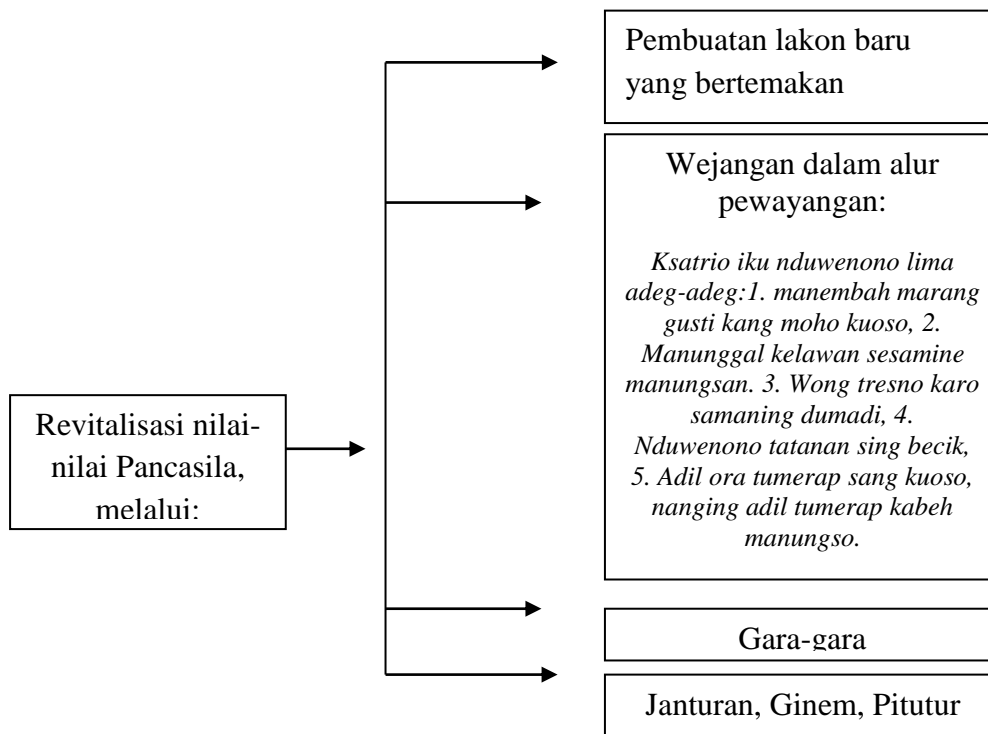
pamong para Pandawa dan ksatria utama lainnya yang tidak terkalahkan. Ia merupakan pribadi yang bernilai paling bijaksana berkat sikap bathinnya dan bukan karena sikap lahir dan keterdidikannya. Oleh sebab hal ini lah Semar dijadikan lakon utama karena sifatnya yang mendekati sempurna. Setelah membuat lakon baru kemudian di letakkan dalam wadah seni yang komunikatif.

- b. Dimasukkan kedalam alur cerita pewayangan pada saat wejangan. Contoh wejangan Semar kepada para ksatria. Semar menyampaikan: *Ksatrio iku nduwenono lima adeg-adeg:1. manembah marang gusti kang moho kuoso, 2. Manunggal kelawan sesamine manungsan. 3. Wong tresno karo samaning dumadi, 4. Nduwenono tatanan sing becik, 5. Adil ora tumerap sang kuoso, nanging adil tumerap kabeh manungso.* Dari pernyataan ini sudah dapat diartikan bahwa kelima hal tersebut merupakan kiasan dari Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ke lima.
- c. Dimasukkan kedalam bagian gara-gara. Gara-gara adalah bagian atau babak dalam

pagelaran wayang dimana dalang menceritakan tentang keadaan dunia yang dilanda bencana besar menimpa bumi seperti gunung meletus, gempa bumi, bahkan sampai korupsi yang merajalela. Setelah itu ditampilkan adegan yang santai, lepas dari ketegangan alur cerita. Tokoh yang muncul adalah para punakawan dan ksatria muda.

- d. Dimasukkan kedalam bagian alur janturan, ginem atau juga lewat pitutur. Janturan adalah sebuah orasi seorang dalang yang ingin menjelaskan tentang apa yang disajikan pada pakelirannya. Ginem adalah dialog antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dalam seni pertunjukkan wayang purwa Jawa. Ginem dalam pewayangan harus terucap jelas agar para penonton serta pendengar bisa mengerti dengan mudah dan memahaminya, sehingga pesan-pesan yang bersifat mendidik akan mudah diterima oleh masyarakat.

Pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1.
Skema Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Wayang Kulit

Nilai-nilai Pancasila juga diwujudkan kedalam bentuk pendidikan budi pekerti. Budi pekerti yang luhur bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu pengamalan nilai-nilai Pancasila juga terwujud dalam pengamalan budi pekerti. Berdasarkan temuan penelitian, budi pekerti telah ada sejak sekolah tersebut berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya moral para pelajar di Kota Surakarta itu luhur. Namun kenyataan ya berbeda, pelajar SMP saat ini sudah banyak yang

merokok, mengendarai motor tanpa mempunyai SIM, termasuk banyak pelajar yang pacaran di dalam sekolah, padahal Pancasila pun sudah dimasukkan ke dalam mata pelajaran khusus sejak tahun 2012.

Nilai-nilai Pancasila yang menyatu dengan pendidikan budi pekerti bisa dilaksanakan dengan beberapa kegiatan berikut:

- a. Diintegrasikan kedalam mata pelajaran. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, apabila siswa

hendak mengutip sebuah kalimat harus dicantumkan siapa penulisnya. Hal ini mencerminkan Pancasila sila ke-2. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler membentuk kepribadian siswa agar berhubungan baik dengan sesama, bertoleransi, menghargai perbedaan masing-masing individu. Hal ini mencerminkan Pancasila sila ke-5.

- b. Diajarkan dalam diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan ini tidak hanya ditujukan untuk siswa namun juga untuk para guru. Diklat ini rutin dilakukan pada awal tahun ajaran baru. Diklat kepemimpinan mempunyai tujuan supaya guru dan siswa mempunyai bakal untuk menjadi pemimpin yang baik, jujur, amanah, dan sebagainya. Kegiatan ini mencerminkan Pancasila ke-3 dan ke-4.
- c. Kegiatan pesantren kilat. Kegiatan ini biasanya diadakan pada saat bulan Ramadhan. Pesantren kilat ini mendorong siswa supaya lebih giat beribadah sehingga bisa meningkatkan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini

mencerminkan Pancasila sila ke-1.

Dalam pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit tidak terlepas dari adanya suatu hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pentas pedalangan wayang kulit mengalami beberapa hambatan yaitu:

- a. Penggunaan bahasa. Bahasa dalam pewayangan kebanyakan menggunakan bahasa jawa kuno. Hal ini mengakibatkan kesulitan pencernaan makna untuk para penonton, khususnya anak muda.
- b. Segmen penggemar wayang kulit terbatas. Wayang kulit cenderung digemari oleh para orangtua meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak pemuda yang juga turut serta menggemari wayang.
- c. Hambatan dari seni itu sendiri. Bisa kita lihat saat ini bahwa anak muda sudah antipati dengan seni. Padahal yang akan melanjutkan seni budaya setelah semuanya lanjut usia adalah anak muda. Anak muda saat ini lebih cenderung menyukai

budaya yang kebarat-baratan. Perbandingannya sangat jauh antara pemuda yang mencintai seni lokal dengan seni dari luar.

- d. Biaya pementasan. Biaya pementasan wayang terbilang cukup mahal karena dalam satu malam pementasan wayang kulit bisa menghabiskan dana sekitar dua puluh juta rupiah.
- e. Dalang tidak memasukkan unsur-unsur Pancasila dalam alur ceritanya. Hal ini bisa disebabkan karena dalang yang kurang paham dengan Pancasila itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila tergantung pada kepintaran Dalang dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila, ajaran moral serta kemauan dari penonton untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran moral yang telah disampaikan oleh Dalang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian di lapangan dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan

dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membuat lakon baru yang bertemakan Pancasila.
 - b. Dimasukkan kedalam alur cerita pewayangan pada saat wejangan.
 - c. Dimasukkan kedalam bagian gara-gara
 - d. Dimasukkan kedalam bagian alur janturan, ginem atau juga lewat pitutur.
2. Pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Diintegrasikan kedalam mata pelajaran dan ekstrakurikuler
 - b. Diajarkan dalam diklat kepemimpinan
 - c. Kegiatan pesantren kilat
3. Faktor penghambat pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui wayang kulit:
 - a. Penggunaan bahasa kawi sehingga membuat penonton kurang bisa

- menerima dengan utuh apa yang disampaikan oleh dalang.
- b. Segmen penggemar wayang kulit terbatas.
 - c. Kurang didukung oleh pelaku seni generasi muda.
 - d. Biaya pementasan yang cenderung mahal.
 - e. Tidak semua dalang memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam alur pewayangan.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, adapun saran yang diberikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta
Pemerintah Kota Surakarta hendaknya lebih memperhatikan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contohnya dengan mengadakan pentas pedalangan wayang kulit yang

bertemakan Pancasila secara rutin pada hari lahir Pancasila, mengadakan cerdas cermat bertemakan Pancasila dan juga mengadakan kegiatan pengembangan diri untuk mengamalkan budi pekerti luhur.

2. Bagi dalang di Kota Surakarta
Hendaknya para dalang lebih memahami Pancasila supaya mampu menyisipkan nilai-nilai Pancasila tiap kali mengadakan pementasan untuk mengajak penonton kepada hal-hal yang baik dan menyampaikannya secara lugas agar penonton mampu menerima pesan-pesan nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Bagi Masyarakat Kota Surakarta
Diharapkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar masalah-masalah sosial tidak makin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Budimansyah, Dasim. (2009). *Membangun Karakter Bangsa Di Tengah Arus Globalisasi Dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*.
Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar

- Prof. Dr. Dasim
Budimansyah, M.Si
- Effendy. (1993). *Falsafah Negara Pancasila*. Semarang: Duta Grafika
- Latif, Yudi. (2011). *Negara paripurna*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Guritno,P. (1988). *Wayang, Kebudayaan Indonesia dan Pancasila*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kaelan. (1998). *Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif ke-Indonesiaan*. Yogyakarta: UGM Press
- Setijo, Pandji. (2010). *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: PT Gramedia
- Sujamto. (1992). *Wayang dan budaya jawa*. Semarang: Dahara Prize

**PERBEDAAN HASIL BELAJAR KOGNITIF ANTARA
MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DENGAN
MODEL PEMBELAJARAN YURISPRUDENSI
(Studi Eksperimen pada Siswa Kelas X IPA 3 dan X IPA 4
SMA N 1 Geger Madiun Tahun 2013/2014)**

Agus Prasetyo, Winarno
Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta
Alamat e-mail : winarno_uns@yahoo.co.id

Abstract. *Based on the results of this research, it can be concluded that there is significant differences of cognitive learning outcome between contextual teaching learning model and jurisprudential inquiry model of learning materials for comprehension of judicial and legal system in Indonesia. The differences of student learning outcome using t-test comparative analysis technique at significance level (α) 1% by the results of $t_{value} = 3,43$ more than $t_{table (0,01; 60)} = 2,660$ ($t_{value} > t_{table}$). The conclusion, H_0 is rejected and H_a is accepted, then there are significant differences of variable in the research. Average cognitive learning outcome with contextual teaching learning model = 67,58 more than average cognitive learning outcome with jurisprudential inquiry model = 54,85. The factors which cause differences of cognitive learning outcome include: 1) syntax of learning model; 2) learning design (RPP); 3) competence or learning materials; 4) assessment instrument.*

Kata Kunci: Hasil Belajar Kognitif, Model *Contextual Teaching Learning (CTL)*, Model *Jurisprudential Inquiry*

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah dasar negara (*staat fundamental norm*). Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengandung pokok pikiran dasar dan tujuan negara. Salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah memiliki

kewajiban dasar untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pendidikan (*education*) secara umum berarti proses mendidik atau proses perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap manusia melalui kegiatan belajar.

Menurut Tirtarahardja & La Sulo (2005: 1) pendidikan bertujuan membantu siswa untuk mengembangkan potensi-potensinya. Permasalahan utama pendidikan nasional adalah kualitas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah merestrukturisasi kurikulum. Akan tetapi pada kenyataannya, upaya tersebut belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Pemerintah melalui Kemendikbud pada tahun 2013 menetapkan kurikulum baru untuk menggantikan kurikulum yang lama, yaitu sering kita sebut sebagai "Kurikulum 2013". Kemudian, Kemendikbud melakukan uji publik kurikulum tersebut pada tahun pelajaran 2013/2014. Akan tetapi, menurut Itje Chodijah (Ketua FSGI) menyatakan Kurikulum 2013 bermasalah sejak dari proses penyusunan hingga implementasinya (dikutip dari education.kompas.com).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang mendapat perhatian khusus dalam Kurikulum 2013. Tujuan PPKn dalam Kurikulum 2013 yaitu untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia Indonesia

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, ruang lingkup PPKn dalam Kurikulum 2013 adalah Empat Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kurikulum 2013 menuntut guru, khususnya guru PPKn untuk mengembangkan proses pembelajaran. Pandangan umum menggambarkan citra PPKn adalah mata pelajaran yang membosankan. Oleh karena itu, PPKn harus dikemas secara menarik untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik.

Berdasarkan keterangan dengan Bapak Sunardi selaku guru SMA Negeri 1 Geger Madiun kendala pelaksanaan Kurikulum 2013 pada mapel PPKn yaitu pembelajaran siswa lebih aktif masih sulit dilaksanakan. Seharusnya, guru harus memahami bahwa dalam pembelajaran berpusat pada siswa (*student center learning*) ia tetap berperan sebagai kunci dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru yaitu menyusun perangkat pembelajaran, salah satunya memilih model

pembelajaran. Sehingga, siswa mampu mengembangkan kemampuannya secara aktif dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat dari guru.

Oleh karena, dilakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen yang menggunakan perlakuan khusus (*treatment*) berupa model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran yurisprudensi. Persamaan kedua model tersebut terletak pada teori atau kerangka pengembangannya, yaitu teori konstruktivisme. Sedangkan, perbedaan kedua model tersebut terletak pada langkah-langkah pembelajarannya. Perbedaan kedua model tersebut diukur dari hasil belajar. Hal itu karena model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa.

Model pembelajaran kontekstual atau lebih dikenal *CTL* adalah model yang mengharapkan siswa mampu mengaitkan materi dengan kondisi kehidupan sehari-hari (Anitah, 2009: 45). Sedangkan model pembelajaran yurisprudensi (*jurisprudential inquiry*) merupakan model yang dirancang siswa dalam studi

kasus untuk menganalisis isu sosial, seperti hukum dan politik (Huda, 2013: 120).

Kemudian, eksperimen dilakukan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Geger semester genap tahun pelajaran 2013/2014. Untuk mengetahui perbedaan kedua model akan dilihat dari hasil belajar siswa setelah *treatment* dilaksanakan. Menurut Bloom dalam Suprijono (2013: 6), "hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor". Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar siswa. Dengan kata lain, untuk mengetahui pengaruh kedua model tersebut diukur dari hasil belajar. Sehingga akan diketahui salah satu model pembelajaran yang cocok dengan kompetensi yang dipilih.

Kompetensi yang dipilih adalah memahami sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Kompetensi tersebut berdasarkan kata kerja operasional (KKO) termasuk kognitif tingkatan memahami, sedangkan materi pokok adalah sistem hukum dan peradilan nasional. Alasan khusus pemilihan KD tersebut, karena tiap tahun pada bulan Muharram terjadi tawuran antar perguruan silat di wilayah eks-karesidenan

Madiun yang melibatkan banyak siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Sehingga, pemilihan kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa melalui kegiatan pembelajaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar kognitif antara model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran yurisprudensi materi pokok memahami sistem hukum dan peradilan nasional pada siswa kelas X IPA 3 dan X IPA 4 SMA Negeri 1 Geger Madiun

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013: 3) "secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Sementara itu, Creswell (2010: 4-5) mengelompokan metode penelitian menjadi tiga yaitu: 1) kualitatif; 2) kuantitatif; 3) metode campuran. Adapun metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksperimen.

Surakhmad (1998: 230) mengemukakan "metode eksperimental adalah peningkatan cara menemukan

kebenaran dengan metode mencoba dan gagal (*trial and error*)". Lebih lanjut Creswell (2010: 19) menyatakan "penelitian eksperimen berusaha menentukan apakah suatu *treatment* mempengaruhi sebuah hasil penelitian". Perlakuan khusus (*treatment*) penelitian ini berupa model pembelajaran. Desain penelitian ini adalah *true experimental* model *post test-only*. Menurut Sugiyono (2013: 112) dalam *true experimental design* "peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang akan mempengaruhi jalannya eksperimen".

Tempat penelitian adalah SMAN 1 Geger Kabupaten Madiun yang telah menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014 hanya pada tingkat kelas X. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun yang berjumlah 287 siswa yang terbagi menjadi 9 kelas yang terdiri dari 5 kelas jurusan IPA dan 4 kelas jurusan IPS.

Arikunto (2002: 112) mengemukakan besarnya sampel sama dengan populasi, apabila subjek yang menjadi populasinya kurang dari 100. Jika, jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidaknya dari:

1) kemampuan peneliti; 2) luas wilayah; 3) resiko yang ditanggung peneliti. Berdasarkan pandangan tersebut, maka peneliti mengambil sampel, yaitu siswa kelas X IPA 3 dan X IPA 4 yang berjumlah 31 siswa. Dengan kata lain, sampel berjumlah 62 siswa atau 21,60% dari jumlah populasi.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2013: 124) "*sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Adapun pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan karakteristik kemampuan pengetahuan (*knowledge*) yang hampir sama atau setara pada kelas atau kelompok penelitian sehingga mengurangi resiko kegagalan eksperimen. Data yang digunakan sebagai pertimbangan yaitu nilai rapor siswa kelas X semester ganjil.

Variabel penelitian ini merupakan variabel tunggal (mandiri) yang berada pada dua sampel, yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar yang diteliti yaitu hasil belajar domain kognitif mapel PPKn pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun semester genap tahun ajaran 2013/2014. KD yang dipilih adalah memahami

sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup NKRI. Dengan demikian, untuk memperoleh hasil belajar siswa menggunakan tes objektif. Kemudian, tes diperoleh setelah *treatment* dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas.

Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi untuk menentukan kesesuaian antara kompetensi yang dipilih dengan indikator pembelajaran yang dibuat. Hal itu dilakukan agar Kata Kerja Operasional (KKO) pada indikator sesuai dengan ketentuan Taksonomi Kognitif Bloom. Kemudian, indikator disusun untuk instrumen RPP maupun tes objektif berupa pilihan ganda. Alasan lainnya, penelitian ini menggunakan validitas isi disebabkan oleh instrumen penelitian berupa tes butir soal. Oleh karena itu, dilakukan validasi instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen tes objektif.

Uji coba sebanyak 30 item (butir soal) pada kelas X IPA 5 dengan jumlah siswa 32. Berdasarkan hasil perhitungan validitas tes menggunakan rumus korelasi *product moment* Pearson diketahui bahwa 17 item tes yang dapat dipakai dengan rincian 11

valid dan 7 item revisi. Sedangkan 13 item tidak valid. Instrumen penelitian (tes) setelah uji validitas yang dapat dipakai 17 dan ditambah 3 agar genap 20 item. Ketiga tambahan soal juga telah dilakukan pengitungan uji validitas pada kelas model pembelajaran yurisprudensi dengan rician 1 item revisi dan 2 item valid. Jadi instrumen penelitian ini sebanyak 20 butir soal.

Adapun instrumen lain dalam penelitian ini adalah RPP model pembelajaran kontekstual dan RPP model pembelajaran yurisprudensi menggunakan validitas konstruksi dan penilaian rekan sejawat. Kemudian, berdasarkan uji reliabilitas dengan rumus KR-20 diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,701. Dengan demikian, instrumen tes memiliki reliabilitas tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Deskripsi Data Umum

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Geger merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Madiun, khususnya di wilayah bagian selatan. Sekolah ini berdiri sejak tanggal 1 April 1979 berdasarkan SK Mendikbud No.

0188/O/1979. Sekolah ini beralamat di Jalan Raya Uteran No. 634 Sumberejo, Geger, Madiun, Jawa Timur. Pada tahun pelajaran 2013/2014 jumlah siswa sebanyak 816 yang terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu, kelas X, XI, dan XII. Pada setiap tingkatan terdiri dari 9 kelas paralel dengan 5 kelas jurusan IPA dan 4 kelas jurusan IPS.

2. Deskripsi Data Penelitian

Pengumpulan data variabel hasil belajar siswa mapel PPKn domain kognitif diperoleh melalui metode tes setelah pelaksanaan *treatment*. Instrumen penelitian berupa pilihan ganda yang berjumlah sebanyak 20 butir soal. Setelah dilakukan tes hasil belajar PPKn pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun pada dua sampel maka diperoleh data penelitian sebagai berikut:

a. Data Hasil Belajar Model Pembelajaran Kontekstual

Data data hasil belajar siswa mata pelajaran PPKn pada kelas X IPA 3 SMAN 1 Geger Madiun sebagai kelompok dengan *treatment* model pembelajaran kontekstual

diketahui bahwa data berdistribusi normal dan homogen dengan nilai terendah (n_{\min}) adalah 35 dan nilai tertinggi (n_{\max}) adalah 90. Nilai tengah atau median (Me) pada nilai ke-16 (n_{16}) yaitu 75, dan modus (Mo) yaitu 55 dan 80 dengan frekuensi (f) masing-masing sebanyak 6 siswa. Kemudian, rerata (mean) hasil belajar PPKn dengan *treatment* model pembelajaran kontekstual

(\bar{x}) = 67,58. Standar deviasi (SD) adalah 15,70 dan varians (SD^2) adalah 246,49. Rentang (R) atau jangkauan (J) = 55. Banyak kelas (k) = 5,92 dibulatkan ke atas menjadi 6 dan panjang kelas (i) = 9,17 dibulatkan ke atas menjadi 10. Berdasarkan data tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam sebaran distribusi frekuensi kumulatif sebagai berikut:

Tabel 1.

Distribusi frekuensi kumulatif hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual siswa kelas X IPA 3 SMAN 1 Geger Madiun 2013/2014

No.	Interval Skor	Nilai Tengah	Frekuensi	Frekuensi Kumulatif
1	35-44	39,5	1	1
2	45-54	49,5	5	6
3	55-64	59,5	7	13
4	65-74	69,5	2	15
5	75-84	79,5	10	25
6	85-94	89,5	6	31
Σ			31	

b. Data Hasil Belajar Model Pembelajaran Yurisprudensi

Data data hasil belajar siswa dengan *treatment* model pembelajaran yurisprudensi diketahui bahwa data

berdistribusi normal dan homogen dengan nilai terendah (n_{\min}) adalah 35 dan nilai tertinggi (n_{\max}) adalah 85. Nilai tengah (Me) pada nilai ke-16 (n_{16}) yaitu 55, dan modus (Mo) yaitu 40, 50, 55 dan 65 dengan

frekuensi (f) sebanyak 5 siswa. Kemudian, rerata (mean) hasil belajar PPKn *treatment* model pembelajaran yurisprudensi (\bar{x}) = 54,84. Standar deviasi (SD) adalah 13,51 dan varians (SD^2) adalah

182,52. Rentang (R) = 50. Banyak kelas (k) = 5,92 dibulatkan ke atas menjadi 6 dan panjang kelas (i) = 8,33 dibulatkan ke atas menjadi 9. Berdasarkan data tersebut, kemudian dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.

Distribusi frekuensi kumulatif hasil belajar PPKn model pembelajaran yurisprudensi siswa kelas X IPA 4 SMAN 1 Geger Madiun 2013/2014

No.	Interval Skor	Nilai Tengah	Frekuensi	Frekuensi Kumulatif
1	35-43	39	7	7
2	44-52	48	8	15
3	53-61	57	6	21
4	62-70	66	7	28
5	71-79	75	0	28
6	80-88	84	3	31
Σ			31	

B. Uji Persyaratan

Analisis hipotesis penelitian ini menggunakan uji komparatif teknik *t-test*. Adapun persyaratan analisis data yang harus dipenuhi terlebih dahulu antara lain: 1) uji normalitas; 2) uji homogenitas; 3) uji independen.

1. Uji Normalitas

a. Data hasil belajar model pembelajaran kontekstual

Menurut hasil penghitungan uji normalitas dengan menggunakan uji *Lilliefors* diperoleh koefisien L_{hitung} sebesar 0,1752. Sedangkan koefisien L_{tabel} pada subjek penelitian (n) 31 siswa dengan taraf kesalahan atau signifikansi (α) 1% sebesar 0,1852. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa $L_{hitung} < L_{tabel}$

yaitu $0,1752 < 0,1852$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, maka data berdistribusi normal.

b. Data hasil belajar model pembelajaran yurispudensi

Menurut hasil penghitungan uji normalitas dengan menggunakan uji *Lilliefors* diperoleh koefisien $L_{hitung} = 0,1412$. Sedangkan koefisien *Lilliefors* tabel pada subjek penelitian (n) 31 siswa dengan taraf kesalahan atau signifikansi (α) 1% sebesar $0,1852$. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa $L_{hitung} < L_{tabel}$ yaitu $0,1412 < 0,1852$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, maka data berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa dari kedua sampel bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F (Fisher). Menurut Sugiyono (2013: 275) uji homogenitas menggunakan rumus uji F yaitu dengan cara membandingkan varian terbesar dengan varian terkecil. Berdasarkan uji

homogenitas dengan uji F diperoleh koefisien $F_{hitung} = 1,351$. Sedangkan koefisien Fisher tabel pada signifikansi (α) 1%, yaitu $F_{tabel} (0,01; 30,30) = 2,390$. Sehingga diketahui bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $1,351 < 2,390$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya harga varians masing-masing kelompok adalah homogen. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian bersifat homogen, karena F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} .

3. Uji Independen

Uji independen dalam penelitian ini menggunakan uji F. Berdasarkan uji independensi dengan uji F antara data hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual dengan data hasil belajar hasil belajar PPKn model pembelajaran yurispudensi diperoleh $F_{hitung} = 1,76$ telah dikonsultasikan dengan $F_{tabel} (0,01; 1, 29) = 7,60$ pada signifikansi 1%. Sehingga diketahui bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $1,76 < 7,60$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya data independen. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut bersifat independen,

maka tidak ada kaitannya kedua data tersebut.

C. Uji Hipotesis

Berdasarkan penghitungan uji hipotesis komparatif dengan teknik *t-test separated varians* pada data hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual dengan data hasil belajar PPKn model pembelajaran yurisprudensi menggunakan teknik uji *t-test separated varians* diperoleh $t_{hitung} = 3,43$ dan t kritis dengan taraf kesalahan atau signifikansi (α) 1%, yaitu $t_{tabel(0,01; 60)} = 2,66$. Oleh karena itu, diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$; $3,43 > 2,66$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar model kontekstual dengan hasil belajar model yurisprudensi.

Jadi, berdasarkan uji hipotesis dengan teknik uji *t-test separated varians* dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar PPKn antara model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran yurisprudensi pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun.

D. Pembahasan

Berdasarkan hipotesis alternatif (H_a) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, berbunyi "ada perbedaan yang signifikan hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran yurisprudensi pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun" diterima. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji komparatif dengan teknik uji *t-test separated varians* diperoleh $t_{hitung} = 3,43$ dan $t_{tabel (0,01; 60)} = 2,660$ menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$; $3,43 > 2,660$) pada taraf signifikansi 1%. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, maka hipotesis alternatif (H_a) yang dirumuskan diterima, jadi terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran yurisprudensi pada siswa kelas X SMAN 1 Geger Madiun.

Apabila melihat rerata hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual lebih besar daripada rerata hitung hasil belajar PPKn model pembelajaran yurisprudensi. Adapun rata-rata hitung hasil belajar PPKn model pembelajaran kontekstual $\bar{x}_1 = 67,58$ dan rata-rata hitung hasil belajar PPKn model pembelajaran

yurisprudensi $\bar{x}_2 = 54,84$. Dengan demikian, $\bar{x}_1 > \bar{x}_2$, yaitu $67,58 > 54,85$ artinya bahwa hasil belajar model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model yurisprudensi. Jadi, hasil belajar model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model pembelajaran yurisprudensi (aspek pengetahuan) pada mata pelajaran PPKn kelas X semester genap kompetensi memahami sistem hukum nasional dalam ruang lingkup NKRI.

Berdasarkan data hasil penelitian ini di atas, menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar siswa. Dengan demikian, data yang diperoleh sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam penelitian ini, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Model pembelajaran dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Lebih lanjut akan diuraikan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Ahmadi dan Supriyono (2013: 138) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain:

1) Faktor jasmaniah, meliputi penglihatan,

pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya.

2) Faktor psikologis, terdiri dari: (a) Faktor intelektual meliputi, faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat; serta faktor kecakapan yaitu prestasi yang telah dimiliki; (b) Faktor non intelektual, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri.

3) Faktor kematangan fisik dan psikis, meliputi: (a) Faktor sosial, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan kelompok; (b) Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian; (c) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim.

4) Faktor lingkungan spritual atau keamanan.

Sementara itu, menurut Purwanto (2013: 107) faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar meliputi:

- 1) Faktor luar, mencakup:
 - a) Lingkungan, meliputi alam dan sosial;
 - b) Instrumental, meliputi kurikulum/ bahan ajar, guru/ pengajar, sarana dan fasilitas, administrasi atau manajemen.
- 2) Faktor dalam, mencakup:
 - a) Fisiologi, meliputi kondisi fisik dan panca indera;
 - b) Psikologi, meliputi bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif.

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran atau *treatment* penelitian ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar. Model pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar, dimana dapat memberikan suasana yang berbeda bagi siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, model sangat mempengaruhi hasil belajar sebagaimana pendapat Purwanto

(2013: 107) dapat digolongkan faktor instrumental.

Faktor instrumental input adalah faktor-faktor yang sengaja dirancang atau dimanipulasi seperti kurikulum atau bahan ajar, guru yang memberikan pengajaran, sarana dan fasilitas, serta manajemen yang berlaku di sekolah. Faktor instrumental input merupakan faktor yang sangat penting dan paling mempengaruhi hasil belajar, karena faktor ini menentukan bagaimana kegiatan pembelajaran atau proses belajar-mengajar itu akan terjadi dalam diri siswa.

Menurut Winarno (2013: 75) "Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari kegiatan awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru". Satu ciri khusus model yang tidak dimiliki istilah lain dalam pembelajaran, yaitu adanya langkah-langkah atau tahapan (*syntax*). Model pembelajaran sebagai *treatment* dalam penelitian ini, yaitu model pembelajaran kontekstual dan

model pembelajaran kontekstual yurisprudensi.

Model pembelajaran kontekstual (Anitah, 2009: 45) adalah model yang memungkinkan siswa memperkuat dan menerapkan kemampuan akademiknya dalam berbagai lingkungan untuk memecahkan masalah yang disimulasikan maupun yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sedangkan, menurut Huda (2013: 120) model pembelajaran yurisprudensi merupakan model pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial yang dirancang untuk siswa dalam studi sosial dan menyiratkan sebuah metode studi kasus.

Pada dasarnya, model pembelajaran kontekstual dan yurisprudensi yang digunakan sebagai *treatment* dalam penelitian ini berlandaskan teori yang sama, yaitu konstruktivisme. Akan tetapi, perbedaan kedua model pembelajaran tersebut terletak pada langkah-langkah pembelajaran yang kemudian disusun dalam RPP. Berdasarkan uraian sebelumnya, model pembelajaran yurisprudensi lebih efektif untuk mempelajari isu sosial seperti hukum dan politik. Akan tetapi, berdasarkan uji hipotesis dari data hasil belajar

siswa menunjukkan hal sebaliknya. Rata-rata hitung hasil belajar model kontekstual adalah 67,58 lebih tinggi daripada hasil belajar model yurisprudensi adalah 54,84.

Secara umum, hasil belajar siswa dengan *treatment* model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar siswa dengan *treatment* model pembelajaran yurisprudensi. Adanya perbedaan pengaruh ini (hasil belajar siswa) disebabkan karena masing-masing masing-masing model pembelajaran memiliki langkah-langkah pembelajaran yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil belajar tersebut meliputi: 1) Langkah-langkah Pembelajaran; 2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 3) Kompetensi; 4) Instrumen Penilaian.

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model pembelajaran yurisprudensi disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) Model pembelajaran kontekstual memiliki tahapan pembelajaran yang sudah dikenal sehingga lebih mudah untuk diterapkan; 2) Model ini dapat digunakan untuk

kemampuan kognitif tingkat rendah (C1) hingga tingkat paling tinggi (C6) sehingga model ini sesuai kompetensi yang dipilih yaitu pada tingkatan C2; 3) Instrumen tes sesuai tingkatan kompetensi yaitu domain kognitif tingkat rendah cocok untuk penilaian model ini; 4) Model ini menekankan penggunaan metode *inquiry* sehingga siswa menemukan materi secara aktif dan pembelajaran akan lebih bermakna dengan mengaitkan pengetahuan atau materi dengan kondisi kehidupan sehari-hari siswa.

Sedangkan hasil belajar model pembelajaran yurisprudensi lebih rendah dibandingkan hasil belajar siswa model pembelajaran kontekstual dikarenakan oleh: 1) Model ini adalah model baru sehingga kurang dikenal dan masih sukar diterapkan di kelas; 2) Model ini kurang sesuai tingkat taksonomi kognitif pada kompetensi yang dipilih (C2) sedangkan model ini setidaknya digunakan untuk kemampuan menganalisis (C4); 3) Instrumen tes pilihan ganda kurang sesuai dengan penilaian model ini yang menyiratkan penilaian analisis kasus; 4) Model ini menekankan penggunaan metode studi kasus, dimana siswa diharapkan mampu

menganalisis kasus, sedangkan instrumen yang dibuat seharusnya soal tipe analisis kasus bukan sekedar mengingat (C1) dan memahami (C2) saja.

Oleh karena itu, guru dalam memilih model pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kompetensi baik tingkatan taksonomi pendidikan (KKO) maupun standar isi (materi). Selain itu, dalam membuat instrumen penilaian harus disesuaikan dengan kompetensi serta model pembelajaran. Hal itu karena, model pembelajaran adalah faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, serta instrumen penilaian harus sesuai kompetensi dan model pembelajaran yang digunakan. Dengan kata lain, model pembelajaran, hasil belajar siswa dan instrumen penilaian saling berkaitan.

Walaupun demikian, hasil belajar model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model pembelajaran yurisprudensi apabila diukur hasil belajar siswa khususnya aspek pengetahuan pada kompetensi yang dipilih, bukan berarti model pembelajaran kontekstual lebih baik dari model pembelajaran yurisprudensi.

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Peran guru diperlukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas salah satunya dengan memilih model pembelajaran yang tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data serta pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan perbedaan yang signifikan hasil belajar kognitif antara model pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran yurisprudensi pada materi pokok memahami sistem hukum dan peradilan nasional. Perbedaan tersebut diukur dengan hasil belajar siswa setelah *treatment* dilaksanakan dengan *t-test sparated varians* pada taraf (α) 1% menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 3,43 > t_{tabel(0,01; 60)} = 2,660$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, maka terdapat perbedaan signifikan pada variabel penelitian.

Rerata hasil belajar aspek kognitif model pembelajaran kontekstual adalah 67,58 sedangkan hasil belajar aspek kognitif model pembelajaran yurisprudensi adalah 54,84. Hasil

belajar model pembelajaran kontekstual lebih tinggi dibandingkan hasil model pembelajaran yurisprudensi. Hal itu disebabkan oleh kompetensi yang dipilih adalah memahami sistem hukum dan peradilan nasional. Dengan kata lain, model yurisprudensi kurang tepat apabila digunakan pada tingkatan kognitif kompetensi yang dipilih yaitu memahami.

Hasil belajar kognitif antara model pembelajaran kontekstual lebih tinggi daripada hasil belajar model pembelajaran yurisprudensi pada kompetensi yang dipilih, bukan berarti model pembelajaran kontekstual lebih baik. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Peran guru diperlukan memperbaiki proses pembelajaran, salah satunya dengan memilih model pembelajaran dipilih sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran kepada berbagai pihak terkait antara lain:

1. Siswa hendaknya meningkatkan minat, motivasi belajar dan hasil belajar mata pelajaran PPKn khususnya

- materi tentang hukum. Selain itu, siswa hendaknya memiliki berbagai kecakapan meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap.
2. Guru hendaknya meningkatkan kompetensinya menghadapi perubahan dan perkembangan di bidang pendidikan. Selain itu, guru hendaknya memperbaiki kualitas pendidikan mulai dari proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan model pembelajaran yang harus disesuaikan kompetensi yang ingin dicapai.
 3. Sekolah perlu meningkatkan sarana dan prasarana agar membantu siswa dan guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menarik serta sekolah memberikan evaluasi terhadap guru secara berkala terkait kegiatan atau proses pembelajaran di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., & Supriyono, W. 2013. *Psikologi Belajar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anitah, Sri. 2009. *Teknologi Pembelajaran*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi V)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Craswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Miftahul. 2013. *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran: Isu-Isu Metodis dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kompas.com. 2014, Januari. *Penerapan Kurikulum Hanya Sekedar Formalitas*. Diperoleh 19 Januari 2014, dari : <http://edukasi.kompas.com>.
- Purwanto, Ngalim. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprijono, Agus. 2013. *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah: Dasar Metoda Teknik*. Bandung: Tarsito.

Tirtarahardja, U., & La Sulo, S.L.
2005. *Pengantar Pendidikan
(Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka
Cipta.

Winarno. 2013. *Pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan: Isi,
Strategi, dan Penilaian*.
Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

**PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN (PKn) MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE *MAKE A MATCH*
PADA SISWA KELAS XI IPA 5 SMA N 1 GUBUG 2012 / 2013**

Muzamil

Guru PKn SMA Negeri 1 Gubug Kab. Grobogan

Alamat e_mail: muzamil.abdiwae@yahoo.com

Abstract. *This study aims to determine the increase in motivation and learning outcomes of students Civics class XI Science-5 SMAN 1 Gubug matter of international relations and international organizations using cooperative learning model make a match in the second semester of academic year 2012/2013. Methods used are action research methods. The results showed that the application of cooperative learning model can make a match: (1) increase the motivation to learn civics from a mean of 65% (first cycle) and 82.50% (second cycle); (2) improve the learning outcomes of the average Civics 77.90 (first cycle) and 85.10 (second cycle).*

Key words: *motivation of learning, learning outcomes, learning cooperative make a match*

PENDAHULUAN

Pembelajaran yang bermakna akan membawa siswa pada pengalaman belajar yang mengesankan. Pengalaman yang diperoleh siswa akan semakin berkesan apabila proses pembelajaran yang diperolehnya merupakan hasil dari pemahaman dan pencariannya sendiri. Dalam konteks ini siswa mengalami dan melakukannya sendiri. Proses pembelajaran yang berlangsung melibatkan siswa sepenuhnya untuk merumuskan sendiri suatu konsep. Keterlibatan guru hanya

sebagai fasilitator dan moderator dalam proses pembelajaran tersebut. Kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan guru, terutama dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan paradigma pendidikan menuntut

guru lebih inovatif dalam merancang pembelajaran. Pembelajaran harus berpusat pada siswa, dengan memberikan pembelajaran yang relevan dalam kehidupan nyata.

Selama ini guru kurang kreatif menerapkan inovasi pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena pola pikir belajar diartikan sebagai perolehan pengetahuan, dan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa, disamping itu pembelajaran ditekankan pada hasil, bukan pada proses. Akibatnya guru terpaksa mengajar dengan sistem konvensional dengan penggunaan metode ceramah dan cara siswa belajar lebih dominan dengan menghafal. Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta – fakta yang harus dihafal. Kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, sehingga ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. Pembelajaran secara konvensional cenderung berpusat pada guru, guru segala–galanya (teacher oriented) bukan

didasarkan pada siswa (student oriented).

Berdasarkan hasil nilai ulangan harian PKn siswa SMA Negeri 1 Gubug pada semester gasal tahun pelajaran 2012 / 2013 ditunjukkan belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum secara klasikal, dimana hanya 67,5% siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimum, dengan rata-rata nilai penguasaan konsep (kognitif) hanya sebesar 71,30. Berdasarkan pengamatan dari peneliti selama proses pembelajaran berlangsung siswa yang aktif hanya sedikit, sebagian siswa lainnya hanya diam sebagai pendengar dan mencatat, serta ada pula yang berbicara sendiri. Hal ini karena siswa cenderung pasif dan hanya sebagai pendengar ceramah guru tanpa diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Disamping itu, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) juga tidak luput dari kecenderungan proses pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered). Kondisi demikian tentu membuat proses pembelajaran hanya dikuasai oleh guru dan tingkat partisipasi dari siswa sangat rendah. Apalagi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran

yang sarat materi sehingga siswa dituntut memiliki pemahaman yang holistik terhadap materi yang disampaikan guru.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA dewasa ini harus bertumpu pada aktivitas proses belajar siswa, ini berarti bahwa saat merancang skenario pembelajaran harus diperhitungkan pendekatan yang bervariasi. Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* merupakan model pembelajaran kooperatif yang mengandung unsur kerjasama dan tanggung jawab antar siswa dalam kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia siswa.

Rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu; (1) Apakah model pembelajaran Kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional dan organisasi internasional pada semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013 ?; (2) Apakah model pembelajaran Kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan

hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional dan organisasi internasional pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013? Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui peningkatan motivasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA – 5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional dan organisasi internasional menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe *make a match* pada semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013; (2) mengetahui peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA – 5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional dan organisasi internasional menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe *make a match* pada semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013.

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN

Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2006:75). Menurut Hamzah B. Uno (2008:3) motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. John W. Santrock (2008:510) menyatakan bahwa motivasi adalah proses member semangat, arah dan kegigihan perilaku, artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Menurut Martin Handoko (2009:9) motivasi merupakan suatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah lakunya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan, motivasi merupakan suatu dorongan dalam diri untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan. Jadi, motivasi belajar adalah dorongan dalam diri seseorang individu untuk melakukan kegiatan belajar demi mencapai tujuan belajar.

Pencapaian hasil belajar sangat didukung oleh motivasi belajar yang dimiliki siswa.

Sardiman (2006:85) menyatakan bahwa motivasi memiliki fungsi:

- 1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi motivasi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Dalam hal ini, motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
- 2) Menentukan arah perbuatan ke arah tujuan ingin dicapai. Motivasi dapat memberikan arah kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
- 3) Menyeleksi perbuatan, jadi motivasi dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Herminarto Sofyan dan Hamzah B. Uno (2004:31) menyatakan bahwa peranan penting motivasi dalam belajar dan pembelajaran, meliputi:

- 1) Menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak

yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya akan dapat dipecahkan dengan bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Sesuatu itu dapat menjadi penguat belajar bagi seseorang, apabila sedang benar-benar mempunyai motivasi untuk belajar sesuatu.

- 2) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Siswa akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi siswa.
- 3) Menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar.
- 4) Menentukan ketekunan belajar. Siswa yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan harapan akan memperoleh hasil yang baik. Motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. Apabila seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi untuk belajar, maka tidak akan tahan lama belajar, akan mudah tergoda untuk mengerjakan

hal yang lain dan bukan belajar.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa peranan motivasi dalam belajar, yaitu sebagai pendorong, penentu tujuan dan sebagai pengendali kegiatan belajar. Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.

Menurut Fudyartanto (2002:151) hasil belajar adalah penguasaan sejumlah pengetahuan dan keterampilan baru serta sikap baru ataupun memperkuat sesuatu yang telah dikuasai sebelumnya, termasuk pemahaman dan penguasaan nilai-nilai. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya" (Nana Sudjana, 2005:22). Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni: informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan motoris (Nana Sudjana, 2005:22).

Benyamin Bloom dikutip dari Nana Sudjana (2005:22),

hasil belajar diklasifikasikan menjadi tiga ranah, yakni: ranah kognitif, ranah afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni: gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan gerakan keterampilan kompleks, gerakan ekspresif dan interpretatif.

Kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor menjadi objek penilaian hasil belajar. Dari ketiga ranah kemampuan itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran.

Falsafah yang mendasari

model pembelajaran kooperatif dalam pendidikan adalah falsafah homo *homini socius*. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup. Tanpa kerjasama, tidak akan ada individu, keluarga, organisasi atau sekolah (Anita Lie, 2003: 28). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Menurut Agus Suprijono (2009:57) kelompok bukanlah semata-mata sekumpulan orang. Kumpulan disebut kelompok apabila ada interaksi, mempunyai tujuan, berstruktur, *groupness*. Interaksi adalah saling mempengaruhi individu satu dengan individu yang lain. Interaksi dapat berlangsung secara fisik, non-verbal, emosional dan sebagainya. Tujuan dalam kelompok dapat bersifat instrinsik dan ekstrinsik. Tujuan instrinsik adalah tujuan yang didasarkan pada alasan bahwa dalam kelompok perasaan menjadi senang. Tujuan

ekstrinsik adalah tujuan yang didasarkan pada alasan bahwa untuk mencapai sesuatu tidak dapat dicapai secara sendiri, melainkan harus dikerjakan secara bersama-sama. Struktur kelompok menunjukkan bahwa dalam kelompok ada peran. Peran dari tiap- tiap anggota kelompok, berkaitan dengan posisi individu dalam kelompok maupun kemampuan individu masing-masing. *Groupness* menunjukkan bahwa kelompok merupakan suatu kesatuan. Kelompok bukanlah semata-mata kumpulan orang yang saling berdekatan. Kelompok adalah kesatuan yang bulat di antara anggotanya.

Model pembelajaran *make a match* merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Model *make a match* adalah bentuk pengajaran dengan cara mencari pasangan kartu yang telah dimiliki dan pasangan bisa dalam bentuk orang perorang apabila jumlah siswa banyak, kemudian berhadapan untuk saling menjelaskan makna kartu yang dimiliki. Dalam pembelajaran teknik *make a match* terdapat unsur pencocokan kartu yang dimiliki dengan kartu lain yang sesuai. Teknik *make a match* digunakan untuk memperdalam

atau review materi yang telah dipelajari melalui latihan-latihan soal yang disajikan dalam kartu-kartu.

Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dikembangkan oleh Lorna Curran pada tahun 1994. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.

Anita Lie (2003:56) mengungkapkan langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*:

- 1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang mungkin cocok untuk sesi review (persiapan menjelang tes ujian)
- 2) Setiap siswa mendapatkan satu buah kartu
- 3) Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya
- 4) Siswa juga bergabung dengan dua atau tiga siswa lain yang memegang kartu yang cocok. Misalnya, pemegang kartu 3+9 akan membentuk kelompok

dengan pemegang kartu 3x4 dan 6x2.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe *make a match*, meliputi:

- a. Persiapan guru dan siswa dalam memulai pembelajaran

Untuk memulai pembelajaran siswa maupun guru mempersiapkan media/alat yang akan digunakan dalam pembelajaran serta adanya penyampaian tujuan pembelajaran. Sebelum memulai materi pokok guru melakukan apersepsi, untuk mengingatkan kembali tentang materi yang diperlukan sebagai dasar untuk mempelajari materi pokok tersebut

- b. Pengelompokan

Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, pengelompokan diusahakan seheterogen mungkin, dari prestasi belajar maupun jenis kelaminnya

- c. Pembahasan materi

Teknik *make a match* bisa diterapkan untuk sesi review terhadap materi yang telah dipelajari, dengan melalui latihan-

latihan soal yang disajikan dalam bentuk kartu. Jadi, sebelum melakukan permainan menemukan pasangan dari kartu-kartu yang dimilikinya, ada kegiatan pembahasan materi, dapat meliputi: pemberian LKS pada setiap kelompok, diskusi kelompok dan pembahasan hasil diskusi

- d. Permainan mencari pasangan
Permainan mencari pasangan meliputi tata cara sebagai berikut:

- 1) Siswa memperoleh kartu soal dan jawaban

- 2) Siswa memikirkan jawaban dari soal pada kartu masing-masing dalam waktu 3 menit

- 3) Jika sebelum 3 menit sudah mengerjakan soal, siswa tidak diperkenankan mencari pasangannya terlebih dahulu sebelum ada instruksi

- 4) Siswa mencari pasangan kartu mereka di dalam kelompok besar (gabungan tiga kelompok berurutan) yang telah ditentukan dalam waktu 2 menit

- 5) Setelah menemukan pasangan, siswa

- mengucapkan kata "sukses" untuk dicatat dan dicek kebenaran jawaban oleh pengamat
- 6) Setelah menemukan pasangannya, siswa duduk berdekatan dengan pasangannya untuk mendiskusikan jawaban dari soal dalam kartunya
 - 7) Siswa yang dapat menemukan pasangannya akan memperoleh poin untuk penghargaan kelompok yaitu 10 poin
 - 8) Siswa tidak diperbolehkan mengganggu teman lain yang masih mencari pasangan
- e. Presentasi dan pembahasan hasil permainan
- Setelah permainan menemukan pasangan, diadakan presentasi hasil permainan dari beberapa pasangan serta pemberian kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi, siswa yang mampu menjawab pertanyaan, akan diberikan poin untuk kelompoknya. Pembahasan hasil permainan dilakukan siswa bersama-sama dengan guru.
- f. Penghargaan kelompok
- Penghargaan kelompok diberikan setelah satu siklus tindakan penghargaan kelompok berdasarkan hasil pekerjaan LKS dan permainan, namun dalam setiap pembelajaran diinformasikan poin permainan yang diperoleh setiap individu, dimaksudkan untuk memotivasi siswa dalam setiap pembelajaran.
- g. Penyimpulan materi
- Pada akhir rangkaian pembelajaran teknik *make a match*, guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari serta guru memberikan penguatan tentang kesimpulan tersebut
- h. Penugasan dan persiapan pada materi berikutnya
- Pembelajaran diakhiri dengan penugasan dan pemberian informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya.

KERANGKA BERPIKIR

Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat digunakan dalam pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* mampu membangkitkan motivasi belajar,

meningkatkan keingintahuan, dan mempermudah pemahaman konsep siswa dalam mata pelajaran PKn tentang materi hubungan internasional dan

organisasi internasional, akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Selengkapnya dapat disimak pada bagan di bawah ini:



Gambar 1 : Bagan kerangka berpikir

HIPOTESIS TINDAKAN

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan motivasi dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional dan organisasi internasional menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe *make a match* pada semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013 selama 5 bulan yaitu antara bulan Februari–Juni 2013. Subyek penelitian tindakan ini adalah siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug Kab Grobogan semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013 dengan jumlah 40 orang yang terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan.

Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi ; Guru, teman sejawat dan siswa; dokumen atau arsip seperti arsip nilai ulangan harian siswa.

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 2 (dua) siklus. Setiap siklus mencakup perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan perencanaan tindak lanjut.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes dan non tes. Teknik tes ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa sesudah diadakan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik non tes berupa observasi / pengamatan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Disamping itu juga observasi dilakukan terhadap peneliti untuk mengetahui sejauh mana peneliti telah melakukan hal-hal yang diharapkan selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif komparatif adalah membandingkan hasil nilai ulangan sebelum diadakan tindakan, nilai tes setelah siklus 1

dan nilai tes setelah siklus 2. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk analisis data yang berbentuk kualitatif yang diperoleh dari pengamatan pada waktu proses belajar mengajar terjadi.

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 1) banyaknya siswa yang termotivasi dalam pembelajaran telah mencapai lebih dari 75%.; (2) adanya peningkatan rata-rata hasil belajar yang dicapai oleh siswa dan banyaknya siswa yang tuntas (nilai \geq KKM yaitu 76) telah mencapai lebih dari 85%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kondisi Awal

Motivasi dan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug Kabupaten Grobogan masih terbilang rendah . Dari hasil kajian terhadap dokumentasi catatan siswa diperoleh dari 40 siswa di kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug, sebagian besar siswa tidak tepat waktu menyelesaikan tugas, keaktifan siswa di kelas kurang, kemampuan kerja sama dengan teman kurang serta kemampuan bertanya dan menjawab siswa rendah serta motivasi belajar

yang rendah yaitu sebesar 40.30%. Pada saat guru menyampaikan materi, siswa cenderung ramai dan berbicara dengan teman sebangkunya. Hal tersebut terjadi karena guru belum melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Disamping itu guru juga belum memanfaatkan media pembelajaran yang ada secara baik dan memadai. Sehingga siswa merasa tidak atau kurang berminat mengikuti pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terasa membosankan dan banyak hafalan. Berdasarkan hasil ulangan harian dari 40 siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug Kab. Grobogan pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013, tercatat hanya 27 siswa atau 67.50% siswa yang tuntas belajar dengan rata-rata nilai penguasaan konsep (kognitif) sebesar 71,30. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 :
Hasil Belajar PKn PraSiklus

No.	Aspek	Rata-rata	Keterangan
1	Nilai rata-rata penguasaan konsep	71.30	Indikator kinerja rata-rata 76 dengan ketuntasan $\geq 85\%$ belum tercapai
2	Ketuntasan belajar	67.50%	

Deskripsi Hasil Siklus I

Siklus I merupakan proses pembelajaran dengan standar kompetensinya yaitu ; menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu; 1) mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara, 2) menguraikan

tahap-tahap perjanjian internasional. Kegiatan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3. Langkah pokok pada siklus I, kegiatan yang dilakukan yaitu; perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penutup.

Pada tahap perencanaan, peneliti melaksanakan

serangkaian kegiatan yaitu : (1) peneliti melakukan analisis kurikulum untuk menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe *make a match*; (2) mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan program tahunan, program semester, dan silabus mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas XI SMA yaitu hubungan internasional dan organisasi internasional; (3) merancang LKS tentang materi yang akan diajarkan kepada siswa; (4) membuat lembar observasi siswa; (5) membuat soal-soal game untuk kegiatan pembelajaran, soal tes evaluasi; (6) peneliti juga menyiapkan perlengkapan untuk permainan mencari pasangan.

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 3 pertemuan yaitu; pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 pukul 07.15-08.45, pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 pukul 07.15-08.45. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan materi yang akan dipelajari, memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti, peneliti melakukan serangkaian kegiatan yaitu; (1) pengelompokan, (2) pembahasan materi, (3) permainan mencari pasangan, (4) presentasi dan pembahasan hasil permainan, dan (5) penghargaan kelompok.

Pada tahap penutup, peneliti memberikan penegasan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, siswa ditugaskan untuk mempelajari materi tersebut dengan baik, dan penilaian akhir penguasaan konsep. Pertemuan ketiga dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013, kegiatan yang dilakukan adalah tes siklus I materi pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara dan menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.

Pada siklus I pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan model pembelajaran kooperatif tipe

make a match di kelas XI IPA-5 belum terlaksana dengan baik. Pembelajaran belum sesuai dengan yang direncanakan, ada beberapa rangkaian kegiatan yang belum dapat terlaksana, yaitu permainan "mencari pasangan" serta masih ada siswa yang belum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, seperti belum mengikuti kegiatan diskusi dan terlambat mengumpulkan hasil diskusi. Berdasarkan data hasil observasi

motivasi belajar siswa, diperoleh 26 siswa atau 65%. Hasil ini menunjukkan tingkat motivasi belajar siswa yang diamati belum mencapai indikator keberhasilan motivasi belajar siswa. Sementara itu hasil belajar penguasaan konsep tercatat 32 siswa atau 80% siswa yang tuntas belajar dengan nilai rata-rata penguasaan konsep (kognitif) sebesar 77.90. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 : Hasil Belajar PKn Siklus I

No.	Aspek	Rata-rata	Keterangan
1	Nilai rata-rata penguasaan konsep	77.90	Indikator kinerja rata-rata 76 dengan ketuntasan \geq 85%
2	Ketuntasan belajar	80.00%	belum tercapai

Deskripsi Hasil Siklus II

Siklus II merupakan proses pembelajaran dengan standar kompetensinya yaitu ; menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu; 1) menjelaskan fungsi perwakilan diplomatik, 2) menguraikan peranan organisasi internasional.

Kegiatan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3. Langkah pokok pada siklus I, kegiatan yang dilakukan yaitu; perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penutup.

Pada tahap perencanaan, peneliti melaksanakan serangkaian kegiatan yaitu :

Pada tahap perencanaan peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu RPP, LKS, Soal tes beserta kunci jawaban dan pedoman penskorannya serta kartu permainan. Pada siklus ini, peneliti menyusun LKS dengan materi fungsi perwakilan diplomatik dan perana organisasi internasional. Selain itu, peneliti juga menyusun kartu untuk permainan "mencari pasangan" yang mencakup materi fungsi perwakilan diplomatik dan peranan organisasi internasional.

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 3 pertemuan yaitu; pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 pukul 07.15-08.45, pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 pukul 07.15-08.45. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan materi yang akan dipelajari, memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa tentang

materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti, peneliti melakukan serangkaian kegiatan yaitu; (1) pengelompokan, (2) pembahasan materi, (3) permainan mencari pasangan, (4) presentasi dan pembahasan hasil permainan, dan (5) penghargaan kelompok.

Pada tahap penutup, peneliti memberikan penegasan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, siswa ditugaskan untuk mempelajari materi tersebut dengan baik, dan penilaian akhir penguasaan konsep. Pertemuan ketiga dilaksanakan hari Sabtu tanggal 13 April 2013, kegiatan yang dilakukan adalah tes siklus II materi fungsi perwakilan diplomatik dan peranan organisasi internasional.

Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* di kelas XI IPA-5 telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data hasil observasi motivasi, diperoleh 37 siswa atau 82,50% telah memenuhi indikator dari keenam aspek motivasi yang diamati. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan banyaknya siswa yang termotivasi belajar jika dibandingkan dengan siklus I.

Sementara itu dari hasil tes siklus II, prestasi belajar penguasaan konsep tentang fungsi perwakilan diplomatik dan peranan organisasi internasional tercatat 38 siswa atau 95% siswa

yang tuntas belajar dengan nilai rata-rata penguasaan konsep (kognitif) sebesar 85,10. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 :
Hasil Belajar PKn Siklus II

No.	Aspek	Rata-rata	Keterangan
1	Nilai rata-rata penguasaan konsep	85.10	Indikator kinerja rata-rata 76 dengan ketuntasan $\geq 85\%$
2	Ketuntasan belajar	95.00%	sudah tercapai

Pembahasan Siklus I

Hasil penelitian menunjukkan, motivasi dan prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 mengalami peningkatan dengan menggunakan model pembelajaran koopertatif tipe *make a match*. Hal ini tampak dari proses pembelajaran, motivasi belajar dan hasil belajar siswa.

1. Pembahasan Siklus I

Pada siklus I, pembelajaran telah berlangsung dengan cukup baik, sebagian besar siswa

aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Siswa belajar melalui diskusi kelompok, pembahasan LKS, presentasi dan permainan mencari pasangan.

Pada pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran pada permainan mencari pasangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan sebagian siswa belum memahami tata cara permainan mencari pasangan, sehingga belum bisa melaksanakan permainan secara baik. Disamping itu siswa juga disibukkan dengan kerja diskusi kelompok untuk

mengerjakan soal-soal dalam LKS sehingga menyita waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang lain.

Pada pertemuan kedua, pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* telah berjalan dengan baik. Para siswa sudah memahami dan terbiasa dengan aturan yang ada dalam model permainan *menvari pasangan*. Disamping siswa sudah biasa membagi waktu dengan baik dalam menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran dengan baik seperti mengerjakan LKS, diskusi kelompok, presentasi dan pembahasan soal. Hasil analisis lembar observasi

motivasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diketahui adanya peningkatan motivasi belajar siswa dengan telah melaksanakan keenam aspek motivasi yang diamati, yaitu sebanyak 26 siswa atau 65%. Selain itu, dari hasil tes siklus I prestasi belajar penguasaan konsep tentang pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara serta menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional, tercatat 32 siswa atau 80.00% siswa yang tuntas belajar dengan nilai rata-rata penguasaan konsep (kognitif) sebesar 77.90. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



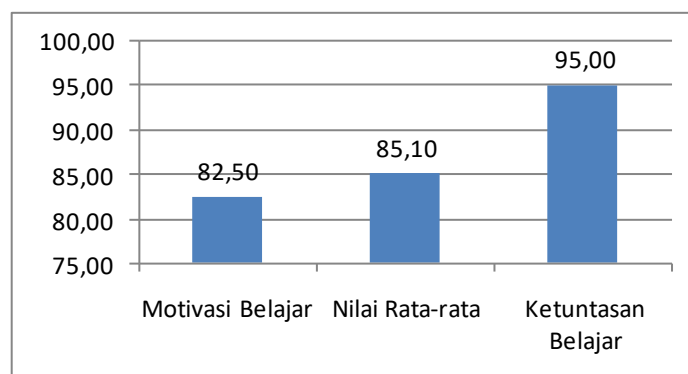
Gambar 1 : Chart Peningkatan Rerata Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I

2. Pembahasan siklus II

Pada siklus II, pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik. Peneliti dan siswa telah melaksanakan pembelajaran sesuai yang diharapkan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

Pada pertemuan pertama maupun pertemuan kedua, siswa sudah aktif dan terbiasa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti diskusi kelompok, presentasi kelas, pembahasan soal, dan permainan mencari pasangan. Semua tahapan-tahapan kegiatan dalam model pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga alokasi waktu yang tersedia dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan

analisis data hasil observasi, motivasi belajar siswa dan hasil belajar PKn siswa kelas XI IPA-5 mengalami peningkatan. Dari hasil analisis lembar observasi motivasi belajar, menunjukkan banyaknya siswa yang termotivasi pada saat pembelajaran, siswa yang berkategori tinggi pada setiap aspek motivasi telah mencapai lebih dari 75% yaitu sebanyak 37 siswa atau 82.50%. Selain itu, dari hasil tes siklus II prestasi belajar penguasaan konsep tentang fungsi perwakilan diplomatik dan peranan organisasi internasional, tercatat 38 siswa atau 95.00% siswa yang tuntas belajar dengan nilai rata-rata penguasaan konsep (kognitif) sebesar 85.10. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2 : Chart Peningkatan Rerata Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Siklus II

3. Pembahasan Antar Siklus

Pada proses pembelajaran yang berlangsung baik pada siklus I maupun siklus II, sebagian besar siswa aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan peneliti. Siswa belajar melalui diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, siswa dilatih untuk berpendapat, bekerjasama, menentukan keputusan dan menghargai pendapat orang lain. Pembelajaran melalui diskusi kelompok dapat melatih siswa untuk bersosialisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Anita Lie (2003:28) falsafah yang mendasari model pembelajaran kooperatif adalah falsafah *homo homini socius*. Falsafah ini menekankan manusia adalah makhluk sosial, bekerja sama adalah kebutuhan.

Dalam pembelajaran, diadakan kegiatan permainan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menurut Herminarto Sofyan dan Hamzah Uno (2003:44) proses permainan merupakan proses yang menarik bagi siswa. Suasana yang menarik itu menyebabkan proses belajar menjadi bermakna secara afektif atau emosional bagi siswa. Sesuatu yang bermakna akan lestari diingat, dipahami

atau dihargai.

Pada saat mencari pasangan dan menjawab pertanyaan, suasana belajar yang tercipta adalah kompetisi antar siswa. Suasana kompetisi mendorong siswa untuk belajar lebih baik lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Herminarto Sofyan dan Hamzah Uno (2003:47), suasana persaingan akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengukur kemampuan dirinya melalui kemampuan orang lain. Selain itu, belajar dengan bersaing akan menimbulkan upaya belajar yang sungguh-sungguh.

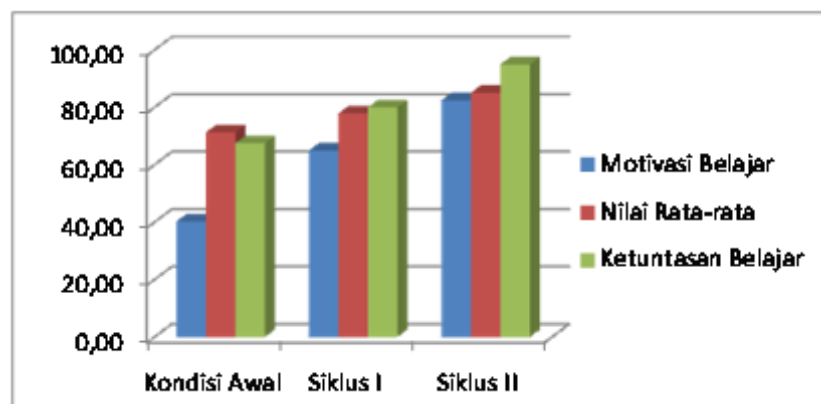
Pada permainan "mencari pasangan" siswa diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab soal dari kartunya masing-masing selama 5 menit dan dilanjutkan mencari pasangan dari kartunya. Hal ini dilakukan untuk memupuk rasa ingin tahu siswa tentang suatu hal, sehingga mendorong siswa untuk berusaha segera memecahkan permasalahannya. Rasa ingin tahu merupakan daya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

Dalam pembelajaran, diadakan pula penghargaan kelompok, yaitu untuk tiga

kelompok terbaik mendapatkan hadiah. Penghargaan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Sardiman (2006:91-94) serta Herminarto Sofyan dan Hamzah B. Uno (2003:42) yang menyatakan pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, pemberian penghargaan bisa dilakukan tidak hanya dalam bentuk hadiah saja namun juga dapat berupa, ungkapan secara verbal, misalnya dengan pujian.

Berdasarkan hasil observasi motivasi belajar, motivasi belajar siswa pada siklus II pada siswa kelas XI IPA-5 mengalami peningkatan yang

cukup signifikan dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus I. Peningkatan motivasi belajar siswa itu dapat dilihat pada setiap aspek motivasi belajar yang diamati telah mencapai lebih dari 75%, yang artinya banyaknya siswa yang mencapai kategori tinggi pada keenam aspek motivasi telah memenuhi indikator keberhasilan ($\geq 75\%$). Selain itu, berdasarkan hasil belajar PKn siswa kelas XI IPA-5 mengalami peningkatan baik nilai rata-rata penguasaan konsep (kognitif) maupun ketuntasan belajarnya dibandingkan tes hasil belajar PKn pada kondisi awal maupun siklus I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Dari gambar 3 di atas, sangat jelas menunjukkan

adanya peningkatan baik motivasi belajar siswa, rata-rata kelas maupun ketuntasan belajar dari kondisi awal hingga kondisi akhir. Peningkatan motivasi belajar siswa kelas XI IPA-5 dari kondisi awal 40.30% menjadi 65,00% pada siklus I dan 82.50% pada siklus II atau kondisi akhir. Sementara itu nilai rata-rata penguasaan konsep siswa kelas XI IPA-5 dari kondisi awal 71.30 menjadi 77.90 pada siklus I dan dan 85.10 siklus II atau kondisi akhir. Sedangkan peningkatan ketuntasan belajar siswa kelas XI IPA-5 dari kondisi awal 67.50% menjadi 80.00% pada siklus I dan 95.00% siklus II atau kondisi akhir. Dengan demikian motivasi belajar, ketuntasan belajar maupun nilai rata-rata penguasaan konsep Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) materi hubungan internasional dan organisasi internasional siswa kelas XI IPA-5 telah mencapai indikator keberhasilan atau kinerja yaitu rata-rata 76 dan ketuntasan belajar lebih dari 85%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) model

pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional dan organisasi internasional pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013; dan (2) model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa kelas XI IPA-5 SMA Negeri 1 Gubug materi hubungan internasional dan organisasi internasional pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat kami sampaikan antara lain sebagai berikut: (1) Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn); (2) Para guru diharapkan dapat memperkaya penerapan beberapa model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa

pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn); dan (3) Model pembelajaran kooperatif tipe *make a match* juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain.

Sardiman. 2006. *Inovasi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suprijono. 2009. *Cooperative Learning, Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anita Lie. 2003. *Cooperative Learning Mempraktikan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas*. Jakarta: PT Gramedia.
- Fudyartanto. 2002. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama..
- Herminarto Sofyan dan Hamzah B. Uno. 2003. *Teori Motivasi dan Aplikasinya dalam Penelitian*. Gorontalo: Nurul Jannah.
- John W. Santrock. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama
- Martin Handoko. 2008. *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nana Sudjana. 2005. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

**AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM
BIDANG KETENAGAKERJAAN
(Studi di Kota Surakarta)**

Siti Zulaekhah, Triyanto

PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail: *aychasakura@yahoo.co.id*

ABSTRACT. *The objective of this research is to find out the accessibility of persons with disabilities in the field of employment in Surakarta. This research used descriptive qualitative method. However, this research also used quantitative approach to support the data. The research strategy used in this research was a single embedded strategy. The sources of the data were informants, places, events, and documents. The sampling technique was purposive sampling. The techniques of collecting and arranging the data were interview, observation, and document analysis. To get valid data, the researcher used data and triangulation method. While, the technique of analyzing data used interactive model by following these steps: (1) Data Collection, (2) Data Reduction, (3) Data display, (4) Conclusion. The research procedure was followed these steps: (1) Pre-research, (2) Research, (3) Data Analysis, (4) Research report writing. Based on the results of the research, it can be concluded that the accessibility of persons with disabilities in the field of employment in Surakarta has not been fully implemented. It is caused due to lack of accessibility and dissemination of information for persons with disabilities on job opportunities from companies in Surakarta to receive the disability employee. So, persons with disabilities have no equal opportunities in the field of employment to citizens who have a normal physical.*

Key words: aksesibilitas difabel, hak warga negara, ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Di Indonesia jumlah penyandang disabilitas atau sering kali disebut difabel tergolong sangat banyak.

Berdasarkan hasil pendataan atau survey Pusdatin Depsos (2012) menunjukkan bahwa jumlah penyandang difabel sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327

jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari – hari (*activity daily living /ADL*). Jumlah penyandang cacat laki-laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Dari kelompok umur, usia 18-60 tahun menempati posisi tertinggi. Kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat kaki (21,86%), mental retardasi (15,41%) dan bicara (13,08%). Sekitar 67,33% penyandang cacat dewasa tidak mempunyai ketrampilan dan pekerjaan. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan perlakuan yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Undang - Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa penyandang cacat berhak mendapatkan keamanan perlakuan dan aksesibilitas dalam segala aspek penghidupan. Menurut UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pemerintah harus dapat

menciptakan langkah yang tepat untuk melindungi akses penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik atas dasar keamanan hak sebagai warga negara seperti sistem informasi, transportasi, lingkungan hidup. Sesuai pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa asas pelayanan publik diantaranya persamaan hak, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, dan pelayanan yang menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 dan 27 Ayat 2 mengemukakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut mendukung adanya kesamaan perlakuan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pelayanan publik bidang ketenagakerjaan.

Pada pasal 4 Undang-Undang No 4 tahun 1997 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pegawai di atas 100 orang harus mewajibkan mempekerjakan pula minimal 1 orang dengan keterbatasan (difabel). Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan wajib mempekerjakan 1 orang difabel. Jika itu tidak dilakukan maka

perusahaan tersebut akan terkena sanksi dari pemerintah.

Kota Surakarta merupakan kota kecil yang mendapat sebutan kota "ramah difabel" dimana perbandingan jumlah penyandang disabilitasnya dengan jumlah penduduknya tergolong cukup banyak. Berdasarkan data BPS Kota Surakarta (2011) jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2011 mencapai 501.650

jiwa dengan penyandang disabilitas di kota Surakarta pada tahun 2011 mencapai 1398 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas tersebut memang tidak mencapai 1% dari jumlah penduduk kota Surakarta. Akan tetapi jika melihat dari jumlahnya melebihi 1000 jiwa jumlah tersebut tergolong cukup banyak. Dari jumlah penyandang disabilitas tersebut terdiri dari berbagai macam jenis kecacatan.

Jumlah penyandang cacat di Kota Surakarta dari tahun ke tahun berdasarkan jenis kecacatan sebagai berikut:

Tahun	Cacat Tubuh	Tunanetra	Tunament a	Tunarungu	Jumlah
2011	459	310	327	302	1398
2010	434	25	196	225	880
2009	514	112	59	224	909
2008	498	278	489	199	1464
2007	773	307	729	364	2173

Sumber: Dinas Sosial Ketenagakerjaan & Transmigrasi Surakarta 2012

Pemerintah Kota Surakarta memberikan perhatian yang lebih mengingat banyaknya penyandang disabilitas yang ada di kota Surakarta. Sejalan dengan pemerintahan pusat kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2008 tentang kesetaraan kaum difabel. Inti dari perda tersebut adalah suatu keadilan di segala bidang mengingat kaum

penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Indonesia.

Di dalam Perda No 2 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 1 disebutkan bahwa : "*Peran serta pembangunan merupakan bagian dari kesetaraan difabel yang pada prinsipnya untuk memperluas keikutsertaan dalam*

pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga dalam hal ini kaum difabel memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara seperti di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *Civic Skill Partisipatory* atau ketrampilan partisipatif yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Dalam hal ini mengandung makna bahwa kaum difabel berhak memiliki ketrampilan untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, pengambilan keputusan publik, berkoalisi, mengelola konflik dan sebagainya. Salah satu dari itu adalah pengambilan keputusan publik dimana mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak agar bisa ikut andil dalam pemerintahan.

Pada kenyataannya masih ada penyandang difabel yang masih belum mendapatkan haknya sebagaimana yang dimaksud dalam Perda No.2 Tahun 2008 pasal 20 ayat 1. Keinginan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti manusia pada umumnya tidak terpenuhi seutuhnya. Di dalam salah satu surat kabar menyatakan

bahwa "Perusahaan-perusahaan yang ada di Surakarta khususnya sebagian besar memiliki syarat yang menegaskan bahwa calon pegawai atau karyawan harus tidak cacat fisik maupun non fisik". (Joglosemar, 3 September 2013)

Padahal secara garis besar kesuksesan kota Surakarta menerapkan aksesibilitas dalam hal pelayanan publik khususnya bidang ketenagakerjaan merupakan tolak ukur kota Surakarta menjadi kota yang ramah penyandang disabilitas. Pada semua aspek aksesibilitas baik yang fisik maupun non fisik. Dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mewujudkan kota Surakarta menjadi kota ramah penyandang disabilitas. Sikap dan tanggapan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Adapun rumusan dari penelitian ini adalah "Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan?". Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas penyandang dsabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pelayanan publik khususnya di bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Surakarta.
- b. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan bantuan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan di bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BBRSD Prof. Dr. Soeharso sebagai sarana untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan pelatihan bagi kaum disabilitas, sehingga nantinya kaum disabilitas tersebut telah teruji kemampuannya saat terjun di lapangan.
- b. Bagi Dinsosnakertrans kota Surakarta sebagai saran atau masukan untuk lebih memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di kota Surakarta.

- c. Bagi instansi perusahaan di kota Surakarta sebagai masukan akan pentingnya pemenuhan hak kaum disabilitas agar senantiasa diperhatikan dan didukung dengan adanya lapangan kerja untuk mereka.
- d. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam aksesibilitas penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tempat dilakukan penelitian ini yaitu di BBRSD Prof.Dr.Soeharso Surakarta. Sedangkan waktu dilaksanakannya penelitian ini yaitu antara bulan Septemeber 2013 sampai dengan Desember 2013.

Bentuk dari penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penulis dalam penelitian ini berusaha menyajikan data deskriptif berupa hasil wawancara yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, yang dalam hal ini ditekankan pada aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa

difabel dalam rangka kesetaraan hak memperoleh pendidikan.

Strategi yang digunakan dalam penelitian adalah tunggal terpancang. Strategi tunggal terpancang dalam penelitian ini mengandung pengertian sebagai berikut: tunggal yang artinya meneliti pada satu lokasi penelitian, yaitu Universitas Sebelas Maret Surakarta, sedangkan terpancang maksudnya bahwa dalam penelitian ini pembahasan masalah hanya terpancang (terarah) pada penyediaan aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa difabel dalam rangka kesetaraan hak memperoleh pendidikan.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen atau arsip. Teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan dalam penelitian adalah dengan *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan dan masalahnya secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat.

Teknik pengumpulan data merupakan cara operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk

memperoleh data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu penelitian dapat bergantung pada data yang diperoleh. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai alat pengambil data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumen.

Agar data yang diperoleh benar-benar valid, maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi data. Penulis dalam menganalisis data menggunakan empat komponen utama yaitu: 1. pengumpulan data, 2. reduksi data, 3. sajian data, 4. penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan prosedur di dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyusunan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam sub bab ini, menganalisis informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan sesuai dengan rumusan masalah dan selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di

atas, maka dalam penelitian ini ditemukan beberapa pembahasan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Bidang Ketenagakerjaan di Kota Surakarta

Berkaitan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, maka ada empat kriteria yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Pertama, aksesibilitas informasi. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1997 Pasal 6 ayat (6) menyebutkan bahwa :“Setiap penyandang cacat berhak memperoleh hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat”.

Dalam hal ini informasi mengenai pelatihan tersebut juga sangat penting. Berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa:

Negara-negara pihak konvensi ini mengakui hak yang sama dari semua penyandang disabilitas untuk bisa hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang setara dengan yang lainnya, dan terus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai untuk memfasilitasi penikmatan penuh atas hak ini oleh penyandang disabilitas dan keterlibatan dan partisipasi penuh mereka di dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Sehingga dalam hal ini hak informasi mengenai

ketenagakerjaan bagi kaum disabilitas bisa diakses dimanapun, salah satunya dengan media cetak dan media elektronik. Kesempatan bagi kaum disabilitas untuk mendapatkan suatu informasi terkhusus informasi mengenai ketenagakerjaan sangat terbuka lebar.

Kedua, aksesibilitas kesempatan. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1997 pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya". Tetapi dalam kenyataannya tidak semua hak mereka terpenuhi seperti yang mereka inginkan. Terbukti masih kurangnya akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan pekerjaan. Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, penulis menemukan bahwasannya penyandang disabilitas juga berhak bekerja secara formal seperti menjadi PNS tidak hanya sebagai pemusik dan tukang pijat saja. Tetapi

bekerja di kantorannya layak warga Negara Indonesia pada umumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan atas hak mendapatkan pekerjaan bagi kaum disabilitas kurang merata dan masih kurang adanya ketegasan pemerintah akan pelaksanaan UU No 4 Tahun 1997.

Ketiga, aksesibilitas penghargaan.. Seperti yang disebutkan dalam UU No 4 Tahun 1997 pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa "Setiap penyandang cacat mempunyai perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya". Dari hasil pengambilan data yang dilakukan peneliti, maka ada beberapa aspek yang menimbulkan adanya perbedaan dan persamaan pemberian interpretasi terhadap pekerja disabilitas, yaitu :

a. Masa bekerja

Salah satu wujud terimakasih sebuah perusahaan terhadap jasa pekerja yang telah lama bekerja dan mengabdikan dirinya untuk suatu perusahaan yaitu dengan cara memberikan

interpretasi berupa kenaikan gaji maupun kenaikan pangkat.

Seperti contohnya dari Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans, Bapak Triman, S.Pd, M.Sc . Beliau adalah salah satu penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan yaitu tangannya mengecil sejak ia kecil dan dulunya beliau adalah salah satu staff dari bidag sosial, karena lamanya beliau bekerja maka kenaikan pangkat dari staff menjadi kepala bidang sosial, beliau jalankan saat ini. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin ketika para penyandang disabilitas bersungguh-sungguh untuk bekerja dan seoptimal mungkin dalam melaksanakan segala rutinitas pekerjaan yang sedang dia hadapi.

b. Prestasi karir

Para penyandang disabilitas memiliki kelebihan di dalam salah satu bidang, termasuk bidang yang sedang mereka jalani di suatu perusahaan tempat mereka bekerja. Berbagai prestasi yang mereka

lakukan memberikan peluang mereka untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Interprestasi terhadap prestasi yang dilakukan pekerja penyandang disabilitas di perusahaan tempat mereka bekerja sangat member untung bagi perusahaan. Sehingga perusahaan selayaknya member penghargaan berupa kenaikan gaji maupun kenaikan pangkat.

Seperti dicontohkan oleh Bu Sriyati, beliau adalah seorang pekerja garmen di daerah Ngruki, karena keahliannya dalam membordir segala macam kain, maka perusahaan tersebut meberikan kenaikan pangkat dan disertai kenaikan gaji. Beliau dulunya hanya seorang yang membantu membuat lubang kancing baju, dan akhirnya beliau sekarang diberi kewenangan untuk memiliki sebuah ruangan khusus bordir dengan anak buah sebanyak 15 orang.

Keempat, adapun faktor – faktor diterima dan tidak diterimanya

kaum disabilitas di dalam perusahaan, sebagai berikut:

a. Faktor –faktor tidak diterimanya kaum disabilitas dalam perusahaan

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak diterimanya kaum disabilitas dalam perusahaan:

1) Faktor eksternal :

a) Kebutuhan SDM dalam perusahaan, karena hanya membutuhkan pekerja yang benar-benar mampu di dalam bidangnya.

b) Lingkungan Masyarakat

c) Fasilitas dalam perusahaan yang tidak memadai dengan pekerja difabel

2) Faktor internal :

a) Kemampuan kaum disabilitas yang kurang.

b) Kurangnya kesadaran pemilik perusahaan terhadap hak penyandang disabilitas dalam

mendapatkan pekerjaan

b. Faktor diterimanya kaum disabilitas dalam perusahaan

Beberapa faktor yang menyebabkan pekerja disabilitas di terima di suatu perusahaan :

1) Faktor eksternal:

a) Kebutuhan SDM yang mumpuni terhadap perusahaan yang sedang membutuhkan seorang pekerja yang ahli dalam bidangnya.

b) Fasilitas dalam perusahaan yang memadai akan adanya penyandang disabilitas.

c) Keadaan lingkungan masyarakat yang terkondisikan saling bantu membantu.

2) Faktor Internal :

a) Kemampuan softskill penyandang disabilitas yang diperlukan dalam salah satu bidang

yang ada di perusahaan.

- b) Kesadaran para pemilik perusahaan akan hak kaum disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

2. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Spektif Pendidikan Kewarganegaraan Winarno dan Wijianto (2010: 50) menyatakan " Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan 3 (tiga) komponen pokok sebagai kompetisi peserta didik agar memiliki *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic values / disposition* (nilai/karakter kewarganegaraan) dan *civic skill* (ketrampilan kewarganegaraan)".

- 1) *Civic Knowledge* berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara
- 2) *Civic Values/Disposition* berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari seorang warga Negara baik secara pribadi maupun public.

- 3) *Civic Skill* berkenaan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh warga Negara bagi kelangsungan bangsa dan Negara. *Civic Skill* meliputi: ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi

Hak para penyandang disabilitas juga termasuk *Civic Skill* yang di dalamnya terdapat *Participation Skill*. Di dalam *participatory civic skill* atau ketrampilan partisipatif mengandung makna ketrampilan mempengaruhi jalannya pemerintahan, pengambilan keputusan publik, berkoalisi, mengelola konflik dan sebagainya. Salah satu dari itu adalah pengambilan keputusan publik dimana mereka berhak mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa ikut andil dalam pembangunan Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik ketenagakerjaan di kota Surakarta sudah baik tetapi

kurang maksimal. Dari ketiga aksesibilitas yaitu: aksesibilitas informasi, aksesibilitas kesempatan, dan aksesibilitas penghargaan yang paling kurang maksimal adalah aksesibilitas informasi. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya perusahaan yang mencari pekerja penyandang disabilitas. Sehingga untuk informasi tentang ketenagakerjaan yang didapat oleh penyandang disabilitas, kebanyakan dari masyarakat sekitar. Sehingga peran pemerintah untuk mensosialisasikan suatu perusahaan ke penyandang disabilitas sangat kurang maksimal.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak diterimanya kaum disabilitas dalam perusahaan:

1. Faktor eksternal :
 - d) Kebutuhan SDM dalam perusahaan
 - e) Lingkungan Masyarakat
 - f) Fasilitas dalam perusahaan yang tidak memadai dengan pekerja difabel
2. Faktor internal :
 - c) Kemampuan kaum disabilitas yang kurang sesuai dengan bidang yang ada dalam perusahaan tersebut.

d) Kesadaran pemilik perusahaan yang sangat kurang terhadap hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan

Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan pekerja disabilitas di terima di suatu perusahaan :

1. Faktor eksternal:
 - d) Kebutuhan SDM yang mumpuni terhadap perusahaan yang sedang membutuhkan seorang pekerja yang ahli dalam bidangnya.
 - e) Fasilitas dalam perusahaan yang memadai akan adanya penyandang disabilitas.
 - f) Keadaan lingkungan masyarakat yang terkondisikan saling bantu membantu.
2. Faktor Internal :
 - c) Kemampuan softskill penyandang disabilitas yang diperlukan dalam salah satu bidang yang ada di perusahaan.
 - d) Kesadaran para pemilik perusahaan akan hak kaum disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

SARAN

Berdasar hasil kesimpulan atas aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik bidang ketenagakerjaan di kota Surakarta, peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Surakarta perlu menerapkan sanksi tegas terhadap siapapun yang mendiskriminasi penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 4 Tahun 1997 tentang Hak Kaum Disabilitas.
2. Kesadaran bagi pemilik perusahaan juga harus ditingkatkan terhadap hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan menerapkan system 1 : 100, yang artinya setiap perusahaan yang memiliki pekerja minimal 100 orang, maka harus mempekerjakan 1 karyawan disabilitas (UU No 4 Tahun 1997).
3. Penyandang disabilitas harus berperan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
4. Masyarakat kota Surakarta ikut mendukung dan saling memberikan motivasi untuk kaum disabilitas untuk produktif dan berpartisipasi dalam persaingan mencari pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. *Undang-Undang Dasar tahun 1945*. Bandung : Fokus Media
- _____.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwijosusilo, Kristyan. 2011. Memaksimalkan Aksesibilitas Penyandang Cacat Dalam Pelayanan Publik. *Spirit Publik*, 7 (1), 29 - 44.
- Efendi, Mohammad. 2006. *Pengantar Pedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hadenius, Axel. 2003. *Hak dan pembangunan dalam Masyarakat*, Bandung : Nesa Pres
- Hadjikakou. dkk. 2010. The Experiences of Students with Mobility Disabilities in Cypriot Higher Education Institutions: Listening to their voices. *International Journal of Disability, Development and Education*, 57

(4),403 - 426.
<http://www.tandfonline.com/toc/cijd20/57/4>.

Diakses pada tanggal 30 Mei 2012 jam 12.45 WIB.

Hardaniwati. dkk. 2003. *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta : Pusat Bahasa.

Hasbullah. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil, C. S. T., dan S. T. Kansil, Christine. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Winarno dan Wijianto. 2010. *Ilmu Kewarganegaraan*. Surakarta: UNS Pers

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
(Studi di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo
Kec. Sleman Kab. Sleman Yogyakarta)**

Armaidly Armawi

Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

E-mail : marsigit@yahoo.com

Abstract. *This research aims to explain community empowerment through the development of desa wisata, the constraints faced in through the development of desa wisata and the implications of through the development of desa wisata to the family economic resilience. The method used in this research was descriptive qualitative, data collection techniques used were observation, in-depth interviews (in-depth interview), literature study and documentation. As a source of data was the community of Desa wisata Brayut which selected using purposive sampling technique. The survey results revealed that community empowerment through the development of Desa Wisata Brayut done with the partnership model which was implemented by each of the actors, ie government, private and community-oriented public participation. The stages of development programs ranging from planning to evaluation of desa wisata programs continued with the strategy of strengthening the potential that was owned by the community so as to produce the independence that was and economic benefits of community empowerment through the development of desa wisata which has implications for the family economic resilience. The implications for family economic resilience of Brayut resident which were involved in the development of desa wisata can be seen from the increase in economic income of households. The informant family economic resilience of the poor category have increased incomes above poverty line set by the BPS of Sleman district of Rp 288.048,00 (two hundred and eighty-eight forty-eight rupiah). Similarly, based on the comparison between the total expenditure of the family informant with the poor criteria which given Sajogyo unknown the expenditure number of the family of informant greater that if the expenditure of rural households below 320 Kg rate of rice/person/year so it can be seen that the development of desa wisata able to act as a forming family economic resilience.*

Key words: *empowerment, family, economic resilience*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa memegang peranan penting karena merupakan bagian tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa, terutama pemerintah daerah yang mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya dengan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Saat ini pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan perubahan yang cukup signifikan, terutama berhubungan antarpelaku pembangunan, pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Melalui paradigma ini masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan. Hadirnya paradigma ini berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada kelompok kurang mampu untuk

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Di samping itu masyarakat kurang mampu juga diberikan kesempatan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Merebaknya paradigma pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan *good governance* (Sulistiyani, 2004:75)

Berkaitan dengan pembangunan pedesaan maka pemerintah terus mendorong paradigma pemberdayaan salah satunya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata agar lebih berdaya, mandiri, memiliki inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan aktivitas dan kemajuan perekonomian masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dengan tujuan mengurangi dan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru sebagai wisata alternatif agar dapat

mendatangkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, salah satunya dengan pengembangan desa wisata. Pada tahun 2012 telah terdapat 569 desa yang dikembangkan menjadi desa wisata, dengan bantuan dana Rp 150 juta setiap desa dari target 960 desa yang akan dikembangkan menjadi desa wisata, sedangkan pada tahun 2014, ditargetkan terdapat dua ribu desa wisata. (<http://www.budpar.go.id/budpar/asp/detil.asp?c=16&id=814> diakses tanggal 25 April 2014).

Pengelolaan potensi desa wisata dengan baik diharapkan dapat mendorong pembangunan kepariwisataan yang berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata selain dapat untuk mengeksplorasi sumberdaya yang dimiliki oleh desa, juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Munculnya berbagai desa wisata yang mempunyai karakteristik khas telah menciptakan peluang-peluang usaha misalnya *homestay*, angkutan wisata dan biro perjalanan sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk setempat. Banyaknya

pengunjung yang datang ke Desa Wisata Brayut akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang pada akhirnya memberikan implikasi terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Berangkat dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan mendasar sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo Kecamatan Sleman ?
- 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo Kecamatan Sleman ?
- 3) Bagaimana Implikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga ?

Rahman (2009:93) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk mengaktualisasikan semua potensi dan sumber daya yang sudah dimiliki masyarakat dan

menekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Suyanto (2011:123-139) menyoroti rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses CBT (*Community Based Tourism*) disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengertian pemberdayaan masyarakat terhadap pariwisata. Arsanti (2012:43) menjelaskan peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengembangan desa wisata memerlukan peran serta *stakeholder* yang berfungsi sebagai wadah untuk berkoordinasi dengan masyarakat dan bersama-sama melakukan kerjasama pengembangan desa wisata.

Menurut Papilaya (2001:42) pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat (*capacity building*) dan memberdayakan sumberdaya

yang ada. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Sumodiningrat 1997: 164-165).

Pada dasarnya pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk melakukan *matching* dan *adjustment* yang terus menerus antara sisi *supply* dan *demand* kepariwisataan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah ditentukan (Nuryanti, 1994). Nuryanti (1993:2) dalam *Concept, Perspective and Challengers*, mendefinisikan pariwisata pedesaan sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sedangkan menurut Muliawan (2008: TT) Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan

maupun kehidupan sosial kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana untuk menerima kunjungan wisatawan. Desa wisata adalah suatu wilayah bagian dari kewilayahan yang lebih besar yang dijadikan tempat wisata alternatif karena potensi wisatanya. Desa Wisata Brayut merupakan satu dusun bagian dari wilayah administratif Desa Pandowoharjo yang dijadikan tempat wisata alternatif karena potensi wisatanya.

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan bagian dari ketahanan ekonomi di mana terdapat dinamika, potensi dan kondisi untuk mempertahankan kesinambungan ekonomi keluarga. Semakin adil distribusi pendapatan dan partisipasi dalam memproduksi pendapatan keluarga hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi semakin baik dan dengan terjaminnya pula pencukupan barang dan jasa yang penting sesuai kebutuhan keluarga semakin tinggi pula ketahanan ekonomi keluarga (Lemhannas, 1997; 62). Ketahanan ekonomi keluarga lebih lanjut dikemukakan oleh

Sudibyo (1995) yaitu semakin jauh suatu perekonomian dari garis kemiskinan, semakin tinggi tingkat ketahanannya. Jarak dari kemiskinan ini bisa diukur dengan proporsi penduduk yang berada di bawah dan di atas garis kemiskinan, atau dengan jarak pendapatan perkapita dari tingkat pendapatan perkapita pada garis kemiskinan (Amal dan Armawi, 1995: 136).

Mengukur ketahanan ekonomi keluarga tidak lepas dari standar garis kemiskinan (*power line*). Garis kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Badan Pusat Statistik (2012:14) dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS untuk Kabupaten Sleman sebesar Rp. 288.048,00 (dua ratus delapan puluh delapan empat puluh delapan rupiah).

Garis kemiskinan Sajogyo diukur berdasarkan konsumsi beras pertahun. Menurut Sajogyo terdapat tiga ukuran kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan miskin sekali atau melarat yang diukur berdasarkan konsumsi perkapita pertahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg, 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg, dan 180 kg untuk daerah pedesaan (Faturrohchman dan Molo, 1995; 10).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebagai suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988:63). Untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai gejala sosial yang terjadi digunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah sebagai "Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya" (Moleong, 2012:4). Hasil penelitian ini mendeskripsikan fakta-fakta serta fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya.

Untuk memperoleh data informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data melalui teknik Pengumpulan Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan cara observasi secara langsung di Desa Wisata Brayut dan melakukan wawancara terhadap informan yang di pilih dengan teknik *purposive sampling* di antaranya dari unsur pemerintahan, ketua Pengelola Desa Wisata Brayut, Unsur pemuda (Karang Taruna) dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman) Menurut Miles dan Humberman (1992) tahapan analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau verifikasi (Bungin: 2003:53).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata Brayut

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Brayut Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Brayut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa desain dan implementasi Desa Wisata Brayut dapat memberikan gambaran tentang proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Pada tahun 1997 pemuda dusun Brayut bernama Budi Utomo yang berprofesi sebagai pengajar bahasa Indonesia di salah satu lembaga pendidikan

bahasa asing mengajak mahasiswanya yang berasal dari negara lain untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Dusun Brayut. Namun sejak tragedi Bom Bali I tahun 2002 kegiatan wisata alternatif di dusun Brayut praktis terhenti selanjutnya pada tahun 2003 Aloysius Sudarmadi mengajak pemuda-pemudi Dusun Brayut untuk mengaktifkan kembali pariwisata alternatif di Dusun Brayut. Pada bulan Agustus tahun 2004, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman meresmikan Dusun Brayut sebagai Desa Wisata dengan kantor sekretariat di Rumah Joglo milik keluarga (alm.) Mertorejo.

Visi Desa Wisata Brayut yakni melestarikan dan menggali nilai-nilai kearifan lokal sedangkan misi yang diemban adalah membangun perilaku masyarakat Sapta Pesona : aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan, membangun kemitraan antarwarga masyarakat dan menciptakan peluang usaha jasa pariwisata berbasis masyarakat. Desa Wisata Brayut telah menyiapkan 19 *homestay* yang sanggup menampung 110 orang yang siap melayani wisatawan yang datang berkunjung dengan harga terjangkau dengan besaran

perorangnya adalah Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari. Fasilitas yang akan didapat di *homestay* adalah Cenderamata yang tersedia di Ani-Ani *Jewellery and Craft* menyediakan cenderamata yang umumnya aksesoris wanita berupa cincin, kalung, gelang dan gantungan kunci. Mayoritas berbahan manik-manik, dan sebagian dari logam serta kayu.

Harga belinya berkisar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Atraksi wisata merupakan potensi desa wisata yang paling banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Atraksi wisata yang telah di kemas dalam paket wisata ini merupakan kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) yang sudah ada sejak dulu.

Daftar Kegiatan Wisata

No.	Nama Kegiatan	Harga Paket Wisata
1	2	3
1.	Pertanian meliputi mengolah tanah, menanam padi.	Rp. 8.000 per orang
2.	Kesenian Karawitan	Rp. 8.000 per orang
3.	Kesenian Tari	Rp. 8.000 per orang
4.	Membatik	Rp. 20.000 per orang
5.	Hadrah	Rp 300.000 /tampil
6.	Kesenian Jathilan/ Kuda Lumping	Rp. 500.000 /tampil
7.	Permainan Tradisional	Rp. 3.500 per orang
8.	Peternakan	Rp. 2.000 per orang
9.	Memasak (membuat kue tradisional <i>legondo</i> atau <i>cemplon</i>)	Rp. 8.000 per orang
10.	Mengenal/ Keliling Desa Wisata Brayut (mengunjungi <i>joglo</i> , makam Kyai brayut)	Rp. 1.000 per orang
11.	Menangkap Ikan	Rp. 4.000 per orang
12.	Acara <i>Kenduri</i>	Rp. 18.000 per orang
13.	Kegiatan Menjanur	Rp. 3.000 per orang
14.	Budidaya cacing	Rp 8.000 per orang
15.	Budidaya jamur	Rp 8.000 per orang

Sumber : Diolah dari Data Primer, 2014.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata

Tiga aktor yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Brayut. Pemerintah berperan sebagai dinamisor dan fasilitator di mana sebagai dinamisor pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator maka pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana baik melalui pendampingan maupun permodalan. Pada sektor permodalan Desa Wisata Brayut pernah menerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2009, 2010 dan 2011 dengan nilai total kurang lebih Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi peralatan pemandu wisata dan persewaan wisata, fasilitasi peralatan kuliner, fasilitasi *homestay* dan pengembangan amenities lainnya.

Swasta sebagai salah satu *stakeholder* dalam pemberdayaan

masyarakat melalui pengembangan desa wisata berperan sebagai konsultan teknis pengembangan pariwisata, mempromosikan melalui jaringannya dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Wisata Brayut. Pengelola desa wisata sejak awal menyadari bahwa keterlibatan *stakeholder* dari pihak swasta sangat diperlukan untuk pengembangan desa wisata agar lebih baik. Kerjasama pengelola Desa Wisata Brayut tidak hanya berhenti di situ saja namun untuk peningkatan sumberdaya, pengelola desa wisata juga bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan pengembangan desa wisata seperti pihak hotel melalui PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) dan konsultan pariwisata dari Stuppa Data Indonesia sebagai lembaga pusat data dan informasi pariwisata, budaya dan pembangunan selain itu bekerjasama dengan beberapa universitas di Yogyakarta.

Peran masyarakat dalam hal ini sebagai pelaku pemberdayaan, yang diimplementasikan dalam bentuk dukungan dan partisipasi dalam berbagai tahapan program

pemberdayaan. Masyarakat secara umum adalah pelaku pemberdayaan sehingga diperlukan agen pembaharu (Sulistiyani, 204:114). Agen pembaharu ini berperan sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). Agen Pembaharu berperan untuk menumbuhkembangkan, penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Kader Pemberdaya Masyarakat dalam hal ini adalah Pengelola Desa Wisata Brayut dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, dapat berhasil apabila masyarakat mendukung dan ikut berpartisipasi secara langsung dalam berbagai tahapan program pemberdayaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program desa wisata. Menurut Muslim (2007: 94) bentuk partisipasi dalam tiap proses pembangunan mulai dari: 1). Keterlibatan pada identifikasi masalah, 2). Proses perencanaan,

3). Pelaksanaan proyek pembangunan. 4). Evaluasi, 5). Monitoring dan 6). Mitigasi. Mengacu pada teori tersebut, dapat di lihat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Brayut sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat pada identifikasi masalah

Berdasarkan penelitian keterlibatan masyarakat dalam ikut melakukan identifikasi masalah masih sangat kecil. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung oleh pengelola desa wisata untuk mengetahui peluang, potensi dan hambatan dalam pengembangan desa wisata, sehingga cenderung tidak adanya komunikasi antara pengelola desa wisata dengan masyarakat.

2. Proses perencanaan

Penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak dilakukan bersama seluruh warga masyarakat namun dilakukan bersama perwakilan dari Kelompok Karang Taruna dan PKK yang tergabung dalam Pengelola Desa Wisata. Perencanaan dibuat oleh pengelola desa wisata sebagai agen pembaharu yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku/subjek

diikutsertakan dalam pelaksanaan/pengelolaan program desa wisata. Proses sosialisasi perencanaan yang telah di buat oleh pengelola desa wisata dilakukan secara tidak langsung artinya hanya tokoh-tokoh masyarakat atau ketua-ketua kelompok masyarakat saja yang diberitahu rencana pengelola desa wisata untuk mengembangkan konsep desa wisata.

3. Proses Pelaksanaan

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek tapi juga berperan sebagai subjek sehingga dapat menikmati keuntungan yang optimal dari pengelolaan pariwisata. Pada proses pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Brayut dapat di ketahui bahwa masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan seperti *homestay*, cenderamata, dan atraksi wisata yang meliputi pertanian, kesenian kerawitan, kesenian tari, membatik, hadrah, kesenian Jathilan/ Kuda Lumping, permainan tradisional, peternakan, memasak (kuliner tradisional), menangkap ikan, acara kenduri, budidaya cacing, merangkai janur, budidaya jamur.

4. Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus yang selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Berkaitan dengan pengembangan desa wisata maka pengelola desa wisata berkewajiban untuk menyampaikan laporan tentang perkembangan Desa Wisata Brayut kepada masyarakat sebagai upaya transparansi organisasi.

Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi secara bersama-sama tidak dilakukan sehingga masyarakat tidak dapat memonitor perkembangan desa wisata. Evaluasi hanya dilakukan intern pengelola desa wisata dan pada kasus-kasus tertentu maka pengelola melakukan evaluasi bersama dengan pemilik *homestay* dan pelaku kegiatan, namun tidak dilakukan secara periodik. Evaluasi terhadap atraksi wisata cenderung tidak dilakukan oleh pengelola desa wisata kecuali terdapat hal-hal yang penting sehingga kegiatan atraksi wisata seolah-olah hanya sekedar atraksi yang biasa dilakukan.

5. Monitoring

Monitoring atau pemantauan merupakan kesadaran

(*awareness*) masyarakat tentang apa yang ingin diketahui tentang proses pengembangan desa wisata. Aktivitas evaluasi dan monitoring Desa Wisata Brayut belum dilakukan secara kontinu dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku pemberdayaan, namun dilakukan secara langsung dengan bertanya kepada ketua pengelola desa wisata.

6.Mitigasi

Kegiatan mitigasi dalam hal ini merupakan tindakan mengurangi dampak negatif dari pengembangan desa wisata terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Secara umum pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Dusun Brayut dapat dikatakan cukup berhasil. Indikatornya adalah kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pengembangan desa wisata untuk ikut serta dalam atraksi wisata yang direncanakan oleh pengelola desa wisata. Walaupun partisipasi aktif masyarakat tersebut baru sekitar 9.6 %, sehingga dari dimensi sosial terdapat sebagian besar warga masyarakat yang tidak atau belum ikut berpartisipasi, timbul perasaan cemburu namun penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata

menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dusun dan menumbuhkan persaudaraan diantara sesama warga Brayut melalui budaya berkelompok dengan membentuk ikatan-ikatan kolektif. Selain daripada itu, hal yang paling vital dari hasil pengembangan Desa Wisata Brayut dampak ekonomi yang dirasakan oleh warga masyarakat yang berpartisipasi.

Usman (2003 : 40-47) menyatakan strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah memperkuat daya. Upaya pokok untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) salah satunya adalah dengan peningkatan taraf pendidikan. Pengelola Desa Wisata Brayut bekerja sama dengan *stakeholder* yang ada dalam rangka meningkatkan sumber daya masyarakat maka secara rutin dan bertahap mengadakan program pendidikan dan latihan sumber daya manusia.

Usaha memperkuat potensi masyarakat pertama kali dilaksanakan sejak tahun 2009 menggunakan program PNPM Mandiri Pariwisata. Tema-tema pendidikan dan latihan yang

menyangkut manajemen pengelolaan desa wisata dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan semangat warga desa wisata agar mampu meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan bagi wisatawan, selain itu warga desa wisata dapat menemukan dan mengenali potensi wisata yang bisa dikembangkan di desa wisata. Parker (2005:27) mengatakan bahwa kemandirian dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak bergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh. Pada tahapan ini ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya (Sulistiyani, 2004:84).

Mengacu pada teori tersebut sesuai perspektif pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata maka kemandirian Desa Wisata Brayut dapat ditelaah dari kemampuan Pengelola Desa Wisata untuk melepaskan diri dari ketergantungan menerima bantuan *stakeholder* dalam mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Pengelola Desa Wisata Brayut dengan

menggunakan sarana yang ada mampu menumbuhkan potensi desa wisata dan mampu mempromosikan secara mandiri. Kemandirian ini juga telah diakui oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab. Sleman dengan memasukkan Desa Wisata Brayut sebagai Desa Wisata Mandiri ini ditandai dengan mempunyai pangsa pasar sendiri, dapat melakukan promosi sendiri dan selalu siap dikunjungi kapan pun wisatawan datang.

Kendala Dalam Pengembangan Desa Wisata

Untuk memanfaatkan dan mengolah potensi desa wisata diperlukan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Dalam beberapa wawancara, peneliti menerima penjelasan bahwa tidak semua warga bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa wisata dengan alasan tidak mampu. Rendahnya faktor kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa wisata menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor ini dipengaruhi kemampuan diri yang merasa kurang sehingga timbul perasaan rendah diri karena tidak mempunyai kemampuan.

Sikap dan Perilaku

Sikap dan perilaku masyarakat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang muaranya pada tingkat pemahaman dan perasaan membutuhkan aktualisasi diri. Sikap dan perilaku masyarakat yang kurang aktif bahkan cenderung apatis karena masih terdapat sikap dan perilaku masyarakat Brayut yang masih meremehkan pengembangan desa wisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Pemahaman Tentang Pengembangan Desa Wisata

Konsep pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan masyarakat lokal menjadi motor utama penggerak perkembangan Desa Wisata Brayut. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat maka terdapat tingkatan-tingkatan kesadaran dan pemahaman terhadap konsepsi pemberdayaan sehingga masyarakat merasa membutuhkan kemandirian. Sosialisasi yang kurang masif masih menjadi kendala dari pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata menjadi penting untuk memuaskan wisatawan. Desa Wisata Brayut sebagai daerah tujuan wisata alternatif menurut pengamatan peneliti masih kekurangan sarana dan prasarana.

Kekurangan tersebut salah satunya adalah sarana gedung atau rumah yang dapat di pakai untuk atraksi kuliner dan maupun prasarana dalam atraksi wisata seperti perlengkapan kegiatan membuat dan resume atraksi wisata.

Transparansi

Pengelola Desa Wisata Brayut terlihat masih kurang transparan dalam hal bantuan *stimulant* pemerintah. Strategi transparansi bantuan dapat dilakukan pada saat diadakannya pertemuan rutin warga untuk membahas perencanaan dan pelaksanaan desa wisata beserta anggaran yang di perolehnya. Pemanfaatan dusun sebagai tujuan wisata membuka peluang untuk pembangunan dusun melalui bagi hasil dari penghasilan desa wisata. Keterbukaan dan transparansi menjadi bagian penting dalam organisasi yang mencari profit untuk menimbulkan rasa memiliki di antara warga masyarakat

sendiri baik terhadap organisasi desa wisata maupun terhadap dusun Brayut yang dimanfaatkan potensinya sebagai tujuan wisata. Dana Pengembangan

Desa Wisata Brayut mengandalkan penghasilan dari kunjungan wisatawan yang datang berkunjung. Dana pengembangan diambil dari 10% dari penghasilan bersih kunjungan wisatawan. Pemanfaatan penghasilan dari kunjungan wisatawan secara efektif dapat memberikan dana pengembangan desa wisata. Dukungan dana dari pemerintah daerah tidak ada sehingga promosi mandiri yang dilakukan pengelola desa wisata menjadi ujung tombak untuk menggaet wisatawan.

Koordinasi Dan Komunikasi

Pengelola Desa Wisata Brayut masih kurang komunikasi dengan warga masyarakat dalam bentuk rapat-rapat untuk membahas pengembangan desa wisata ke depan maupun evaluasi-evaluasi pelaksanaan pelayanan wisata. Koordinasi dan komunikasi sebaiknya dilakukan sejak pertama kali penancangan desa wisata dengan cara berinteraksi kepada warga masyarakat melalui pertemuan-pertemuan seperti rapat dusun membicarakan hal-hal yang

berkaitan dengan kegiatan desa wisata maupun rencana-rencana pemberdayaan.

Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga

Manfaat ekonomi yang warga rasakan melalui pengembangan desa wisata walaupun belum secara nyata mengangkat tingkat perekonomian warga namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pengembangan desa wisata memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi keluarga, yang pada akhirnya memberikan ketahanan ekonomi keluarga. Hasil wawancara dengan informan di peroleh data bahwa informan mempunyai pendapatan dari luar desa wisata per bulan ditambahkan dengan pendapatan dari desa wisata mencapai Rp 3.937.750 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) apabila dikurangi dengan total pengeluaran per bulan sebesar Rp 1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah), maka diperoleh hasil Rp 2.823.750 (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Informan kedua dengan

pendapatan total dari luar desa wisata dan desa wisata yang berjumlah Rp 1.270.833,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dikurangi dengan pengeluaran per bulan sebesar Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), maka diperoleh hasil Rp 876.833,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Selanjutnya, selisih tersebut di atas apabila dibandingkan dengan standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS untuk Kabupaten Sleman tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 288.048,00 (dua ratus delapan puluh delapan empat puluh delapan rupiah) per kapita per bulan, maka dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan yang diterima kedua informan tersebut lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata dapat memberikan ketahanan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat di Dusun Brayut.

Dalam pada menurut kriteria Sajogyo yang disebut dengan miskin, jika pengeluaran rumah tangga pedesaan di bawah 320 kg nilai tukar beras/orang/tahun atau 26,6 kg/orang/bulan. Jika dirupiahkan

dengan harga beras medium saat ini Rp 8.858,00, maka menghasilkan Rp.236.213,00/orang/bulan (<http://www.deptan.go.id/> di akses tanggal 19 Juni 2014). Perkiraan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak empat orang/keluarga, maka pengeluaran total sebesar Rp.944.852,00/keluarga/bulan untuk disebut miskin. Berdasarkan perbandingan antara jumlah pengeluaran keluarga informan pertama dengan kriteria yang diberikan Sajogyo, maka didapat Rp 1.114.000,00 berbanding Rp.944.852,00. Pengeluaran para informan lebih besar dari kriteria miskin. Informan kedua dengan pengeluaran sebesar Rp 394.000,00 per bulan dibandingkan pengeluaran total Rp.236.213,00/orang/bulan, maka informan tidak dapat disebut miskin. Oleh karena itu, penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata mampu berperan sebagai pembentuk ketahanan ekonomi keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa

wisata dilakukan dengan model kemitraan yang dilaksanakan oleh para masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat yang berorientasi pada partisipasi masyarakat melalui berbagai tahapan program pemberdayaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program desa wisata dilanjutkan dengan strategi memperkuat potensi atau daya yang di miliki oleh masyarakat sehingga menghasilkan kemandirian yang ditandai dengan pemasaran/promosi dan manfaat ekonomis pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

2. Terdapat empat kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, yaitu; (a) sumber Daya Manusia yang meliputi sumber daya manusia terlatih, sikap dan perilaku masyarakat serta tingkat pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata masih rendah, (b) sarana dan prasarana, (c) transparansi, yang meliputi transparansi bantuan dan pendapatan, (d) dana pengembangan, serta (e) komunikasi dan koordinasi.

3. Ketahanan ekonomi keluarga dilihat dari tingkat pendapatan

dan pengeluaran rumah tangga informan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan konsumsi makanan/minuman (pangan) dan pemenuhan kebutuhan bukan makanan (nonpangan) kemudian dihubungkan dengan standar garis kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh BPS dan Sajogyo. Berdasarkan standar garis kemiskinan Kabupaten Sleman sebesar Rp 288.048,00 (dua ratus delapan puluh delapan empat puluh delapan rupiah) per kapita per bulan maka dapat kita ketahui bahwa jumlah pendapatan yang diterima informan tersebut lebih besar, hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata dapat memberikan ketahanan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat di Dusun Brayut. Demikian pula berdasarkan perbandingan antara jumlah pengeluaran keluarga informan dengan kriteria yang diberikan Sajogyo diketahui jumlah pengeluaran keluarga informan lebih besar dari kriteria miskin yang ditetapkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengembangan desa wisata mampu berperan sebagai pembentuk ketahanan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, I dan Armawi, A, 1995, *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arsanti, V, 2012, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Dusun Sambi Desa Pakembinangun Kec.Pakem Kab.Sleman", *Tesis*, UGM.
- BPS Kab. Sleman, 2013, *Indeks Gini Kabupaten Sleman 2012*, BPS Kab. Sleman.
- Bungin, B, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Faturochman dan Molo, M, 1995, *Kemiskinan dan Kependudukan di Pedesaan Jawa, Analisis Data Susenas 1*, Yogyakarta: UGM Press.
- Lemhanas, 1997, *Ketahanan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Milez, M. B. dan Huberman, A. M., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi, Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L.J., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ed.revisi), Bandung: PT Rosda Karya.
- Muliawan, H, 2008, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep dan Implementasi*, tanpa kota: tanpa penerbit.
- Muslim, A, 2007, "Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. VIII, No. 2 Desember 2007.
- Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Nuryanti, W, 1993, "Concept, Perspective and Challengers", dalam *Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Papilaya, 2001, *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: CV. Sinar Dunia.
- Parker, D. K., 2005, *Menumbuhkan kemandirian dan harga diri*, Jakarta: Prestasi Surabaya.
- Rahman, A.F., 2009, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Kembang Arum", *Tesis* UGM.
- Sulistiyani, AT, 2004, *Kemitraan dan Model-Model*

- Pemberdayaan*, Yogyakarta:
Gava Media.
- Sumodiningrat, G, 1999,
*Pemberdayaan masyarakat
dan Jaringan Pengamanan
Sosial*. Jakarta: Gramedia .
- Suyanto, MRP, 2011, "Kualitas
Peran dan Kapasitas
Keterlibatan Masyarakat
Sebagai Faktor Pendukung
Keberdayaan Masyarakat
Dalam Pengembangan
Kepariwisataaan, Studi Kasus
Desa Wisata Kebonagung,
Kabupaten Bantul", DIY,
Tesis UGM.
- Usman, S, 2003, *Pembangunan
Dan Pemberdayaan
Masyarakat*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
- http://www.bps.go.id/menutab.php?tab=4&tabel=1&kat=1&id_subyek=05&ist=1&var=P

STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS BUDAYA LOKAL

Mukhamad Murdiono

Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat e-mail: masmoer_uny@yahoo.com

ABSTRACT. *Indonesia is a multicultural nation, therefore it is important to develop education in accordance with the conditions of a multicultural society. Appropriate education for development in a multicultural society is multicultural education. In a study of multicultural education needs to be increased awareness that all learners have special characteristics as age, religion, gender, social class, ethnicity, race, or culture specific characteristic inherent in each. Multicultural education states that all students should have equal opportunities to learn in school. The difference that exists between them is a necessity, and that difference must be received in a reasonable not to discriminate. In order to achieve the goal of multicultural education is necessary to develop appropriate learning strategies and appropriate, one of which was based learning local culture. Local culture is a culture that is direct, close, and physically is all around us. The local culture is usually introduced by the family and close relatives. Every region in Indonesia has a specificity that may be the identity of the area. Uniqueness of it could be because of race, history, location, religion, and beliefs espoused. Diversity and distinctiveness can be used by teachers in developing multicultural education.*

Keywords: Learning, Multicultural, Local Culture

PENDAHULUAN

Pendidikan multikultural menjadi tema aktual dan menarik untuk diperbincangkan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai

bangsa yang majemuk dari sudut pandang budaya, Indonesia memiliki tantangan besar bagaimana menjaga kemajemukan tersebut agar menjadi potensi yang dapat menguntungkan bangsa Indonesia. Selain itu, bangsa

Indonesia juga harus dapat menjaga agar kemajemukan tersebut tidak memicu terjadinya konflik. Disadari atau tidak benih-benih konflik akan dengan mudah tumbuh di tengah masyarakat yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi.

Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk (multikultur), maka perlu mengembangkan jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultur. Jenis pendidikan yang cocok untuk dikembangkan dalam masyarakat yang multikultur adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan multikultural dapat muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktek yang direncanakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok.

Di persekolahan (SD, SMP, dan SMA) pendidikan multikultural belum merupakan mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri, melainkan masih terintegrasi dengan mata

pelajaran lain seperti Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian merupakan salah satu bagian yang harus ada dalam pengembangan kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian mencakup kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk dapat mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah, seorang guru (khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan) harus mampu mengelola dan merencanakan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pendidikan multikultural dapat tercapai. Salah satu strategi yang dapat

dikembangkan dalam pembelajaran adalah melalui pemanfaatan budaya lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran pendidikan multikultural. Pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran pendidikan multikultural sangat berguna bagi pemaknaan proses dan hasil belajar, karena dengan cara ini peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual. Selain itu, melalui pengintegrasian budaya lokal dalam pembelajaran pendidikan multikultural dapat mengembangkan dan mengukuhkan budaya nasional yang merupakan puncak-puncak budaya lokal dan budaya etnis yang berkembang.

PEMBAHASAN

Strategi Pembelajaran

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam dunia kemiliteran. Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi dapat diartikan sebagai "ilmu kejenderalan" atau "ilmu kepanglimaannya". Strategi berbeda dengan taktik. Strategi dalam dunia kemiliteran berarti cara yang paling efektif untuk memenangkan perang. Sedangkan taktik berhubungan

dengan pertempuran yang harus dilakukan untuk melaksanakan peperangan itu. Jadi strategi adalah ilmu peperangan, sementara taktik adalah ilmu pertempuran. Strategi dalam dunia pendidikan (pembelajaran) diartikan sebagai rencana kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan metode pengajaran adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode pengajaran adalah alat untuk mengoperasionalkan apa yang direncanakan dalam strategi (Gulo, 2008: 3-4). Menurut Djamarah (2002: 9) konsep dasar strategi belajar mengajar meliputi: menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku, menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih metode dan teknik belajar mengajar, dan menerapkan norma serta kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), kedudukan guru dan dosen dihargai sebagai tenaga profesional. Seorang pekerja profesional, khususnya guru harus dapat dibedakan dari seorang teknisi, karena di samping menguasai sejumlah

teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional juga ditandai adanya *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari objek kerjanya. Artinya, seorang pekerja profesional atau guru harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana dan lebih mantap dalam menyikapi serta melaksanakan pekerjaannya. Kalau seorang teknisi memiliki kompetensi yang lebih bersifat mekanik dalam arti sangat mementingkan kecermatan, maka seorang guru sebagai tenaga profesional kependidikan harus memiliki kompetensi yang ditandai serentetan diagnosis, rediagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus (Sardiman, 2007: 133). Guru seharusnya menyadari, bahwa mengajar merupakan suatu pekerjaan yang tidak sederhana dan mudah. Mengajar sifatnya sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa mengajar di sekolah berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mendampingi peserta didik menuju kesuksesan belajar atau kedewasaan. Aspek psikologis

menunjuk pada kenyataan bahwa peserta didik yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga menuntut materi, metode, dan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lainnya (Naim, 2009: 15).

Sebagai tenaga profesional guru harus memiliki sejumlah kompetensi, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi-kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (1) UUGD). Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik dapat merancang pembelajaran dengan baik, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami kompetensi yang akan dicapai, dan dapat menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran yang dipilih (UPPL UNY, 2008: 14). Melalui pemilihan yang tepat dan

pemahaman terhadap strategi pembelajaran yang akan diterapkan, tujuan pembelajaran akan dapat dengan mudah dicapai. Strategi yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan multikultural adalah strategi yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik menjadi keniscayaan untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Ketika peserta didik pasif, ada kecenderungan untuk cepat dengan mudah melupakan apa yang telah didapatkan di kelas. Oleh sebab itu diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat informasi yang baru saja diterima oleh peserta didik (Zaini, 2007: xvii). Seorang guru harus dengan cermat memilih dan memilah strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran pendidikan multikultural, guru dapat menentukan pilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tema yang akan diberikan kepada siswa. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan strategi pembelajaran berbasis budaya

lokal. Melalui strategi ini peserta didik dihadapkan pada lingkungan dan sumber belajar yang kontekstual dan pembelajaran akan lebih bermakna.

Hakikat Pendidikan Multikultural

Futurolog John Naisbit pernah meramalkan bahwa di dunia yang terbuka akibat gelombang globalisasi terdapat kemungkinan lahirnya seribu negara dalam abad 21. Ramalan tersebut bisa saja dapat terbukti, atau sebaliknya meleset. Akan tetapi dewasa ini, disadari atau tidak dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia terdapat kecenderungan ke arah itu. Gelombang demokrasi bukan saja membawa nilai-nilai positif dalam pengertian penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), melainkan juga mengandung bahaya perpecahan suatu negara. Perpecahan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: politik, sosial, budaya, ekonomi, ras, bahkan agama. Melihat fenomena yang demikian itu, maka pendidikan di Indonesia harus peka menghadapi arus perputaran globalisasi. Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia

yang majemuk. Oleh sebab itulah, pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan itu (Mughni, 2008: vii-viii).

Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Multikulturalisme dapat dipahami sebagai sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, ras, suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultural). Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budayanya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existens*i yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Mahfud, 2008: xx).

Menurut James A. Banks (Sutarno, 2008: 20) pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang berbeda akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jadi pendidikan multikultural mencakup tiga hal penting, meliputi: ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, gerakan pembaharuan pendidikan, dan sebuah proses pendidikan.

Dalam pembelajaran pendidikan multikultural perlu adanya peningkatan kesadaran bahwa semua peserta didik memiliki karakteristik khusus karena faktor usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua peserta didik tanpa memandang karakteristik budayanya, seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan

yang ada di antara mereka merupakan suatu keniscayaan, dan perbedaan itu harus diterima secara wajar bukan untuk membedakan. Pendidikan multikultural sebagai gerakan pembaharuan pendidikan muncul dalam berbagai bentuk, seperti: muncul sebagai bidang studi (mata kuliah) yang berdiri sendiri, program, dan dapat juga berupa praktek yang direncanakan oleh lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pendidikan multikultural sebagai sebuah proses pendidikan ditafsirkan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses menjadi. Pendidikan multikultural dipandang sebagai suatu proses yang terus menerus, bukan sesuatu yang langsung dapat tercapai.

Budaya Lokal

"Budaya" merupakan istilah yang sering digunakan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya budaya begitu dekat dengan lingkungan kita. Budaya menjadi bagian penting yang harus dipahami ketika akan membahas tentang pendidikan multikultural. Menurut Bullivant (Sutarno, 2008: 3) Tanpa memahami istilah budaya (kultur)

dengan benar, kita akan sulit memahami pendidikan multikultural secara utuh. Misalnya, ketika budaya didefinisikan sebagai warisan dan tradisi dari suatu kelompok sosial, maka pendidikan multikultural berarti mempelajari tentang berbagai (multi) warisan dan tradisi budaya. Namun jika budaya didefinisikan sebagai desain kelompok sosial untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya, maka satu tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mempelajari tentang berbagai kelompok sosial dan desain yang berbeda untuk hidup dalam masyarakat yang pluralis.

Menurut Koentjaraningrat (Sutarno, 2008: 4) dalam istilah Inggris, "budaya" adalah "*culture*", yang berasal dari kata Latin *colere* yang berarti "mengolah, mengerjakan" terutama mengolah tanah atau bertani. Hal ini berarti budaya merupakan aktivitas manusia dan menjadi ciri manusia, bukan aktivitas makhluk lain. Lebih lanjut Koentjaraningrat memerinci unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata

pencapaian hidup, serta teknologi dan peralatan. Unsur yang disebut pertama secara berurutan merupakan unsur yang lebih sukar berubah dibandingkan dengan unsur yang lain.

Sedangkan menurut Ralph Linton (Ihromi, 2006: 18) mengartikan kebudayaan sebagai cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau diinginkan. Artinya, kalau cara hidup masyarakat itu kita terapkan pada cara hidup kita sendiri, maka tidak ada keterkaitannya. Tiap masyarakat memiliki kebudayaan, bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah mahluk berbudaya serta mengambil bagian dari suatu kebudayaan. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan, meliputi: cara-cara belaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Kebudayaan merupakan cara berperilaku yang dipelajari, kebudayaan tidak tergantung dari transmisi biologis atau pewarisan melalui unsur genetis.

Budaya lokal merupakan budaya yang bersifat langsung, dekat, dan secara fisik ada di sekeliling kita. Istilah lokal merujuk pada sebuah ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Budaya lokal ini biasanya dikenalkan oleh keluarga dan kerabat dekat. Biasanya budaya lokal ini berwujud perilaku pembudayaan. Seperti perilaku maskulin (berburu) dan feminim (memasak) bukan didasarkan oleh biologis melainkan berdasarkan pada pembudayaan. Hasil penelitian antropolog menunjukkan bahwa ada suatu suku di Papua yang memberi pekerjaan maskulin seperti berburu pada perempuan dan sebaliknya memasak pada laki-laki. Sebaliknya, pada suku yang lain laki-laki berburu dan perempuan memasak. Ada juga suku yang melakukan pekerjaan itu secara bergantian, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku sebenarnya ditentukan oleh pembiasaan dan pembudayaan yang ada dan berlaku pada lokal tertentu. Disadari atau tidak dia dibesarkan dan menggunakan budaya lokal yang ada di sekitar dirinya (Sutarno, 2008: 48).

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kekhususan

yang dapat menjadi identitas daerah tersebut. Kekhasan itu bisa jadi karena ras, sejarah, lokasi, agama, dan kepercayaan yang dianutnya. Keragaman dan kekhasan ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Peserta didik diminta untuk mengakui dan mengapresiasi budaya lokalnya sendiri dan belajar mengapresiasi budaya yang ada di daerah peserta didik lainnya. Budaya tidak terletak pada etnis atau ras itu sendiri, namun lebih ditujukan pada nilai, perilaku dan produk yang khas yang melekat pada orang dan menjadi identitas etnis atau ras itu. Identifikasi pada budaya lokal tampak menonjol dan mewarnai serta menjadi ciri khas yang bisa dikenali pada orang tersebut oleh orang lain. Misalnya, seseorang dapat mengenali orang yang berasal dari Jawa atau Sumatera dari logat bicarannya sekalipun saat itu dia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Budaya lokal ini lebih kuat dibandingkan dengan budaya nasional karena dalam kesehariannya kita terbiasa menggunakan nilai-nilai yang ada dalam budaya lokal. Oleh karena itu jika pembelajaran pendidikan multikultural dapat

memanfaatkan budaya lokal, akan semakin memudahkan peserta didik untuk dapat memahami budaya orang lain.

Penerapan Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal

Sebelum pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal diterapkan, guru terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran sebagai pijakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berisi serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh guru mulai dari pengembangan rumusan tujuan pembelajaran sampai pada penilaian proses pembelajaran. Menurut Soenarya (2000: 37) kunci utama kegiatan perencanaan adalah proses perencanaan itu sendiri. Proses perencanaan merupakan cara pandang yang logis mengenai apa yang ingin dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana cara mengetahui apa yang dilakukan. Proses perencanaan adalah proses yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, namun tidak menjanjikan atau memberikan nilai-nilai tujuan, program atau arah apa pun. Proses perencanaan hanya

merupakan suatu prosedur kerja yang bersifat rasional.

Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Membuat perencanaan pembelajaran merupakan tugas guru yang utama. Rencana pembelajaran merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan pada tahapan penentuan pengalaman belajar. Guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran dalam berbagai bentuk sesuai dengan strategi pembelajaran dan penilaian yang akan digunakan. Sebagai perencana, guru hendaknya dapat mendiagnosa kebutuhan para siswa sebagai subjek belajar, merumuskan tujuan kegiatan proses pembelajaran dan menetapkan strategi pembelajaran yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan (Majid, 2005: 91).

Menurut Mulyasa (2007: 100) perencanaan pembelajaran setidaknya mencakup tiga

kegiatan, meliputi: identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki oleh seorang guru yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara kooperatif, dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Pembelajaran berbasis budaya lokal merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi dan komunikasi suatu gagasan, serta perkembangan pengetahuan. Menurut Sutarno (2008: 6) pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu: belajar tentang budaya, belajar dengan budaya,

belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Belajar dengan budaya terjadi pada saat budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar melalui budaya merupakan strategi yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Belajar berbudaya merupakan bentuk pengejawantahan budaya dalam perilaku peserta didik secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Secara lebih kongkrit desain pembelajaran yang direncanakan dalam menerapkan pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. *Pertama*, guru adalah variabel penting dalam mengajarkan materi tentang budaya. Ketika seorang guru memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan pada saat menghadapi materi rasis dalam bahan pelajaran atau mengobservasi rasisme dalam pernyataan dan perilaku siswa, maka guru dapat

memanfaatkan situasi tersebut untuk mengajarkan pelajaran penting tentang pengalaman etnis tertentu. Pengetahuan tentang kelompok etnis diperlukan untuk mengajarkan materi etnis secara efektif. *Kedua*, seorang guru harus memiliki kepekaan atau sensitivitas terhadap sikap, perilaku rasial dirinya dan pernyataan yang dibuat sekitar kelompok etnis dalam pembelajaran di kelas. Misalnya dengan pernyataan: "duduk seperti orang Indian" sebagai *stereotype* Amerika Asli atau "duduklah bersimpuh seperti orang Jawa", dan masih banyak contoh lain yang dapat dimunculkan.

Ketiga, guru dapat membawa citra positif tentang berbagai kelompok etnis. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan menayangkan majalah dinding, poster dan kalender yang memperlihatkan perbedaan rasial dan etnis dalam masyarakat. Guru harus memiliki kepekaan terhadap sikap rasial dan etnis yang dimiliki siswa, dan jangan berkeyakinan bahwa peserta didik tidak melihat ras, kelompok, dan warna kulit. Jangan mencoba untuk mengabaikan perbedaan ras dan etnis yang dimiliki peserta didik. Cobalah merespon

perbedaan perbedaan yang ada secara positif dan sensitif. *Keempat*, guru harus bijaksana dalam memilih dan menggunakan materi pelajaran. Sebagian materi memiliki karakteristik yang halus maupun mencolok atas kelompok etnis. Menjelaskan pada siswa kalau suatu kelompok etnis *distereotipkan*, diabaikan dari, atau menggambarkan dari sudut pandang tertentu. Guru dapat menggunakan buku, film, dan rekaman yang beredar di pasaran atau dapat mengunduhnya dari internet sebagai pelengkap buku teks dari kelompok etnis dan menyajikannya dari sudut pandang kelompok etnis.

Kelima, guru harus memahami terhadap kemungkinan sifat kontroversial dari sebagian materi studi etnis. Jika guru telah memahami dengan jelas tujuan instruksional, gunakan buku atau sumber yang dapat mengurangi kontroversi untuk mencapai tujuan yang sama. Gunakan teknik belajar yang kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah dan di kelas. Riset menunjukkan bahwa jika kelompok belajar tersebut terintegrasi secara rasial, maka peserta didik akan mengembangkan lebih banyak teman dari kelompok rasial yang

lain. Kelima cara yang telah diuraikan di atas merupakan pilihan alternatif dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menerapkan strategi pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal.

PENUTUP

Uraian yang telah dikemukakan di atas, menggambarkan bahwa pendidikan multikultural menjadi bagian penting dalam masyarakat yang majemuk. Pemahaman akan keberagaman melalui pendidikan multikultural dapat meningkatkan kesadaran bahwa perbedaan adalah suatu keniscayaan, dan perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Perbedaan perlu diterima sebagai suatu kewajiban dan perlu mengembangkan sikap toleransi agar dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran pendidikan multikultural, maka sudah seharusnya guru merancang sebuah strategi yang tepat. Strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai bagian penting dalam

pengembangan pendidikan multikultural.

Melalui pemanfaatan budaya lokal sebagai dasar pengembangan pendidikan multikultural, akan semakin meningkatkan pemahaman akan pentingnya upaya untuk terus menjaga atau melestarikan budaya lokal. Selain itu, dalam suasana pembelajaran di kelas yang sangat mungkin memiliki heterogenitas dari berbagai bidang, menjadi hal penting untuk saling mengenal budaya lokal yang dimiliki oleh peserta didik. Namun demikian, keberhasilan pengembangan pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal ini sangat ditentukan oleh kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Di tangan seorang guru yang memiliki kreativitas dan daya inovatif tinggi, pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal akan sangat mungkin dan mudah terwujud. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman tentang multikulturalisme dan peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran agar tujuan pembelajaran pendidikan multikultural dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2005). *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Choirul Mahfud. (2008). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enco Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Endang Soenarya. (2000). *Teori Perencanaan Pendidikan: Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Gulo, W. (2008). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Grasindo.
- Hisam Zaini, dkk. (2007). *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: CTSD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ihromi, T.O. (2006). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ngainun Naim. (2009). *Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup*

- Siswa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sardiman. (2007). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutarno. (2008). *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.
- Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiq A. Mughni. (2008). "Pendidikan Berbasis Multikulturalisme" dalam Choirul Mahfud. (2008). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Unit Program Pengalaman Lapangan. (2008). *Materi Pembekalan Pengajaran Mikro/PPL I Than 2008*. Yogyakarta: UPPL, UNY.

DINAMIKA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DALAM DIMENSI HISTORIS, SOSIO-KULTURAL DAN PEMERINTAHAN

Rusnaini

PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail : rusnainiruswandi@gmail.com

Abstract. *This paper reports on the investigation of the special status of Jogjakarta Special Region in the context of regional autonomy in Indonesia. It is aimed to find the dynamic of Jogjakarta special status. Its focus is supposed to not only put an emphasis on legal formal rules but also on sociocultural aspects. The results of the findings are as follows: the dynamics of special status of Jogjakarta is related to the history of Jogjakarta since the issuance of the 5 September 1945 Mandate to the stipulation of the Law No. 13 of 2012 concerning of Jogjakarta Special Region, which demonstrate that social construction has become political construction.*

Key Words: regional autonomy

PENDAHULUAN

Yogyakarta adalah satu-satunya monarki yang masih eksis di Indonesia dan secara efektif bertahan dalam artian sosial, ekonomi dan politik (Mas'udi, 2009:305). Eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diakui berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang ini, substansi keistimewaan DIY terkait dengan jalannya pemerintahan tidak diatur secara khusus, sehingga menimbulkan multi tafsir tentang makna keistimewaan DIY. Wahyu Surya Novasari (2010) menemukan beberapa hal, diantaranya dengan adanya UU No3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memberikan banyak hal yang menjadikan DIY

benar-benar menjadi daerah yang istimewa. Keistimewaan tersebut hanya terlihat dari penetapan Gubernur atau kepala yang dijabat oleh keturunan keraton yaitu Sultan dan beberapa hal pengaturan tentang pertanahannya, sedangkan segi-segi lain termasuk dalam hal kelembagaan daerahnya sama dengan provinsi lain.

Menyikapi ketidakjelasan status keistimewaan Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DIY mengajukan usulan atau draft Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2002. Namun, Pemerintah Pusat menolak status keistimewaan DIY sebagaimana yang dipersepsi oleh beberapa tim penyusun draft, khususnya tentang Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Adipati

Paku Alam (PA) yang otomatis menjabat sebagai kepala daerah DIY. Alasan penolakan Pemerintah adalah bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah (pemilukada). Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan eksistensi DIY sebagai daerah dengan status istimewa tidak menimbulkan pemaknaan yang sama tentang keistimewaan DIY oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Yogyakarta. Konstruksi yang dibangun oleh Presiden SBY/Pemerintah terhadap keistimewaan Yogyakarta mengambil referensi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Oleh karena itu, Presiden SBY/pemerintah menolak status Keistimewaan Yogyakarta sebagaimana yang berlaku selama ini. Pandangan Presiden SBY ini sesuai dengan azas kesamaan dan ketidaksamaan yang dikemukakan oleh Otto Koellreutter, yakni azas kesamaan dimana setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi gubernur, dan azas ketidaksamaan di mana tidak semua orang bisa menjadi gubernur. Mengacu pada pendapat Jitta, Presiden mengukur demokrasi dari segi bentuk dan

pemerintahannya (*method of decision making*), bukan berdasarkan segi idea dan isinya yang memperhatikan pula masalah keadaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan (*contents of decision making*) (Nurtjahyo, 2006:53).

Berbeda dengan pihak Presiden/ pemerintah, berbagai elemen masyarakat Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengambil referensi Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang". Selain itu, ada beberapa Undang-Undang yang juga dijadikan referensi, yaitu UU No.22/1948, UU No.3/1950, UU No.5/1974, UU No.22/1999 dan UU No.32/2004. Selain referensi yang diambil dari beberapa undang-undang sebagaimana dikemukakan di atas, rakyat Yogyakarta juga mengambil referensi sejarah bahwa Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam dinilai berjasa kepada NKRI. Nilai keistimewaan juga dibuktikan dengan peran kerajaan Yogyakarta dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah nasional, antara lain Yogyakarta pernah menjadi ibukota Republik Indonesia. Di satu sisi Presiden atau pemerintah berusaha menghapus faktor-faktor sejarah, sementara di sisi lain masyarakat Yogyakarta memiliki keinginan kuat

untuk menggali faktor-faktor sejarah. Perbedaan pemaknaan atas keistimewaan Yogyakarta tersebut menyebabkan munculnya isu eksistensi keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta, hingga akhirnya lahir Undang-Undang No. 30 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Dalam artikel ini, penulis akan memaparkan beberapa aspek tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dikaitkan dengan status keistimewaan dalam kebijakan otonomi asimetris. Dengan mengambil perspektif teori konstruksi realitas sosial Berger & Luckmann (1991), penulis ingin berargumen keistimewaan DIY (baca: Yogyakarta) tidak bisa dipahami secara yuridis formal saja, sebab merupakan suatu konstruksi realitas sosial. Selanjutnya mengacu pada metode arkeologis pengetahuan Foucault (2002), penelitian tentang keistimewaan Yogyakarta dalam dimensi historis, sosio-kultural dan pemerintahan merupakan hasil melacak elemen pembentuk sejarah keistimewaan Yogyakarta dengan menyelidiki peristiwa-peristiwa (formasi) diskursif, pernyataan-pernyataan yang dibicarakan, dan dituliskan dalam sebuah konteks sejarah DIY.

PEMBAHASAN

Dimensi Historis

1. Amanat 5 September 1945: Bergabung Dengan NKRI

Perubahan politik di masa awal kemerdekaan menyebabkan kerajaan-kerajaan di Nusantara mengambil kebijakan dan tindakan politik untuk menyesuaikan diri dengan situasi pada waktu itu. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam VIII sebagai raja Kadipaten Pakualaman mengirim surat kawat kepada Presiden Soekarno yang berisi ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Sri Sultan HB IX mengeluarkan dekrit yang disebut Amanat Sri Sri Sultan Hamengku Buwono IX tertanggal 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi Kasultanan Ngayogyakarta dengan RI. Amanat tersebut menyatakan bahwa Kraton Yogyakarta Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Bentuk hubungan dengan pemerintah pusat bersifat langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Pada saat yang bersamaan, Paku Alam VIII mengeluarkan dekrit dengan isi yang serupa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk berintegrasi dengan NKRI,

merupakan pilihan politik Sultan HB IX dan Yogyakarta dan Adipati PA VIII yang sangat visioner pada saat itu.

2. Piagam Kedudukan: Jaminan Status Khusus

Pada tanggal 6 September 1945, Presiden Soekarno memberikan jaminan status khusus bagi kedua raja tersebut berupa Piagam Kedudukan. Meskipun diserahkan pada tanggal 6 September, Piagam kedudukan tersebut tertanggal 19 Agustus 1945. Jadi, Piagam Kedudukan itu sesungguhnya dibuat sehari setelah pernyataan dukungan dari kedua raja Yogyakarta tersebut terhadap kemerdekaan RI (Baskoro&Sunaryo, 2010:20; Wahyukismoyo, 2008:9).

3. Amanat 30 Oktober 1945: Lahirnya Status Keistimewaan

Setelah Kadipaten Pakualaman membentuk pemerintahan bersama dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pada 30 Oktober 1945, Sri Sultan HB IX bersama-sama dengan Sri PA VIII mengeluarkan Amanat lagi yang menegaskan bahwa Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia (hanya ada satu Daerah Istimewa, dan Sri Sultan HB IX bersama PA VIII berstatus sebagai Kepala Daerah Istimewa itu). Isi Amanat 30 Oktober 1945 juga menyerahkan kekuasaan legislatif

kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP KNI) Daerah Yogyakarta. Amanat ini juga menandai bersatunya dua kerajaan di Yogyakarta setelah 100 tahun terpisah. Sejak saat itu kedua kerajaan bersatu dan bersama-sama membuat Amanat dalam satu naskah.

Berdasarkan penelusuran dokumen sebagaimana dipaparkan di atas, konsep keistimewaan Yogyakarta baru muncul pada 30 Oktober 1945, ketika Sri Sultan HB IX bersama-sama dengan Sri PA VIII mengeluarkan Amanat yang menegaskan bahwa Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia (hanya ada satu Daerah Istimewa, dan Sri Sultan HB IX bersama PA VIII berstatus sebagai Kepala Daerah Istimewa itu). Keputusan politik untuk berintegrasi ini menunjukkan bahwa kedua raja sangat visioner. Jadi, kedua raja Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Baginda Paku Alam VIII yang memunculkan konsep keistimewaan Yogyakarta. Sejalan dengan temuan ini, Wahyukismoyo (2008:53) menemukan bahwa "Yogyakarta menjadi istimewa adalah sebuah pilihan politik dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII".

Setelah mengeluarkan Amanat 30 Oktober 1945 tersebut di atas, pada tanggal 18 Mei 1946 Sultan HB IX dan PA VIII mengeluarkan

Maklumat Nomor 18 yang mengatur kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam maklumat ini secara resmi nama daerah istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua kerajaan, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam sebuah Daerah Istimewa. Maklumat tersebut menetapkan bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh DPRD (Dewan daerah, Dewan Kota, Dewan Kabupaten, dan Dewan Kelurahan) sesuai dengan tingkatan pemerintahan masing-masing. Kekuasaan eksekutif dipangku secara bersama-sama oleh Dewan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah (Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, Bupati Kota Kasultanan, dan Bupati Pamong praja kabupaten) sesuai dengan tingkatannya. Dewan pemerintah daerah dipilih oleh DPRD serta bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan kedua raja bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Uraian di atas menegaskan lahirnya status keistimewaan DIY. Selanjutnya dalam maklumat-maklumat yang dikeluarkan di Yogyakarta dan ditandatangani oleh Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII disebutkan nama atau sebutan Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia.

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta: Status Legal Formal Keistimewaan

Status legal formal keistimewaan DIY secara formal dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 4 Maret 1950. Undang-undang ini mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UU No 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa setingkat dengan provinsi, kabupaten dan desa. Baskoro & Sunaryo (2010:51) mengemukakan bahwa meskipun secara *de facto* nama atau sebutan DIY sudah muncul sejak 1945, karena nama atau sebutan DIY telah dipakai secara riil efektif sejak dikeluarkannya Maklumat No. 18 Tahun 1946 pada tanggal 18 Mei 1946 yang ditandatangani oleh Sri Sultan HB IX dan Sri PA VIII), namun secara *de jure* Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru ada setelah dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1950 (UU Tentang Pembentukan DIY).

Dalam UU No 3 tahun 1950, DIY bukan hanya tentang Sultan HB dan PA sebagai kepala daerah dan wakilnya, melainkan juga tentang kewenangan mengatur soal pemberian wewenang untuk mengatur sendiri 13 urusan rumah tangga DIY. UU No. 3 tahun 1950 kemudian diubah dengan UU No. 19 tahun 1950 yang menyatakan

Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi bukan provinsi. Kata bukan di sini mengandung makna bahwa DIY tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia.

Pada tahun 1950 Negara Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mengalami perubahan dari sebuah daerah *Zelfbesturende Landschappen* atau daerah Swapraja menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peristiwa bersejarah yang melandasi pengakuan hukum atas DIY ini diatur dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menunjukkan sebuah pengakuan akan legitimasi keistimewaan Yogyakarta. Setelah kedua kerajaan menjadi wilayah NKRI yang disebut Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya wilayah DIY dibagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kota diatur dengan UU No.15 tahun 1950 dan UU No. 16 tahun 1950. Kedua UU tersebut diberlakukan dengan PP No. 32 tahun 1950.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Presiden RI menyatakan Negara Indonesia kembali ke UUD 1945, aturan tentang pemerintah daerah diatur dalam UU No 18 Tahun 1965. Khusus tentang DIY pada penjelasan Pasal 86 dinyatakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang pada saat berlakunya undang-undang ini menjadi Wakil

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat masa jabatan.

Kemudian pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan UU No 5 Tahun 1974 untuk menggantikan UU No 18 Tahun 1965. Dalam Bab VII Aturan Peralihan Pasal 91 huruf b berbunyi:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut undang-undang ini dengan sebutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 merupakan pengakuan secara legal akan posisi Kasultanan dan Pakualaman dan pengakuan akan bentuk dan susunan pemerintahan DIY yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia.

5. Peranan DIY Di Awal Kemerdekaan: Mempertahankan Kedaulatan RI

Pada waktu para pemimpin negara RI terancam keselamatannya oleh Belanda yang masuk kembali dengan

membonceng tentara Sekutu, Sri Sultan HB IX mempersilahkan para pemimpin negara RI untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Pada tanggal 26 Oktober 1945 (Maklumat No. 5) dibentuklah Laskar rakyat Mataram yang berfungsi sebagai pembantu Tentara Keamanan Rakyat. Ketika pagi hari tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI, Sidang Kabinet dan BP Komite nasional Indonesia Pusat (KNIP) dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi. Apabila PDRI di Bukittinggi gagal, maka ditugaskan kepada Lambertus Nico Palar di New Delhi India untuk meneruskan Pemerintahan RI. Sri Sultan juga memprakarsai Serangan Umum 1 Maret 1949. Kejadian ini disiarkan oleh pemancar yang ada di Gunung Kidul di Playen, ke Bukit Tinggi dan dari Bukit Tinggi ke India, dan dari India ke PBB. Ternyata peristiwa ini mempunyai pengaruh yang besar sekali, sehingga *security council* memutuskan bahwa Republik harus kembali berdiri. Sebagai akibat dari keputusan itu diadakan perundingan van Royen dan Moh. Roem. Berdasarkan perjanjian Roem-Royen yang dimulai pada 14 April 1949, Presiden Soekarno di Menumbing

Bangka memberi mandat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang waktu itu menjabat menteri Koordinator Keamanan untuk mengkoordinir dan mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dengan penetapan Presiden (Soekamto, 2009:75). Sri Sultan HB IX mendapatkan tugas berdasarkan Penetapan Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI pada tanggal 1 Mei 1949.

6. Berbagai Undang-Undang Pendukung Keistimewaan Yogyakarta: Pengakuan Politik Terhadap Eksistensi Keistimewaan.

Eksistensi keistimewaan Yogyakarta tak bisa dipisahkan dengan undang-undang pendukung yang dikeluarkan kemudian. Keistimewaan Yogyakarta telah diakomodir oleh pemerintah RI, yang terbukti dalam Pasal 18 UUD 1945 (BAB IV) tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."

Untuk menegaskan tentang daerah istimewa, penjelasan UUD 1945 Pasal 18, yang terbit pada Februari 1946, menyebut dua macam daerah istimewa. Pertama, daerah swapraja atau *zelfbesturende landschappen* yang pada masa itu berhubungan tak langsung dengan pemerintah. Pasal 21 Ayat (2) *Indische Staatsregelling*, dan disebut *Kooti* pada masa Jepang. Kategori itu mencakup Negari Ngajogyakarta Hadiningrat. Kedua, persekutuan hukum adat atau *zelfstandige volksgemeenschappen* yang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri serta memiliki asal usul dan susunan asli, Pasal 128 Ayat (3) *Indische Staatsregeling*. Sebagai perbandingan, Daerah Istimewa Aceh, proses pembentukannya tidak berasal dari *zelfbesturende landschappen* maupun *zelfstandige volksgemeenschappen*, karena maksud paling pokok dari pemberian status "Daerah istimewa Aceh" adalah dalam rangka pemulihan keamanan di daerah Aceh yang telah beberapa tahun terganggu dengan adanya pemberontakan DI/TII di Aceh. Pembentukan Daerah istimewa Aceh diatur di dalam Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 26 Mei 1959 No.1/Misi/1959. Adapun untuk DKI Jakarta, sekalipun mempunyai status khusus, juga bukan daerah

istimewa sebagaimana dimaksud UUD 1945 (Huda, 2001: 59).

Pada tanggal 10 Juli 1948 pemerintah mengeluarkan UU No.22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mengatur susunan dan kedudukan daerah istimewa. Setelah itu, pada tahun 1950 Negari Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman mengalami perubahan dari sebuah daerah *Zelfbesturende Landschappen* atau daerah Swapraja menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peristiwa bersejarah yang melandasi pengakuan hukum atas DIY ini diatur dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY secara formal dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 4 Maret 1950. UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Kontrak politik antara Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman dengan Soekarno pada waktu itu posisi Gubernur DIY adalah wakil pemerintah pusat (bertanggungjawab langsung kepada presiden), jadi tidak seperti gubernur lainnya di Indonesia. Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam UU Pembentukan karena telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1948. Dalam UU No. 3 Tahun 1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi, bukan sebuah

Provinsi. UU No.3 tahun 1950 itu sangatlah singkat, hanya 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi. Jadi keistimewaannya dari suatu Daerah Istimewa masih tetap terletak dalam kedudukan kepala daerahnya. Kepala Daerah Istimewa ini diangkat oleh penguasa Pemerintah Pusat yang berwajib, maka: a. ia tidak dapat ditumbangkan oleh DPRD, sedangkan b. mengenai gaji dan segala emolumenten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Petikan Penjelasan Umum Ad 4 UU No 1/1957). Jadi UU No. 1 Tahun 1957 adalah UU tentang jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa dari keturunan Sri Sultan HB dan Sri Paduka PA.

Ketika UUD 1945 diberlakukan kembali tahun 1959, UUD 1945 tetap memberikan pengakuan yang luas bagi keistimewaan suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Perpres No.6 tahun 1959 (disempurnakan), khususnya dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), yang substansinya sama dengan UU No. 1 tahun 1957 (lihat Sujamto, 1988). Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintahan Orde Baru melanjutkan pengaturan tentang keistimewaan suatu daerah dengan UU No 5 Tahun 1974. Bab VII Aturan Peralihan Pasal 91 sub b menyatakan bahwa "*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY tidak terikat pada ketentuan masa*

jabatan, syarat, dan cara pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya" (Pasal 91 Aturan Peralihan).

Perubahan politik nasional yang diikuti dengan penyusunan undang-undang tentang pemerintahan daerah tetap mengakui keberadaan daerah yang bersifat istimewa. Di zaman Reformasi UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan pasal 122 secara spesifik menegaskan bahwa pengakuan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai undang-undang ini (petikan penjelasan pasal 122 UU No 22/1999). Pasal 226 ayat (2) merujuk penjelasan Pasal 122 UU No. 22 tahun 1999, menegaskan "isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini".

Pemerintah pasca Orde Baru juga melakukan amandemen terhadap UUD 1945 Pasal 18 B ayat

(1) UUD 1945 (hasil amandemen 1-4): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 Ayat (5) dan Pasal 56 *jo* UU No.12/2008 tentang Perubahan UU No.32/2004 mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pasal 226 ayat (2) merujuk penjelasan Pasal 122 UU No. 22 tahun 1999, menegaskan "isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini".

7. Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta: Mempertahankan Keistimewaan Berhubung kekhawatiran akan kemungkinan dihapuskannya status keistimewaan Yogyakarta (Sujanto, 1988:2), perjuangan untuk mempertahankan keistimewaan sudah mengemuka sejak tahun 1980, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan DPRD DIY No. 4/K/DPRD/1980 tanggal 18 Juli 1980 Tentang Sebutan dan Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2000,

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan perubahan kedua UUD 1945. Pada perubahan ini, status daerah istimewa diperjelas dalam pasal 18B. Pasal ini mengatakan bahwa keistimewaan suatu daerah diatur secara khusus dalam suatu undang-undang. Merespons hal ini, pada tahun 2002 Pemerintah Provinsi DIY mengajukan RUUK keistimewaan Yogyakarta Sebagai upaya mempertahankan keistimewaan dan untuk mempertegas substansi keistimewaan. Namun usul tersebut tidak disetujui dan dikembalikan oleh pemerintah pusat. Setelah itu, beberapa draft RUUK DIY disusun oleh berbagai pihak. Ada RUUK yang diketuai oleh Affan Gafar, ada RUUK yang disusun oleh Alumni Kagama, ada RUUK yang disusun oleh DPRD DIY. Kemendagri mempercayakan Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) UGM). Selain itu, Pemprov DIY, DPD DIY, DPRD DIY juga mengusulkan draft tentang RUUK DIY.

8. Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Hasil Sebuah Perjuangan

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pemerintah menerbitkan UU Keistimewaan Yogyakarta No. 13 tahun 2012. Dana keistimewaan pun dikucurkan pemerintah sejak tahun 2013 sejumlah Rp 115,6 miliar, dan tahun

2013 dikururkan sejumlah Rp. 523 miliar. Peraturan Daerah Keistimewaan (Perdais) dibuat sebagai turunan UU keistimewaan, agar bisa mawadahi pelaksanaan urusan keistimewaan DIY dalam lima bidang, yaitu yakni kebudayaan, pertanian, tata ruang, tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, serta kelembagaan Pemerintah DIY.

Dimensi Sosio-Kultural

Dalam struktur sosial masyarakat feodal Jawa yang mengenal konsep *kawulo-gusti* (*kawulo* = rakyat; *gusti*= raja), konsep ini tetap eksis dan terus dipertahankan. Kraton adalah sebuah bagian dari identitas Yogyakarta dan masyarakatnya, di mana raja menduduki sebuah posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Hubungan antara *kawula* dan *gusti* dilakukan atas dasar saling percaya, saling menjaga, saling melindungi, saling menghormati, dan masing-masing menempatkan diri pada posisinya sesuai dengan peran, fungsi, dan stratanya (*empan-mapan*). Mengacu pada Campbell (1994:37-38), struktur sosial ini merupakan "istilah yang diberikan untuk kerangka kerja normatif tempat individu-individu menyesuaikan diri sejauh mereka bagian dari suatu tatanan sosial". Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing posisi saling

melengkapi dan dengan demikian menjadi sebuah dasar untuk kerjasama di antara posisi-posisi atau kedudukan-kedudukan mereka yang berbeda namun berhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa identitas kolektif rakyat Yogyakarta ini dibentuk oleh proses-proses sosial. Proses ini didasari oleh konteks sosial dan kultural yang berkembang, bukan dari pihak luar. Oleh karena itu, identitas kolektif merepresentasikan negosiasi atau kesepakatan dari rakyat Yogyakarta yang terlibat didalamnya. Kondisi ini dijelaskan oleh Berger dan Luckmann (1990), bahwa begitu identitas kolektif ini memperoleh wujudnya, maka ia akan dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial.

Keistimewaan Yogyakarta diterima sebagai *common sense*. Semua hal yang terkait dengan raja dan kraton merupakan cadangan pengetahuan (*social stock of knowledge*) yang dialihkan dari generasi ke generasi dan yang tersedia bagi individu dalam kehidupan sehari-hari. Cadangan pengetahuan masyarakat itu mencakup pengetahuan tentang situasi diri dan status sosial diri dalam lingkup masyarakat Jawa pada umumnya. Seorang individu mendefinisikan situasinya dengan mengambil dari "persediaan pengetahuan" bersama yang ia ambil alih dan kembangkan melalui

pengalaman-pengalamannya sendiri (Berger&Luckmann, 1990:58). Mengacu pada Berger& Luckman (1990:62), kesahihan pengetahuan seseorang tentang hubungan antara Sultan HB dengan substansi keistimewaan Yogyakarta diterima begitu saja sampai ada perkembangan baru, yakni sampai simpul sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh kerangka pengetahuan itu. Ketika masyarakat Yogyakarta merasa ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa kepala daerah yang dipilih melalui prosedur demokrasi cenderung koruptif dan manipulatif, mereka kembali ke cadangan pengetahuan bahwa Sultan adalah sosok yang tepat untuk dijadikan kepala daerah. Sejalan dengan hal ini, Jaya (2011:35) menemukan bahwa sosok raja yang baik hati itu "menjadi mitos modern yang diyakini masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan unyuk bersikap dalam RUUK DIY... selama asumsi tersebut masih terjaga dengan baik, masyarakat akan memberi dukungannya terhadap raja". Sultan akan melindungi rakyat, ia hanya memberi dan tidak akan mengambil sesuatu dari rakyatnya. Sebagai contoh: (1) rakyat yang mendiami tanah "magersari" diberi surat *kekancingan* sebagai surat izin mendiami tanah kraton; (2) warga kauman diberi wewenang

pengelolaan lahan parkir di sekitar kraton.; (3) warga diberi kekeluasaan berdagang di lahan kraton yang berada di sekitar daerah Malioboro dan pasar Beringharjo; (4) perangkat desa diberi wewenang untuk mengelola tanah desa pemberian kraton.

Bagi rakyat Jawa, kraton itu bukan hanya suatu pusat politik dan budaya, melainkan juga pusat kramat kerajaan. Kraton adalah tempat raja bersemayam, dan raja merupakan sumber kekuatan-kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketentraman, keadilan, dan kesuburan. Paham itu terungkap sangat jelas dalam gelar raja Yogyakarta: "*Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Hinggang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Hing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Hinggang Jumeneng Kaping I Ing Ngayogyakarta Hadiningrat*" (Suseno, 1984:107). Gelar yang disandang Sultan HB juga menunjukkan bahwa "konsep Jawa memandang Sultan sebagai seseorang yang dianugerahi kerajaan dengan kekuasaan politik, militer dan keagamaan yang absolut" (Soemardjan, 2009:18). Mitos terkait Sultan HB menjadi cadangan pengetahuan masyarakat (*social stock of knowledge*) bagi *kawula* Yogyakarta, merupakan pengetahuan sehari-hari yang didapatkan dari generasi terdahulu,

dilengkap dengan perangkat-perangkat (*bodies*) pengetahuan yang spesifik. Pemaknaan tentang arti kata "Hamengku Buwono", menyandang tiga substansi yang bersumber dari makna *Hamangku*, *Hamengku*, dan *Hamengkoni*. Hamengku, mengandung makna *bangrengkuh* atau *ngemong*, melindungi, dan mengayomi, tanpa membedakan golongan keyakinan, dan agama secara adil. Salah satu makna Hamengku adalah mendengarkan Keteladanan yang mengandung watak *gung binathara*, adalah esensi Hamengkoni". Jadi hakikat Hamengku identik dengan *berbudi bawa leksana ambeg adil paramarta* (Nusantara, 1999:30). Konsep ini juga menyiratkan seorang raja harus dapat menciptakan ketertiban dan keamanan rakyat serta negara, seperti dalam ungkapan *anjaga tata titi tentreming praja* (Widyawati, 2012:10).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penguasa atau raja Yogyakarta membangun tatanan sosial sedemikian rupa didasarkan oleh logika integrasi yang bertujuan untuk mempertahankan identitas, logika strategi yang bertujuan untuk mencapai suatu kepentingan, maupun logika 'subjektivitas' yang bertujuan mempertahankan nilai-nilai kultural (Lallement, 2009:287-288).

Dimensi Pemerintahan

1. Aspek Sistem Pemerintahan Aristokrasi Demokrasi: "Tahta Untuk Rakyat"

Sri Sultan HB IX dikenal sebagai Sultan yang tiga kali melakukan pembenahan pemerintahan kraton dan terkenal dengan penyelenggaraan pemerintahan demokrasi modern di kraton Yogyakarta (Soemarjan, 2009). Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten pada tahun 1951 (Soemardjan, 2009:115). Demokratisasi dilaksanakan di tingkat kotapraja dan kabupaten, bahkan juga pada tingkat Kalurahan (desa), yaitu dengan membentuk Dewan Perwakilan rakyat yang bersama-sama dengan Pemerintah menentukan haluan pemerintahan di daerahnya. DIY telah memiliki DPR Kelurahan tahun 1945. Selanjutnya pada awal tahun 1946 diikuti dengan pembentukan dewan-dewan penasehat pemerintah lokal dan parlemen-parlemen di semua tingkatan administratif dari Provinsi sampai Desa. Langkah penyempurnaan demokratisasi di Daerah istimewa Yogyakarta menuju tahap yang semakin nyata ketika salah satu unsur dari sistem demokratisasi itu terpenuhi, yaitu dengan diadakannya pemilihan umum bertingkat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tahun 1951. Semua ini menunjukkan peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dalam menyikapi perubahan sosial di Yogyakarta. Penelitian George Mc. T Kahin (dalam Saddhono & Yono, 2010) menyimpulkan bahwa sejak Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia, ia telah menjadi *pilot project* pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Sultan HB IX bahkan diakui sebagai Sultan yang memotori demokrasi di Yogyakarta, bahkan diyakini di Indonesia. Dari Yogyakarta, penerapan sistem demokrasi dibangun atas semboyan "tahta untuk rakyat". Sifat demokratis inilah yang membuat Sultan juga disegani sejak lama baik oleh penduduk asli maupun para pendatang di Yogyakarta. Sultan HB IX sangat populer dan dipandang sangat demokratis di kalangan berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta. Sejalan dengan temuan ini, Putnam (dalam Winataputra, 2001:74) menemukan bahwa di daerah-daerah yang memiliki akar tradisi '*civic values*' ternyata menunjukkan pertumbuhan sikap demokratis yang cukup tinggi. Kemudian Mochtar Mas'ood (2007) menemukan hubungan antara wacana-wacana dan praktek-praktek pluralisme dan partisipasi *civic* masa kini di Yogyakarta yang melahirkan keunikan kultur politik

yang dikembangkan dalam komunitas masyarakat Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono IX bersama Adipati Paku Alam XIII telah menggunakan popularitas personal, otoritas administratif dan prestisenya bagi perubahan sosial dan politik yang membuahkan politik yang lebih plural dan terbuka dengan empat tema insiatif pembaruan: nasionalisme, populisme, demokrasi, dan modernisasi. Tindakan dan keputusan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan awal dari pembaruan yang menunjukkan ambisi-ambisinya yang populis dan antifeodal, yang menunjukkan Sultan sangat demokratis. Kemudian ia memunculkan gagasan pendidikan massal sebagai instrumen modernisasi yang salah satu elemen kunci dalam program ini adalah pendirian Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Sebelum meninggal dunia, Sri Sultan HB IX berpesan kepada putranya yang kelak dikemudian hari meneruskan tahta kasultanan. *Pertama*, agar lebih berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar. *Kedua*, harus mampu merengkuh siapa saja, sekalipun orang itu memusuhinya. *Ketiga*, tidak boleh melanggar *paugeran adat* (aturan adat-tradisi) dan *paugeran nagari* (aturan pemerintahan). *Keempat*, harus mampu melaksanakan tugas dan

tanggung jawab yang ada di pundaknya sebagai amanah (Wahyukismoyo, 2008:32). Dalam filosofi Jawa, pemimpin adalah pengayom, yang siap berdiri paling depan *'ing ngarso sung tulodo'*, menjadi anutan dan tampil mengambil tanggung jawab dengan segala resikonya.

2. Aspek Pertanahan: Pelayanan Publik

Menurut budayawan kraton yang juga pengurus panitikismo bernama Condro Purnomo, Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) adalah tanah adat peninggalan leluhur yang dimiliki keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman yang terdiri atas tanah-tanah raja dan keluarga kraton, situs, magersari serta tanah garapan kosong (wawancara 10 April 2012). Berdasarkan penelusuran dokumen, tanah di DIY yang di atasnya belum dibebani hak milik atau eigendom adalah tanah Kraton atau tanah Kasultanan dan Paku Alaman. Konsepsi tanah kesultanan adalah tanah DIY setelah dikurangi tanah negara dan tanah masyarakat yang sifatnya pribadi. Tanah-tanah tersebut tersebar di sebagian wilayah DIY dan tercatat sebagai arsip desa. Sejak tahun 1918, sebagian tanah telah diberikan kepada rakyat dan kemudian dikonversi menjadi hak milik. Banyak tanah Kraton yang

diberiukan kepada ahli waris raja sudah beralih kepemilikan karena dijual. Adapun tanah di DIY yang di atasnya belum dibebani hak milik atau eigendom adalah tanah kraton atau tanah Kasultanan dan Pakualaman. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, UU Pokok Agraria tidak mengatur mengenai SG dan PAG ini. Selama ini, khusus untuk hak kepemilikan tanah Kasultanan dan Pakualaman di DIY Yogyakarta diatur sendiri oleh pihak kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman. Sementara itu sejak kemerdekaan RI, tanah-tanah kerajaan di Sumatera atau tanah-tanah *Sultan Grond* sudah diberikan kepada negara dan sejak 1984 berdasarkan UUPA semua tanah sudah menjadi milik negara.

Kepemilikan tanah Kasultanan dan Pakualaman di DIY Yogyakarta diatur sendiri oleh lembaga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (*Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo*) dan Puro Paku Alaman. Setelah kepemimpinan Sultan HB VII, hak milik atas tanah *ndalem* tidak lagi diberikan kepada keturunan-keturunan Sultan untuk menjaga agar sisa-sisa aset kraton tidak berpindah kepemilikannya. Seluruh kerabat kraton hanya diizinkan mendapat hak pakai atas tanah atau *ndalem* tersebut. Beberapa kawasan seperti alun-alun Utara dan Selatan,

Masjid Gedhe, Kepatihan, dan gedung DPRD yang disebut "tanah mahkota" sama sekali tidak bisa diwariskan. Untuk mengelola tanah kraton, pihak kraton menugaskan sejumlah *abdi dalem* yang tergabung dalam satuan khusus pengelolaan tanah yang disebut *Paniti kismo*. Satuan khusus ini memiliki organisasi yang tersusun rapi hingga tingkat desa dan yang memiliki otoritas untuk mengatur pemanfaatan tanah untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta memiliki otoritas untuk mengatur pemanfaatan tanah untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Rakyat yang memiliki "*serat kekancingan*" tidak dibebani pembayaran pajak kepada *paniti kismo* dan kraton, bahkan juga tidak perlu menyerahkan uang "*glondhong pengarem-arem*" sebagai ucapan terima kasih kepada pihak kraton. Jadi mereka boleh menempati tanah kraton secara gratis dan turun temurun. Pada masa pemerintahan HB V dan HB VI, sebagian tanah di kawan dalam kraton (*jeron mbeteng*) diberikan kepada abdi dalem sebagai hak milik, sehingga saat ini tidak semua kawasan dalam kraton merupakan tanah kraton.

3. Aspek Kebudayaan: Melestarikan Budaya Jawa

Konsep dasar kebudayaan Jawa yang khas telah dibangun pada masa Sultan Agung. Setelah dikembangkan oleh HB IX, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mendapat pengakuan sebagai "Pusat Kebudayaan" dan Ngarsa Dalem Hamengku Buwono merupakan orang yang sangat peduli dengan kebudayaan (Nusantara, 1999:31). Pusat Kebudayaan ini terbuka bagi masyarakat luas, terutama untuk melestarikan konsep dasar serta gagasan Ngarsa Dalem Hamengku Buwono IX dalam menata Yogyakarta sebagai wadah miniatur Indonesia, dalam wawasan integral Budaya Nusantara untuk dunia luar (Nusantara, 1999:31). Hingga saat ini, Yogyakarta terkenal dengan sebutan "Kota Budaya". Yogyakarta juga telah berkontribusi bagi pelestarian kebudayaan Indonesia umumnya, dan kebudayaan Jawa khususnya dengan diakuiinya beberapa warisan kebudayaan Indonesia sebagai *the World Intangible Cultural Heritage* oleh UNESCO seperti Keris, Wayang, huruf ha na ca ra ka, dan Batik.

Sejalan dengan temuan ini, Wahyukismoyo (2004) menemukan bahwa Sri Sultan HB X dikenal sebagai Sultan yang memerintahkan tata pemerintahan dalam kraton Yogyakarta dan menitikberatkan kraton sebagai pusat budaya, bukan pusat pemerintahan. Sultan HB X

juga menghidupkan kembali *Pawiyatan* bagi 1200 abdi dalem. Setiap angkatan terdiri dari 100 orang dididik dalam *workshop* yang berlangsung setiap hari Senin dan Kamis. Pada hari pembukaan pertama Kamis 30 September 2010 Sultan HB X mengemukakan perlunya melestarikan kebudayaan Jawa seiring dengan lajunya modernitas. Dalam kegiatan *pawiyatan* diberikan materi tentang aspek kebudayaan yang tak tampak (*intangible*) dan yang tampak (*tangible*), falsafah Jawa, sejarah, bahasa dan sastra, busana, tata krama dan tradisi kraton, pusaka, wayang, gamelan, sampai arsitektur Jawa (Prasetya & Saptono, 2011:107-108).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika keistimewaan Yogyakarta terkait dengan historisitas perjalanan keistimewaan Yogyakarta sejak peristiwa Amanat 5 September 1945 yang menandai bergabungnya daerah Yogyakarta dengan NKRI, Piagam kedudukan yang dikeluarkan Presiden Soekarno 19 Agustus 1945, Amanat 30 Oktober 1945 yang memunculkan istilah "keistimewaan", hingga perjuangan Sultan HB IX dan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Peran Sultan HB IX dan rakyat Yogyakarta ini

kemudian diperkuat dengan fakta sejarah Yogyakarta mendapat legalisasi melalui UU No. 3 tahun 1950 ini dan dilanjutkan dengan berbagai undang-undang lainnya yang mengatur tentang keistimewaan Yogyakarta. Faktor kondisi dan situasi sosial politik turut mempengaruhi berbagai praktik kewarganegaraan di DIY, khususnya dalam pembuatan kebijakan politik terkait dengan keistimewaan Yogyakarta. Akhirnya, dinamika keistimewaan Yogyakarta tersebut di atas menunjukkan konstruksi sosial menjadi konstruksi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, H & Sunaryo, S. (2010). *Catatan perjalanan keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berger, P.L & Luckmann, T (1990). *Tafsir sosial atas kenyataan: sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan*. Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Campbell, T. 1994. *Tujuh teori sosial*. Diterjemahkan oleh F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Foucault, M. (2002). *Pengetahuan dan metode: karya-karya penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Huda, N (2001). Eksistensi dan masa depan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dalam *Logika*, Vol. 6 No. 7
- Jaya, P.H.I (2011). *Hubungan raja dan rakyat di tengah gelombang demokrasi* (ringkasan disertasi). Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lallement, M (2009). "Meneliti logika tindakan" dalam Cabin & Dortier (eds). *Sosiologi, Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Penerjemah: Ninik Rochani Syam. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mas'udi.W. 2009. "Komodifikasi identitas: reproduksi wacana asli dan pendatang dalam debat keistimewaan DIY". Dalam W.P Setyanto & H. Pulungan (Penyunting), *Politik identitas: agama, etnisitas dan ruang/space dalam dinamika politik di Indonesia dan Asia Tenggara*. Salatiga: Percik.
- Mas'ood, M, Panggabean, S.R, Azca, M.N (2007). "Sumber-sumber sosial bagi sivilitas dan partisipasi". Dalam R.W Hefner (Penyunting), *Politik multikulturalisme*. Penerjemah Bernardus Hidayat. Yogyakarta: Kanisius.
- Novasari, W.S. (2010). *Eksistensi status Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia*. (Tesis). Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nusantara, A.A. (1999). *Sri Sultan Hamengku Buwono X. meneguhkan tahta untuk rakyat*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia Bekerja sama dengan Harian Bernas Yogyakarta.
- Nurtjahyo, H (2006). *Filsafat demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saddhono, K & Yono, Y.S.(eds) (2010). *Daulat raja menuju daulat rakyat. demokratisasi pemerintahan di Yogyakarta*. Solo: Cakra Books.
- Soemardjan. S. (2009). *Perubahan sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Soekamto, R.E. (2009). *Yogyakarta ibukota perjuangan*. Yogyakarta: Narasi
- Sujamto. (1988). *Daerah istimewa dalam negara kesatuan*

republik Indonesia. Jakarta:
Bina Aksara.

Suseno, M. (1984). *Etika Jawa*.
Jakarta: PT Gramedia.

Wahyukismoyo, H (2008). *Merajut
kembali pemikiran Sri Sultan
Hamengku Buwono IX*.
Yogyakarta:
Dharmakaryadhika.

Widyawati, W. (2012). *Etika Jawa*.
Yogyakarta: Pura Pustaka.

Winataputra, U.S (2001). *Jatidiri
pendidikan kewarganegaraan*

*sebagai wahana sistemik
pendidikan demokrasi.*
(Disertasi). Program
Pascasarjana Universitas
Pendidikan Indonesia,
Bandung.